



LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV BALAI BESAR POM DI JAKARTA



Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh



Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas rahmat dan karunia yang diberikan sehingga Balai Besar POM di Jakarta dapat melaksanakan tugas dan fungsi sesuai Target Kinerja pada tahun 2021 yang dituangkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAPKIN) Tahun 2021 Triwulan IV. Laporan Kinerja dibuat secara berkala dan merupakan bentuk tanggung jawab dan akuntabilitas instansi terkait tugas perlindungan kepada masyarakat terhadap obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja dalam mengatasi kendala yang ditemukan dalam pencapaian target kinerja. Pencapaian kinerja Balai Besar POM di Jakarta diukur terhadap target dan realisasi kinerja Triwulan IV tahun 2021, yang dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip pengembangan profesionalisme, perlindungan masyarakat dan pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja target Triwulan IV tahun 2021 evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat memberikan gambaran akurat atas kinerja Balai Besar POM di Jakarta dan sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam memenuhi target yang telah ditetapkan bagi Balai Besar POM di Jakarta serta dapat memberikan kontribusi bagi upaya perbaikan secara berkesinambungan untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja Balai Besar POM di Jakarta di masa yang akan datang.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, 20 Januari 2022



Yudi Noviandi, M.Sc.Tech,Apt

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2021 Triwulan IV merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis periode tahun 2020-2024 meliputi tujuan, sasaran dan indikator yang ingin dicapai dalam tahun 2021. Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024, untuk mencapai tujuan Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021, telah ditetapkan 11 (sebelas) sasaran strategis yaitu:

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta;
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta;
3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta;
4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta;
5. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta;
6. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta;
7. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta;
8. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Jakarta yang optimal;
9. Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jakarta yang berkinerja optimal;
10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan; dan
11. Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jakarta secara akuntabel.

Pencapaian sasaran strategis tahun 2021 diukur terhadap 29 indikator kinerja utama yang akan dicapai. Pada Triwulan IV tahun 2021, dari 11 sasaran strategis yang ditetapkan, dengan 29 indikator. Dari 29 (dua puluh sembilan) indikator kinerja, 24 (dua puluh empat) indikator mencapai target dengan kategori **“baik”** ($90\% \leq x < 110\%$); 1 (satu) indikator mencapai kategori **“cukup”** ($70\% \leq x < 90\%$); 1 (satu) indikator mempunyai capaian melebihi 120% dengan kategori **“tidak dapat disimpulkan”**, 3 (tiga) indikator mencapai target dengan kategori **“sangat baik”** ($110\% \leq x < 120\%$). Kriteria baik menunjukkan bahwa penguatan pengawasan Obat dan Makanan menjadi komitmen utama harus terus dipertahankan dan diperkuat secara optimal sehingga produk-produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan di Provinsi DKI Jakarta tetap terjamin aman, bermanfaat/berkhasiat dan bermutu untuk dikonsumsi oleh masyarakat.

Pada Triwulan IV tahun 2021 semua sasaran strategis Balai Besar POM di Jakarta belum dapat dihitung capaian dan ditetapkan kriterianya:

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN (NPS)	KRITERIA
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	95.60	Baik
2.	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap kualitas Obat dan Makanan	102.49	Baik
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	101.59	Baik
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	108.94	Baik
5.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	100.22	Baik
6.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	93.64	Baik
7.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	108.54	Baik
8.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	100.41	Baik
9.	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jakarta yang berkinerja optimal	100.53	Baik
10.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	114.15	Baik

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN (NPS)	KRITERIA
11.	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jakarta secara Akuntabel	99.43	Baik

Pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi DKI Jakarta untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Balai Besar POM di Jakarta didukung APBN Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 41.616.698.000,- (empat puluh satu milyar enam ratus enam belas juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah). Realisasi anggaran yang dibelanjakan pada Triwulan IV tahun 2021 sebesar Rp 41.538.323.342,- (empat puluh satu milyar lima ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah) dengan persentase serapan anggaran sebesar 99.64%.

Balai Besar POM di Jakarta berupaya melakukan perbaikan secara terus menerus dalam rangka meningkatkan kinerja di masa yang akan datang sehingga dapat tercipta manajemen kinerja pemerintahan yang berorientasi hasil, melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Penguatan pemberantasan obat dan makanan yang mengandung bahan berbahaya/dilarang, dan ilegal termasuk palsu, melalui program-program peningkatan keterlibatan aktif masyarakat diantaranya Pengawasan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS), Pasar aman dari bahan berbahaya, Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD), dan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi).
2. Peningkatan kerjasama dengan lintas sektor melalui penandatanganan Perjanjian Kerjasama dengan pemerintah daerah dan instansi terkait serta melakukan evaluasi terhadap hubungan kerjasama yang terjalin supaya lebih efektif dalam upaya peningkatan pengawasan obat dan makanan di Provinsi DKI Jakarta.
3. Dengan telah diraihnya Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada Tahun 2020, BBPOM di Jakarta memperkuat implementasi RB melalui berbagai kegiatan internalisasi kepada pegawai. Demi mendukung terwujudnya Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), fokus kegiatan pada 2021 adalah peningkatan pelayanan publik melalui berbagai inovasi.

HIGHLIGHT KINERJA TRIWULAN IV **TAHUN 2021**

Dalam upaya perlindungan masyarakat dari obat dan makanan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan dan untuk meningkatkan hasil pengawasan obat dan makanan di Balai Besar POM di Jakarta telah melakukan **kegiatan terobosan (*breakthrough*)** di Triwulan IV tahun 2021 sebagai berikut:

1. Inovasi Laron Baja Siap Melindungi Masyarakat dari Obat dan Makanan Ilegal

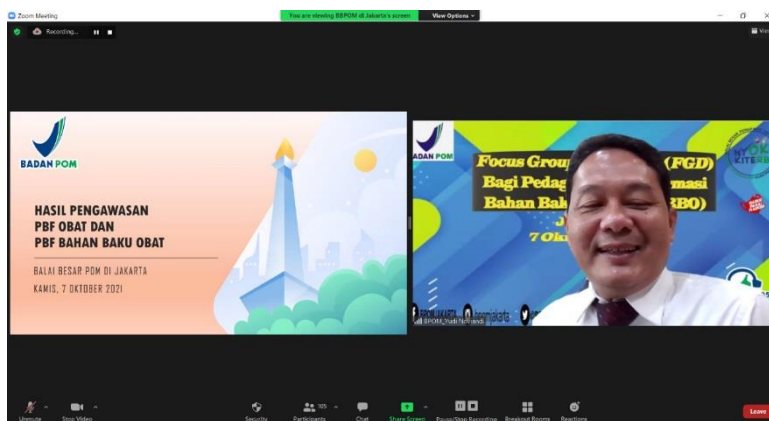
BBPOM di Jakarta mendapat apresiasi sebagai salah satu finalis yang dinyatakan masuk dalam tahap penilaian akhir pada Lomba Inovasi Pelayanan Publik



Tahun 2020 dengan mengusung Inovasi Lartas Online BBPOM di Jakarta yang selanjutnya disebut Laron Baja. Presentasi terkait Inovasi Laron Baja dinilai oleh Dewan Juri yang terdiri dari Plt. Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah II Kementerian PAN RB, M. Yusuf Kurniawan serta Juri Internal yaitu Kepala Biro Umum, Dr. Irwansyah S.IP, M.Si; Direktur Pengawasan Suplemen, Obat Tradisional dan Kosmetik, Irwan, S.Si, Apt,M.KM; serta Direktur Informasi Obat dan Makanan, Rizkal, S.Sos., M.M. BSSN. Kepala BBPOM di Jakarta menyampaikan paparan mengenai LaronBaja yang merupakan layanan verifikasi Lartas (Barang dengan Kategori Larangan Terbatas) barang kiriman pertama di Indonesia dengan sinergi KPP Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru. Inovasi ini dinisiasi pada Tahun 2017 dan terus mengalami perkembangan serta saat ini dalam proses eskalasi integrasi pada aplikasi E-BPOM. Inovasi ini sangat bermanfaat sebagai tools untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan Ilegal.

2. Focus Group Discussion (FGD) Bagi Pedagang Besar Farmasi Bahan Baku Obat (PBF BBO)

Dalam rangka konsistensi penerapan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) oleh Pedagang Besar Farmasi Bahan Baku Obat (PBF BBO) di wilayah



Provinsi DKI Jakarta, Balai Besar POM di Jakarta menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bagi Pedagang Besar Farmasi Bahan Baku Obat (PBF BBO) pada tanggal 07 Oktober 2021 secara daring (online). Jumlah peserta yang hadir 101 (seratus satu) peserta yang dihadiri oleh pimpinan dan Apoteker penanggungjawab PBF Bahan Baku Obat di Jakarta, perwakilan GP Farmasi serta inspektur CDOB Balai Besar POM di Jakarta. FGD dibuka oleh Kepala Balai Besar POM di Jakarta (Yudi Noviandi, M.Sc.Tech, Apt.) yang menyampaikan bahwa acara ini diselenggarakan untuk menjalin komunikasi dan mendukung kegiatan Pedagang Farmasi Bahan Baku Obat serta sambutan dari Vincent Harijanto selaku Penasehat GP Farmasi Indonesia DKI Jakarta yang menyampaikan bahwa dengan pertemuan ini diharapkan adanya kerjasama yang baik antara pelaku usaha dan BBPOM Jakarta untuk menyelesaikan masalah yang ada terkait isu terkini.

3. Penghargaan Raksa Nugraha Sebagai Bentuk Komitmen Perlindungan

Komitmen BBPOM di Jakarta telah memperoleh predikat WBK pada tahun 2020 dan terus berupaya untuk meningkatkan



implementasi Reformasi Birokrasi untuk memperoleh WBBM pada tahun 2022. Dalam rangka mendukung upaya WBBM, kepuasan dan perlindungan hak pelanggan menjadi fokus penting pelayanan. Untuk mendapatkan potret yang aktual dan berimbang, Badan POM mengikutsertakan BBPOM di Jakarta sebagai salah satu kandidat peserta Raksa Nugraha Indonesian Consumer Protection Award (ICPA) tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BKPN). Dasar penugasan keikutsertaan ini adalah capaian BBPOM di Jakarta dalam meraih Predikat Pelayanan Prima dengan nilai 4.54 pada penilaian Indeks Pelayanan Publik UPT BPOM Tahun 2021.

Setelah melalui rangkaian penjurian yang ketat, pada tanggal 10 November 2021 dilaksanakan Penganugerahan Raksa Nugraha Indonesian Consumer Protection Award (ICPA) dengan hasil BPOM mendapat peringkat tertinggi Platinum, BBPOM di Jakarta bersama 4 (empat) UPT Badan POM berhasil meraih peringkat Gold. Prestasi ini merupakan wujud nyata upaya Badan POM untuk melayani, melindungi dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen yang terdiri dari masyarakat, pelaku usaha dan pemangku kepentingan. Raihan Raksa Nugraha merupakan pendorong motivasi untuk BBPOM di Jakarta agar lebih bersungguh sungguh dalam upaya peningkatan pelayanan prima menuju WBBM.

4. BBPOM di Jakarta Lakukan Rangkaian Kegiatan Pengawalan Kelurahan

Intervensi Tahun 2021
Dalam rangka pengawalan kelurahan yang diintervensi program Desa Pangan Aman Tahun 2020, BBPOM di Jakarta melakukan kegiatan operasional mobil



laboratorium keliling dan KIE Obat dan Makanan terhadap komunitas pelaku usaha pangan yang ada di Kelurahan Kalisari, Kramat Jati, Cipinang Besar Utara, Utan Kayu Utara, dan Pondok Ronggon pada 10-16

November 2021. Rangkaian kegiatan pengawalan yang dilakukan meliputi pengambilan sampel pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya dari komunitas ritel pangan, PKL/warung makan, dan IRTP yang telah dintervensi pada tahun 2020 dan juga pengujian sampel dengan Rapid Test Kit (Formalin, Boraks, Rhodamin B, dan Methanyl Yellow). Berdasarkan hasil kegiatan, masih ditemukan sampel yang mengandung Boraks dan Rhodamin B terutama pada produk kerupuk rambak dan kerupuk pasir yang banyak dijual di ritel pangan. Meskipun demikian, terdapat penurunan jumlah sampel Tidak Memenuhi Syarat jika dibandingkan tahun sebelumnya.

5. Refleksi Satu Tahun Implementasi WBK Untuk Perkuatan dan

Badan POM
berkomitmen untuk
menerapkan Zona
Integritas Reformasi
Birokrasi pada semua
Unit Pusat dan UPT
Badan POM secara
konsisten dan
berkelanjutan. BBPOM
di Jakarta memperoleh



predikat Wilayah Bebas dari Korupsi pada pengajuan pertama di Tahun 2020. Berbagai upaya mewujudkan layanan prima telah dilakukan diantaranya perbaikan infrastruktur kantor BBPOM di Jakarta agar pelanggan merasa lebih aman, nyaman serta dilayani dengan adil dan transparan. Dampak pandemi terhadap layanan publik sangat terasa dengan pembatasan tatap muka secara fisik serta pembatasan akses perjalanan karena lokasi kantor BBPOM di Jakarta berada di Jakarta Timur yang berbatasan dengan wilayah suburban. Oleh karenanya, untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat, BBPOM di Jakarta menginisiasi dua program inovasi layanan publik dengan tujuan menjangkau masyarakat yang tetap ingin menerima layanan secara langsung. Capaian WBK harus ditingkatkan dengan intensifikasi dan penerapan Reformasi Birokrasi yang

berorientasi pada outcome layanan prima kepada masyarakat. Selain itu, terus dilakukan monitoring dan evaluasi agar implementasi Reformasi Birokrasi dapat terus meningkat menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani salah satunya melalui kegiatan Refleksi Satu Tahun Implementasi WBK untuk Perkuatan dan Sinergisme menuju WBBM yang dilaksanakan pada 22 November 2021 bertempat di Sari Pacific Hotel, Jakarta.

6. Penguatan Komitmen Penegakan Zona Integritas Menuju WBBM

BBPOM di Jakarta terus berupaya secara konsisten untuk meningkatkan kompetensi pegawai, salah satunya melalui kegiatan Capacity Building yang dilaksanakan tanggal 25, 26 dan 30



November 2021. Kegiatan ini bertempat di Hotel Bumi Wiyata Depok dengan peserta seluruh pegawai BBPOM di Jakarta yang dibagi menjadi 3 sesi. Kondisi pandemi tidak menyurutkan semangat peserta untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan yang terdiri dari sesi indoor dan outdoor untuk mencegah kemungkinan risiko penularan virus. Narasumber kegiatan difasilitasi oleh PT Trustco yaitu M. Apud Kushaeri dan Rosiman yang memaparkan budaya kerja ASN Ber-AKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif) melalui presentasi dan simulasi.

7. Sinergisme Balai Besar POM di Jakarta dan Lintas Sektor



Bimtek dihadiri peserta dari Balai Besar POM di Jakarta, Dinas / Suku Dinas Kesehatan di 6 (enam) wilayah, Dinas / Suku Dinas PPKUKM di 6 (enam) wilayah, dan Dinas KPKP yang menghadirkan narasumber dari Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan, Direktorat Pengawasan Kosmetik, dan Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan BPOM yang menyampaikan tips dan trik dalam pengawasan Obat dan Makanan.

Diskusi interaktif dan antusias peserta dalam menyampaikan ide strategi pengawasan bersama semakin menambah kemeriahan kegiatan. Tata cara pelaporan hasil pengawasan mandiri terhadap sarana IRTP di wilayah DKI Jakarta menjadi topik utama di pamungkas acara, monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengawasan yang telah disampaikan, hingga penyampaian kendala dari petugas yang ditanggapi dengan usulan solusi dari seluruh narasumber.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
HIGHLIGHT KINERJA	iii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum Organisasi	2
1.3 Struktur Organisasi	4
1.4 Isu Strategis	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	17
2.1 Uraian Singkat Rencana Strategis	17
2.2 Rencana Kinerja Tahunan 2021	33
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2021	35
2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja.....	38
BAB III AKUNTABILITAS	42
3.1 Uraian Singkat Rencana Strategis	43
BAB IV PENUTUP	142
4.1 Kesimpulan	142
2.2 Saran	142

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Analisis lingkungan strategis Balai Besar POM di Jakarta	11
Tabel 2. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja 2020-2024	20
Tabel 3. Rencana Kinerja Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2021	33
Tabel 4. Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2021	35
Tabel 5. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2021	39
Tabel 6. Kriteria pencapaian kinerja	42
Tabel 7. Pencapaian Sasaran Strategis Triwulan IV	43
Tabel 8. Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	49
Tabel 9. Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	53
Tabel 10. Realisasi persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2021	56
Tabel 11. Realisasi persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta tahun 2021	58
Tabel 12. Realisasi Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Jakarta tahun 2021 Realisasi persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	62
Tabel 13. Realisasi Indeks kepuasan masyarakat terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan BPOM di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021	65
Tabel 14. Realisasi Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021	67
Tabel 15. Realisasi Indeks kepuasan terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021 Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta.....	69
Tabel 16. Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021	72

Tabel 17. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	76
Tabel 18. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu tahun 2021	79
Tabel 19. Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021	87
Tabel 20. Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan	89
Tabel 21. Realisasi Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan tahun 2021	92
Tabel 22. Realisasi Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan tahun 2021	94
Tabel 23. Realisasi indeks pelayanan publik di lingkup BBPOM di Jakarta tahun 2021	97
Tabel 24. Realisasi Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan yang efektif di di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2021	100
Tabel 25. Realisasi Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2021	102
Tabel 26. Realisasi Jumlah desa pangan aman Tahun 2021	105
Tabel 27. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2021	109
Tabel 28. Realisasi persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2021	113
Tabel 29. Realisasi Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Tahun 2021 Realisasi Jumlah desa pangan aman Tahun 2021	115
Tabel 30. Realisasi Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan tahun 2021.....	118
Tabel 31. Realisasi Indeks RB BB/BPOM tahun 2021 Realisasi Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuj	122

Tabel 32. Realisasi Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021.....	124
Tabel 33. Kategori Penilaian SAKIP.....	125
Tabel 34. Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021	127
Tabel 35. Realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi Balai besar POM di Jakarta yang optimal tahun 2021	129
Tabel 36. Nilai kinerja anggaran BBPOM di Jakarta tahun 2021	131
Tabel 37. Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis Triwulan IV tahun 2021	135
Tabel 38. Tingkat Efisiensi Kegiatan Triwulan IV tahun 2021	138
Tabel 39. Efisiensi kegiatan Per Sasaran Strategis Balai Besar POM di Jakarta	140

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Besar POM di Jakarta	4
Gambar 2. Data Pegawai Balai Besar POM di Jakarta Berdasarkan Tingkat Pendidikan per 31 Maret 2021.....	8
Gambar 3. Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jakarta.....	9
Gambar 4. Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi yang Diawasi Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2021	10
Gambar 5. Peta Strategi BSC Level II Balai Besar POM di Jakarta	19
Gambar 6. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Balai Besar POM di Jakarta.....	23
Gambar 7. Grafik Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2018-2021	61
Gambar 8. Grafik Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	64
Gambar 9. Perbandingan realisasi dan capaian Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021 dengan tahun 2020.....	69
Gambar 10. Perbandingan Persentase Keputusan atau Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta antara Tahun 2019 dan 2021.....	74
Gambar 11. Perbandingan Persentase Keputusan atau rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta antara Tahun 2020 dan 2021	78
Gambar 12. Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu Di Provinsi DKI Jakarta tahun 2020-2021	82
Gambar 13. Perbandingan persentase realisasi dan capaian sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	89
Gambar 14. Perbandingan realisasi dan capaian persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	93

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Ikhtisar Rencana Strategis Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2020-2024	143
Lampiran 2. Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengujian Laboratorium Triwulan IV Tahun 2021	147
Lampiran 3. Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Iklan dan Label/Penandaan Triwulan IV Tahun 2021	161
Lampiran 4. Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan Layanan Informasi Triwulan IV Tahun 2021.....	169

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Balai Besar POM di Jakarta sebagai UPT Badan POM melaksanakan kegiatan utama berdasarkan bisnis proses yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis periode 2020-2024 yaitu melaksanakan program pengawasan Obat dan Makanan (*post-market*) di seluruh wilayah administratif Provinsi DKI Jakarta meliputi pengawasan sarana produksi, sarana distribusi sesuai standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, *sampling* dan pengujian laboratorium terhadap produk Obat dan Makanan serta penyidikan dan penegakan hukum.

Balai Besar POM di Jakarta sebagai UPT Badan POM, mempunyai 4 (empat) inti kegiatan atau pilar lembaga, yaitu:

1. Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (*pre-market*) terlibat dalam registrasi/penilaian, inspeksi sarana produksi dalam rangka sertifikasi;
2. Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (*post-market*) mencakup: *sampling* dan pengujian, inspeksi sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di Provinsi DKI Jakarta;
3. Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan;
4. Penegakan hukum melalui fungsi pengamanan, intelijen dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

1.2. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPOM Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM, Balai Besar POM di Jakarta sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Balai Besar POM di Jakarta menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. **Tugas Pokok Balai Besar POM di Jakarta**

Melaksanakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. **Fungsi Balai Besar POM di Jakarta**

- a. penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan pengambilan contoh (*sampling*) Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan pada wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta;
- g. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan/atau penyidikan pada wilayah kerja masing-masing;
- h. pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang

pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta;

- i. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan
- l. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

1.3. Struktur Organisasi

Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Besar POM di Jakarta



Tugas pokok dan fungsi Balai Besar POM di Jakarta dijabarkan sebagai berikut:

- a. **Kelompok Substansi Pengujian** mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di kelompok substansi pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan. Kelompok Substansi Pengujian menyelenggarakan fungsi:
 1. Penyusunan rencana dan program di Kelompok Substansi Pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan;
 2. Pelaksanaan pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan; dan

3. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di Kelompok Substansi Pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan.

Kelompok Substansi Pengujian terdiri atas:

1. Subkelompok Substansi Pengujian Kimia;
2. Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subkelompok Substansi Pengujian Kimia mempunyai tugas melakukan pengujian kimia Obat dan Makanan. Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi mempunyai tugas melakukan pengujian mikrobiologi Obat dan Makanan.

- b. **Kelompok Substansi Pemeriksaan** mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di subkelompok substansi inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian serta sertifikasi dan pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan. Substansi Pemeriksaan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program di Substansi inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
3. Pelaksanaan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi dan produk Obat dan Makanan;
4. Pelaksanaan pengambilan contoh (*sampling*) Obat dan Makanan; dan
5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan

kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan.

Substansi Pemeriksaan terdiri atas:

1. Subkelompok Substansi Inspeksi;
2. Subkelompok Substansi Sertifikasi; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subkelompok Substansi Inspeksi mempunyai tugas melakukan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan. Subkelompok Substansi Sertifikasi mempunyai tugas melakukan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi dan produk Obat dan Makanan.

c. **Substansi Penindakan** mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Dalam melaksanakan tugas, Substansi Penindakan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan
3. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

d. **Substansi Informasi dan Komunikasi** mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat serta

penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Bidang Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
3. Penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan
4. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

e. **Bagian Tata Usaha** mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan serta kerumahtanggaan. Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
2. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
3. Pengelolaan persuratan dan kearsipan;
4. Pengelolaan penjaminan mutu dan tata laksana;
5. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
6. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
7. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan; dan
8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

1. Subkelompok Substansi Program dan Evaluasi;
2. Subkelompok Substansi Umum; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subkelompok Substansi Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, anggaran, pengelolaan

keuangan, penjaminan mutu, tata laksana, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja. *Subkelompok Substansi Umum* mempunyai tugas melakukan pengelolaan persuratan, kearsipan, kepegawaian, teknologi informasi komunikasi, perlengkapan, dan kerumahtanggaan.

1.4. Isu Strategis

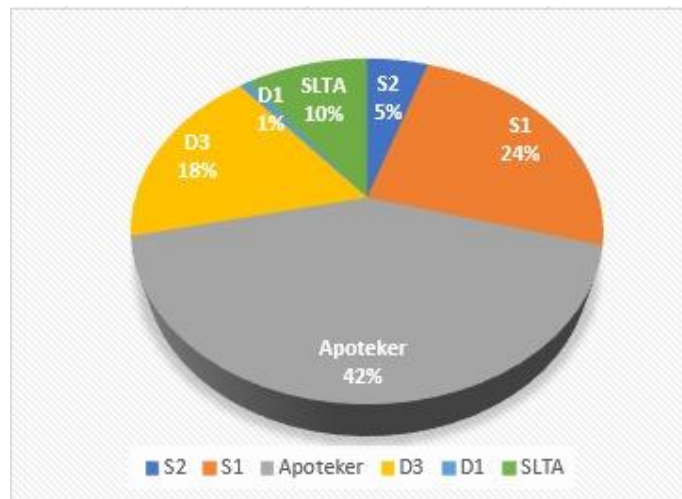
1.4.1 Aspek Strategis Organisasi

Berikut adalah aspek strategis Balai Besar POM di Jakarta dalam mendukung pembangunan pemerintah atau kinerja instansi atau satuan kerja lainnya dan mendukung pembangunan di wilayah Provinsi DKI Jakarta:

a. Lingkungan Internal

1. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Balai Besar POM di Jakarta sebanyak 119 orang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan pada lingkup tugasnya. Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2. Data Pegawai Balai Besar POM di Jakarta Berdasarkan Tingkat Pendidikan per Oktober 2021

2. Sumber Daya Lainnya

Kantor Balai Besar POM di Jakarta hanya memiliki 1 (satu) bangunan gedung dengan total luas tanah 2.750,00 m² dan luas bangunan 2.404,00 m², didukung laboratorium dan peralatan yang memadai sesuai standar Laboratorium Badan POM dan metode analisis terkini. Balai Besar POM di Jakarta memiliki laboratorium pengujian kimia dan laboratorium pengujian mikrobiologi yang terakreditasi ISO/IEC 17025:2017.

Selain itu, Balai Besar POM di Jakarta dalam mewujudkan visi, misi dan tujuannya telah menerapkan sistem manajemen mutu berdasarkan standar ISO 9001:2015 dan telah tersertifikasi untuk seluruh bisnis prosesnya.

3. Keunggulan Balai Besar POM di Jakarta

Program laboratorium keliling yang telah terakreditasi ISO/IEC 17025:2017 sejak tahun 2017.

4. Anggaran

Anggaran Balai Besar POM di Jakarta bersumber dari APBN sesuai DIPA tahun 2021 No. SP DIPA-063.01.2.432747/ sebesar Rp 41.616.698.000,- (Empat puluh satu milyar enam ratus enam belas juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

b. Lingkungan Eksternal

1. Kondisi Geografis dan Demografis

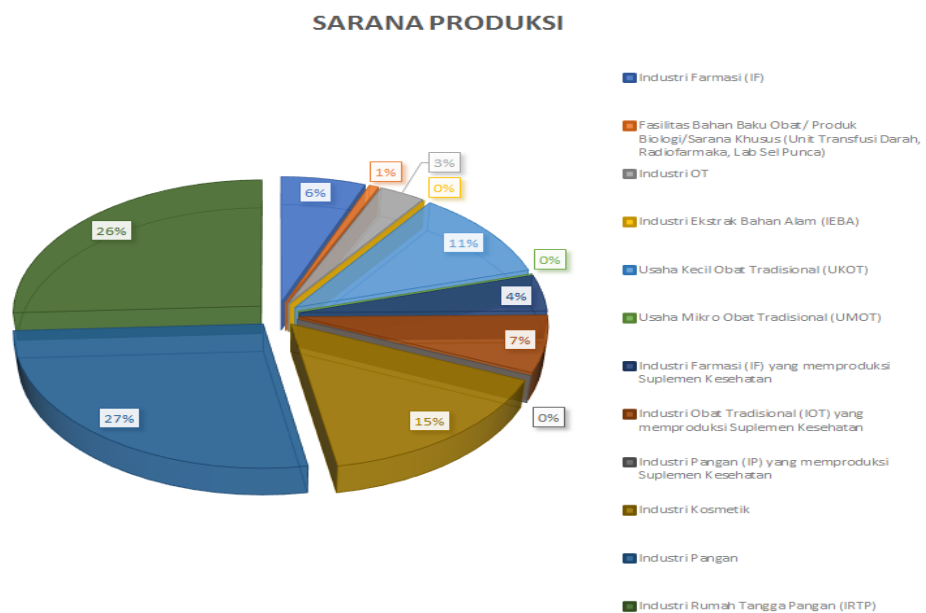
Provinsi DKI Jakarta terletak pada 6012' Lintang Selatan dan 106048' Lintang Selatan. Wilayah Provinsi DKI Jakarta seluas 662,33 km². Cakupan wilayah kerja Provinsi DKI Jakarta terdiri dari 6 Kabupaten/Kota terdiri dari 1 Kabupaten dan 5 Kota dengan jumlah penduduk 10,6 juta jiwa.



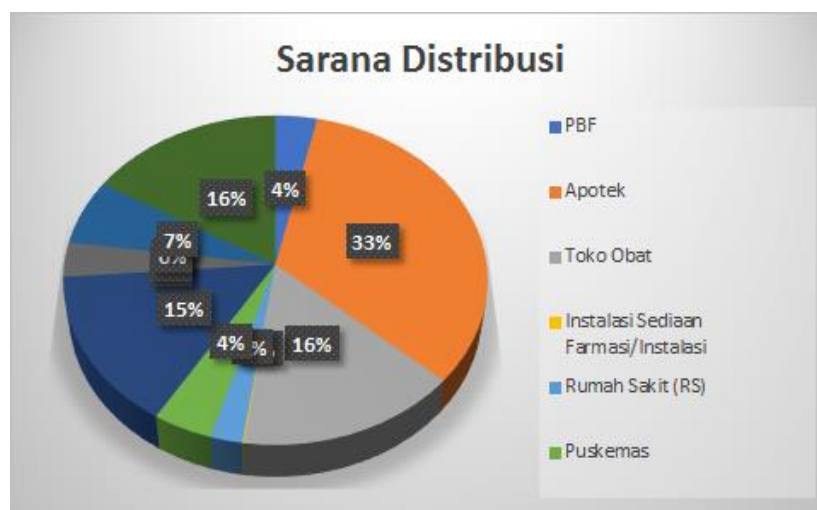
Gambar 3. Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jakarta

2. Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi yang Diawasi

Sarana produksi produk Obat dan Makanan yang diawasi di wilayah Provinsi DKI Jakarta meliputi industri farmasi, Fasilitas Bahan Baku Obat/ Produk Biologi/Sarana Khusus (Unit Transfusi Darah, Radiofarmaka, Lab Sel Punca), industri obat tradisional, industri kecil obat tradisional, Industri Obat Tradisional (IOT), Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Industri Farmasi (IF) yang memproduksi Suplemen Kesehatan, Industri Farmasi (IF) yang memproduksi Suplemen



Kesehatan, Industri Obat Tradisional (IOT) yang memproduksi Suplemen Kesehatan, Industri Pangan (IP) yang memproduksi Suplemen Kesehatan, industri kosmetik, industri pangan serta industri rumah tangga pangan. Sedangkan sarana distribusi meliputi Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Toko Obat, Instalasi Sediaan Farmasi/Instalasi, Rumah Sakit (RS), Puskesmas, Klinik, Lain-lain (Praktek Dokter dan Bidan), Fasilitas Distribusi Obat Tradisional, Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan, Fasilitas Distribusi Kosmetik, Fasilitas Distribusi Pangan Olahan. Jumlah sarana produksi dan distribusi yang diawasi di wilayah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana pada **Gambar 4** di bawah ini.



Gambar 4. Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi yang Diawasi Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2021

Hasil analisis lingkungan strategis baik eksternal maupun internal dirangkum dalam tabel 1 berikut:

Tabel 1. Analisis lingkungan strategis Balai Besar POM di Jakarta

KEKUATAN	KELEMAHAN
<ul style="list-style-type: none"> - Dasar hukum yang jelas terkait tugas, fungsi dan kewenangan dalam pengawasan obat dan makanan 	<ul style="list-style-type: none"> - Lokasi kantor BBPOM di Jakarta tidak strategis - Integrasi beberapa sistem mutu belum efisien - Masih memerlukan waktu yang

<ul style="list-style-type: none"> - Komitmen pimpinan dan seluruh ASN Balai Besar POM di Jakarta menerapkan RB - Sistem pengawasan yang komprehensif mencakup <i>premarket</i> dan <i>postmarket</i> - Kompetensi ASN Balai Besar POM di Jakarta yang memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas - Pengembangan TIK dalam meningkatkan pelayanan pengawasan obat dan makanan - <i>Mobile lab</i> dan mini laboratorium - Integritas pelayanan publik - Fasilitas laboratorium yang memadai - Penyebaran informasi melalui saluran komunikasi di media <i>online</i>, cetak dan media sosial - Melakukan pembinaan dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan dan peningkatan jaminan kemudahan berusaha - Kerjasama dengan aparat penegak hukum dalam penindakan dan penegakan hukum, - Ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur pendukung yang memadai - <i>Networking</i> yang kuat dengan lembaga- lembaga pusat/daerah - Laboratorium telah terakreditasi ISO 17025 : 2017 - Balai Besar POM di Jakarta telah mendapat sertifikat QMS ISO 9001:2015 	<p>lama dalam Tindak Lanjut Pengawasan dan Pengujian</p> <ul style="list-style-type: none"> - ASN masih memerlukan peningkatan kompetensi tertentu - Sarana prasarana belum optimal - Penggunaan sistem TIK dalam melakukan pelayanan dan pengawasan obat dan makanan masih belum optimal - Kelembagaan Pusat dan Balai belum sinergi - Undang-undang pengawasan obat dan makanan masih bersifat umum - Adanya tumpang tindih kewenangan dengan Kemenkes
PELUANG	TANTANGAN
<ul style="list-style-type: none"> - Ekspektasi masyarakat yang tinggi terkait peran dalam pengawasan obat dan makanan - Kesadaran masyarakat terhadap kesehatan semakin meningkat 	<ul style="list-style-type: none"> - Semakin maraknya penjualan obat dan makanan <i>online</i> - Besarnya pangsa pasar obat tradisional - Adanya penggunaan obat bahan alam di fasilitas pelayanan kesehatan

<ul style="list-style-type: none"> - Pertumbuhan konsumsi obat dan makanan masyarakat - Perkembangan <i>e-commerce</i> ke depan cukup besar - Perkembangan teknologi informasi yang memungkinkan masyarakat dalam mengakses berbagai informasi iklan produk obat, suplemen, kosmetik dan makanan - Jenis produk obat dan makanan sangat bervariasi - Perkembangan industri obat dan makanan yang terus mengalami peningkatan - Jakarta sebagai ibukota negara Republik Indonesia - Perkembangan Teknologi Informasi untuk pelayanan secara <i>online</i> - Dukungan Pemda dalam bentuk MoU, Perjanjian Kerjasama dan INGUB terkait pengawasan dan pembinaan obat dan makanan - Otonomi daerah di provinsi DKI Jakarta yang tersentralisasi di pemerintah Provinsi - Adanya gerakan reformasi birokrasi dan pengembangan pelayanan publik - Perkembangan iklan yang begitu ceat dan kompetitif termasuk iklan produk obat tradisional dan suplemen kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Masih banyaknya jumlah pelanggaran di bidang obat dan makanan - Lemahnya penegakan hukum sehingga tidak ada efek jera - Kurangnya dukungan dan kerjasama dari pemangku kepentingan di daerah - Rendahnya pengetahuan dan kemampuan teknis UMKM obat tradisional - Peningkatan penggunaan produk-produk <i>lifestyle</i> - Adanya bonus demografi pada periode 2020-2024 - Peningkatan daya saing pelaku usaha - Peningkatan jumlah sarana Produksi dan distribusi obat dan makanan - Modus pelanggaran semakin kompleks - Meningkatnya penyebaran informasi <i>hoax</i> terkait obat dan makanan - Adanya program Nasional (JKN dan SKN) - Implementasi program fortifikasi pangan
--	---

1.4.2. Permasalahan Utama

Beberapa permasalahan utama yang merupakan isu strategis yang dapat berpengaruh pada kinerja Balai Besar POM di Jakarta antara lain:

1. **Generasi *Stunting* Mengancam Masa Depan Bangsa**

Stunting merupakan manifestasi dari malnutrisi atau gizi buruk sebagai akibat dari kebutuhan pangan yang tidak tercukupi pada anak-anak. *Stunting* ditandai dengan gangguan pertumbuhan anak

sehingga memiliki tinggi badan lebih rendah dari standar usianya. Kondisi ini dapat berdampak pada pertumbuhan fisik yang tidak optimal dan juga berisiko menimbulkan gangguan kesehatan dan perkembangan kecerdasan anak-anak yang akan menjadi generasi penerus bangsa. Karena itu, saat ini keamanan pangan dan akses pangan yang bernutrisi dan berkualitas menjadi prioritas dari *World Health Organization (WHO)* dan menjadi fokus tema dari Hari Pangan Sedunia Tahun 2018, yaitu *Our Actions are Our Future, a Zero Hunger World by 2030 is possible*.

BPOM mempunyai peran strategis dalam upaya percepatan penurunan stunting melalui program keamanan pangan melalui pengawasan fortifikasi pangan, intervensi keamanan pangan di desa (desa pangan aman), Gerakan Masyarakat Sadar Pangan Aman/Germas SAPA, dan Pangan Jajanan Anak Sekolah / PJAS dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Balai Besar POM di Jakarta melakukan pengawasan *post-market* dengan cara pengambilan sampel dan pengujian laboratorium produk obat dan makanan yang beredar, inspeksi cara produksi dan distribusi dalam rangka pengawasan implementasi Cara Produksi dan Cara Distribusi yang baik, pengawasan iklan dan penandaan, serta investigasi awal dan penyidikan berbagai kasus tindak pidana bidang obat dan makanan yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat.

2. Tren Penjualan Produk Obat dan Makanan Secara Online

Era perkembangan teknologi yang semakin pesat dewasa ini membuat persaingan bisnis dalam bidang apapun menjadi lebih variatif. Banyak metode bisnis yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk menarik pelanggan sebanyak-banyaknya antara lain pemanfaatan media elektronik (internet). Hal ini juga menjadi peluang untuk penjualan produk-produk obat, suplemen makanan, obat tradisional, kosmetika dan makanan ilegal (tidak memiliki ijin edar, kadaluwarsa). Untuk itu, penertiban peredaran produk ilegal yang dipasarkan secara *online* menjadi salah satu fokus pengawasan BPOM. Dalam rangka penegakan hukum dan pencegahan peredaran produk ilegal, Balai Besar POM di Jakarta

melakukan *sampling* produk Obat dan Makanan yang dijual secara *online* berdasarkan analisis risiko. Hal ini merupakan implementasi dari upaya perlindungan masyarakat dari peredaran Obat dan Makanan yang tidak aman.

3. Pengawasan Obat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Mengantisipasi dampak yang dapat merugikan masyarakat dari penerapan JKN, Balai Besar POM di Jakarta meningkatkan peran dalam memberikan jaminan obat yang aman, bermutu dan bermanfaat. Selanjutnya untuk mengantisipasi adanya penggunaan obat palsu dan pendistribusian obat dari jalur ilegal, dilakukan pengawasan/inspeksi sarana produksi terhadap pemenuhan cara produksi obat yang baik, pengawasan sarana distribusi sediaan farmasi, melakukan *sampling* dan pengujian laboratorium obat-obat publik di sarana instalasi farmasi/gudang farmasi Kabupaten/Kota Administratif, puskesmas, rumah sakit dan sarana pelayanan kesehatan lainnya.

4. Hoaks terkait Obat dan Makanan

Tingginya pengguna sosial media di Indonesia menjadi salah satu faktor penyebab maraknya penyebaran hoaks terkait obat dan makanan. Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap kebenaran informasi obat dan makanan, Balai Besar POM di Jakarta berperan aktif dalam kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) antara lain melalui HaloBPOM, media sosial, kegiatan di sekolah dari jenjang SD hingga SMA, *Car Free Day*, *talkshow*, dan pameran. Sosialisasi juga dilakukan melalui kampanye pemanfaatan aplikasi CekBPOM, BPOM *Mobile*, dan penyebaran informasi melalui *website* BPOM.

5. Reformasi Birokrasi

Tujuan reformasi birokrasi adalah menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Balai Besar POM di Jakarta sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM terus berupaya menerapkan nilai-

nilai Reformasi Birokrasi untuk memperoleh predikat WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani)

6. Implementasi Inpres 3 tahun 2017

Dengan diterbitkannya Instruksi Presiden No. 3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, diharapkan dapat memperkuat kinerja BPOM dalam pengawasan Obat dan Makanan melalui peningkatan sinergisme kemitraan dengan Kementerian maupun lintas sektor terkait di daerah. Perlu adanya landasan hukum yang kuat dalam koordinasi pelaksanaan di daerah, untuk itu peraturan Gubernur yang mengatur mekanisme koordinasi, pembinaan, pengawasan dan tindak lanjut perlu disiapkan. Tindak lanjut oleh instansi terkait atas rekomendasi yang dikeluarkan oleh Balai Besar POM di Jakarta sangat berpengaruh terhadap peredaran Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan.

7. Pandemi COVID-19

COVID-19 (*Corona Virus Disease 2019*) ditetapkan sebagai pandemi oleh WHO (*World Health Organization*) pada 11 Maret 2020. Kasus pasien COVID-19 di Indonesia meningkat signifikan sejak diumumkan pada tanggal 2 Maret 2020. Oleh karena itu, untuk mencegah penyebaran infeksi COVID-19 telah dikeluarkan strategi dan kebijakan oleh pemerintah antara lain pembatasan interaksi dan mewajibkan untuk bekerja dari rumah (*work from home/WFH*). Kondisi ini mempengaruhi semua kegiatan yang merupakan tugas pokok Balai Besar POM di Jakarta. Dari semula semua kegiatan berbasis interaksi langsung menjadi interaksi jarak jauh. Penyelenggaraan layanan dilakukan untuk menjamin keamanan dalam kondisi darurat dalam rangka tetap melaksanakan fungsi pengawasan obat dan makanan di Provinsi DKI Jakarta.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Uraian Singkat Rencana Strategis

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka Balai Besar POM di Jakarta sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan.

Balai Besar POM di Jakarta sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan pengawasan Obat dan Makanan, Balai Besar POM di Jakarta menetapkan visi, misi dan tujuan serta sasaran.

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka segenap jajaran Badan POM termasuk Balai Besar POM di Jakarta bercita-cita mewujudkan Visi BPOM 2020-2024 yaitu: “Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, telah ditetapkan Misi Balai Besar POM di Jakarta mengacu pada Misi BPOM sebagai berikut:

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa, dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa;
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah

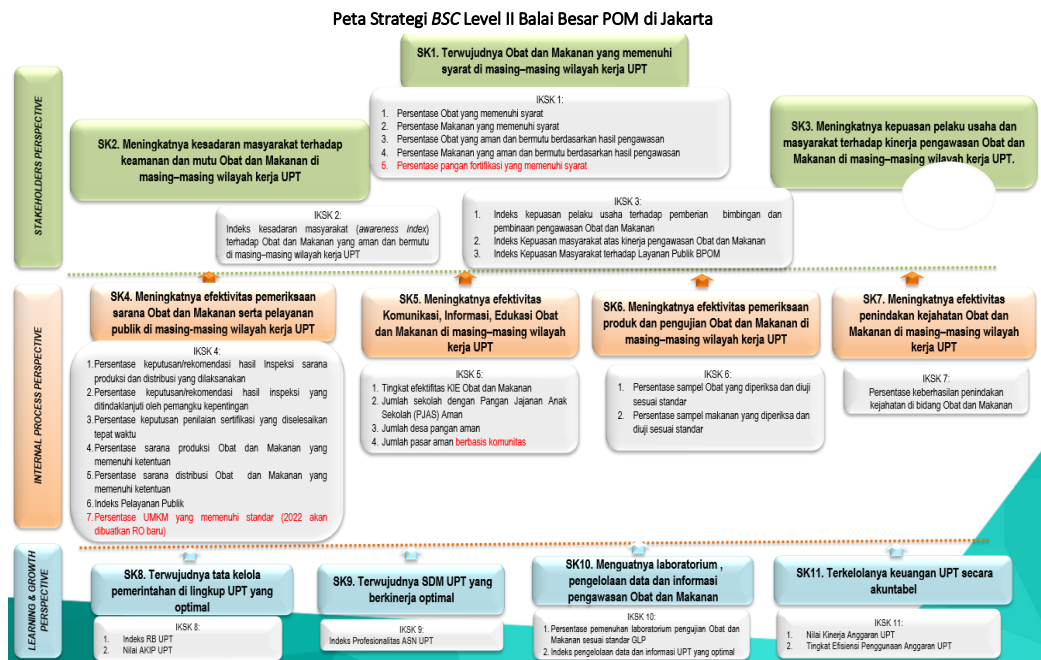
pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga; dan

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan;
2. Meningkatnya kapasitas SDM Balai Besar POM di Jakarta dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan;
3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM;
4. Mekuatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu;
5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan;
6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan; dan
7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Berdasarkan pertimbangan dari 4 (empat) perspektif dalam pendekatan *Balance Scorecard* (BSC) meliputi *Learning & Growth*, *Internal Process*, *Customer* dan *Stakeholders* maka sasaran strategis dalam periode waktu 2020-2024 dapat dilihat pada peta strategi level II Balai Besar POM di Jakarta, sebagai berikut:

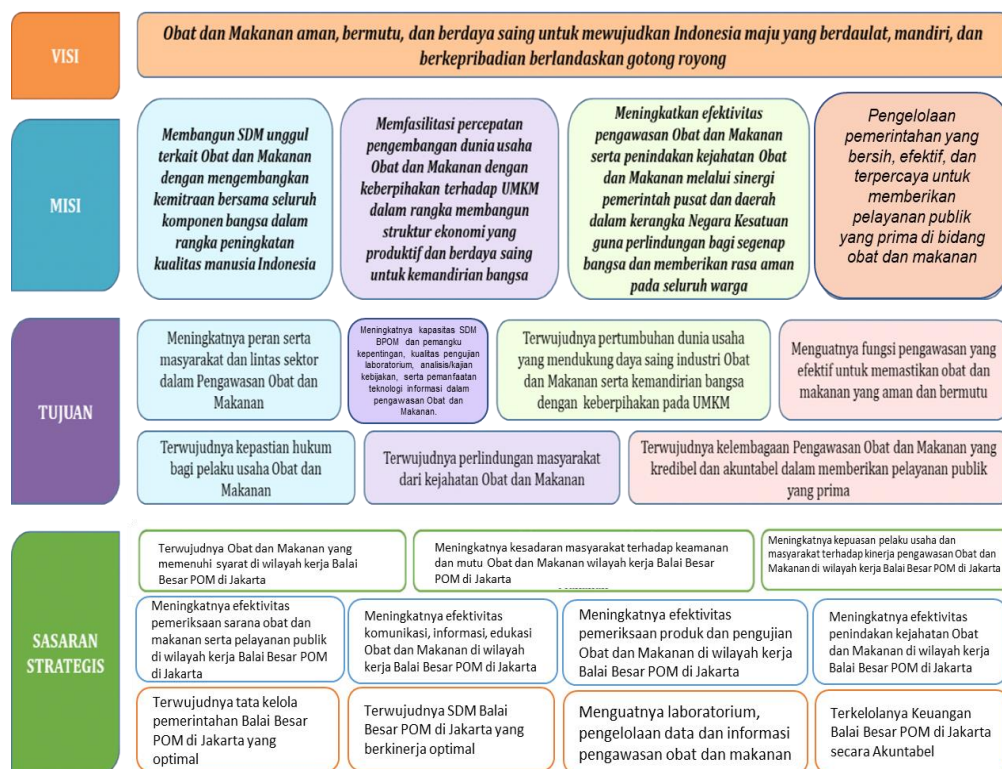


Gambar 5. Peta Strategi BSC Level II Balai Besar POM di Jakarta

Sasaran strategis Balai Besar POM di Jakarta ini disusun berdasarkan sasaran strategis pada peta strategi level 0 Kepala BPOM yang menggambarkan visi dan misi yang ingin dicapai BPOM dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki BPOM. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2020-2024) ke depan diharapkan Balai Besar POM di Jakarta akan dapat mencapai sasaran strategis di Wilayah Provinsi DKI Jakarta sehingga dapat mendukung tercapainya sasaran strategis BPOM secara Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2021 menetapkan 11 (sebelas) sasaran strategis dengan 28 (dua puluh delapan) indikator yang dilengkapi dengan target kinerja. Perubahan sasaran strategis, indikator dan target kinerja Balai Besar POM di Jakarta tergambar dalam tabel 2 berikut.

Balai Besar POM di Jakarta melaksanakan review renstra terhadap target capaian indikator kinerja. Hal ini membuktikan bahwa perencanaan bersifat dinamis dan ditingkatkan kualitasnya secara berkesinambungan. Finalisasi review renstra diharapkan pada akhir tahun anggaran 2021 dan dapat digunakan sebagai target akhir pengukuran kinerja tahunan

Dengan memperhatikan prioritas pembangunan RPJMN 2020-2024, maka kedudukan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis (versi renja) dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 6. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Balai Besar POM di Jakarta

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (periode 2020-2024) diharapkan Balai Besar POM di Jakarta mampu mencapai sasaran strategis secara efektif dan efisien sehingga memberikan kontribusi positif dalam dimensi pembangunan manusia seiring dengan proses revolusi mental sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia serta mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, dengan penjabaran masing-masing Sasaran Strategis sebagai berikut:

Perspektif Pemangku Kepentingan (Stakeholder Perspective):

a. Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

Komoditas/produk yang diawasi BPOM tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada

produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan BPOM merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari:

Pertama, standardisasi yang merupakan fungsi penyusunan standar, regulasi, dan kebijakan terkait pengawasan Obat dan Makanan. Standardisasi dilakukan terpusat, dimaksudkan untuk menghindari perbedaan standar yang mungkin terjadi akibat setiap provinsi membuat standar tersendiri.

Kedua, penilaian (*pre-market evaluation*) merupakan evaluasi produk sebelum memperoleh nomor izin edar dan akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen. Penilaian dilakukan terpusat, dimaksudkan agar produk yang memiliki izin edar berlaku secara nasional.

Ketiga, pengawasan setelah beredar (*post-market control*) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan *sampling* produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilans, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan *post-market* dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar. Pengawasan ini melibatkan Unit Pelaksana Teknis BPOM yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia termasuk Balai Besar POM di Jakarta.

Keempat, pengujian laboratorium. Produk yang *disampling* berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat.

Kelima, penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan *pro justicia* dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan *full spectrum* di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan *pre-market* dan *post-market* yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Keberhasilan sasaran strategis ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

- (1) Persentase Obat yang memenuhi syarat hingga akhir tahun 2021 ditargetkan sebesar 80%**
- (2) Persentase Makanan yang memenuhi syarat hingga akhir tahun 2021 ditargetkan sebesar 95%**
- (3) Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan hingga akhir tahun 2021 ditargetkan sebesar 80%**
- (4) Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan hingga akhir tahun 2021 ditargetkan sebesar 81%**
- (5) Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat ditargetkan sebesar 88%**

b. Sasaran Strategis 2: Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk Obat dan Makanan pada dasarnya merupakan kewajiban dari pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai regulator dalam rangka perlindungan masyarakat.

Pengawasan oleh pelaku usaha sebaiknya dilakukan dari hulu ke hilir, dimulai dari pemeriksaan bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga produk tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Pelaku usaha mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat (aman, berhasiat/bermanfaat, dan bermutu) dimulai dari proses produksi yang sesuai dengan ketentuan. Asumsinya, pelaku usaha memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk memelihara sistem manajemen risiko secara mandiri. Dari sisi pemerintah, BPOM bertugas menyusun kebijakan dan regulasi terkait Obat dan Makanan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dan mendorong penerapan *Risk Management Program* oleh industri. Peningkatan kapasitas dan komitmen pelaku usaha diasumsikan akan berkontribusi pada peningkatan daya saing Obat dan Makanan.

Selain itu, dalam sub sistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan Balai Besar POM di Jakarta melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE). Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU):

Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta, dengan target 85 pada akhir tahun 2021.

c. Sasaran Strategis Ke-3: *Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta*

Sebagai salah satu lembaga pemerintah non kementerian, Balai Besar POM di Jakarta berupaya memberikan layanan publik secara optimal. Bentuk layanan publik BPOM, mencakup berbagai hal yang terkait dengan fungsi

pengawasan dalam rangka perlindungan masyarakat, di sisi lain layanan publik Balai Besar POM di Jakarta bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha dan perekonomian nasional. Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini maka indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan adalah:

- (1) Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan dengan target sebesar 86.6 di tahun 2021;**
- (2) Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan dengan target sebesar 74.98 di tahun 2021; dan**
- (3) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM dengan target sebesar 90 di tahun 2021.**

Perspektif Proses Internal (Internal Process Perspective):

a. Sasaran Strategis 4: *Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta*

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (*full spectrum*) mencakup standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, *sampling* dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan Balai Besar POM di Jakarta mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban Balai Besar POM di Jakarta, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, dengan indikator:

- (1) Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, dengan target 89% pada akhir tahun 2021;**
- (2) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, dengan target 75% pada akhir tahun 2021;**
- (3) Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, dengan target 85% pada akhir tahun 2021;**

- (4) Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, dengan target 60% pada akhir tahun 2021;**
- (5) Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, dengan target 73% pada akhir tahun 2021; dan**
- (6) Indeks pelayanan publik, dengan target 4,20 pada akhir tahun 2021.**

b. Sasaran Strategis 5: *Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta*

Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi, informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya yaitu:

- (1) Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan dengan target 93 pada akhir tahun 2021;**
- (2) Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman dengan target 40 pada akhir tahun 2021;**
- (3) Jumlah desa pangan aman dengan target 14 pada akhir tahun 2021; dan**
- (4) Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya dengan target 2 pada akhir tahun 2021**

c. Sasaran Strategis 6: *Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta*

Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Jakarta akan meningkat efektivitasnya apabila Balai Besar POM di

Jakarta mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. Balai Besar POM di Jakarta perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, dengan indikator:

- (1) Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar, dengan target 100% pada akhir tahun 2021; dan**
- (2) Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar, dengan target 100% pada akhir tahun 2021.**

d. Sasaran Strategis 7: *Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta*

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar.

Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan Balai Besar POM di Jakarta menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menyasar ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh Balai Besar POM di Jakarta melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya yaitu

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dengan target 54% pada akhir 2021.

Perspektif Pembelajaran (Learning and Growth Perspective):

a. Sasaran Strategis Ke-8: *Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Jakarta yang optimal*

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024, BPOM berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik BPOM akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, untuk menginstitusionalisasi keterbukaan informasi publik, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di BPOM.

Pada tahun 2020-2024, BPOM berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian RB, Opini BPK, dan SAKIP. Selain upaya internal, peningkatan hasil penilaian suprasistem akan terwujud dengan adanya dukungan eksternal antara lain (i) dukungan kebijakan pemenuhan target kuantitas dan kualitas SDM di BPOM agar beban kerja lebih realistis, (ii) penguatan organisasi, dan (iii) dukungan anggaran.

Sumber daya, yang meliputi 5 M (*man, material, money, method, and machine*) merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan Balai Besar POM di Jakarta untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.

Untuk melaksanakan tugas Balai Besar POM di Jakarta, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Jakarta. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya adalah:

- (1) Indeks Reformasi Birokrasi Balai Besar POM di Jakarta, dengan target 82.4 pada akhir tahun 2021; dan**
- (2) Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta, dengan target 79.1 pada akhir tahun 2021.**

b. Sasaran Strategis 9: *Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jakarta yang berkinerja optimal*

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan Balai Besar POM di Jakarta.

Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian.

Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah:

- Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta dengan target sebesar 84.25 di tahun 2021.**

c. **Sasaran Strategis Ke-10: Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan**

Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Obat dan Makanan adalah sistem operasional serta teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. Kecenderungan yang saat ini terjadi adalah pergeseran bisnis proses dari manual bergerak ke arah digital dan *online*.

Demikian halnya dengan pengawasan obat dan makanan pada saat ini sudah seharusnya mampu beradaptasi dalam mengantisipasi permasalahan dan tantangan pengawasan di era *internet of things*.

Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan *database* merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas BPOM di era digital ini. Balai Besar POM di Jakarta telah mengembangkan berbagai sistem informasi, tetapi belum terintegrasi dengan baik dan *database*-nya belum di-*update* secara memadai.

Untuk itu maka perlu adanya fokus dalam sasaran yang terkait dengan pengelolaan sistem operasional dan TIK Balai Besar POM di Jakarta. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah:

- (1) **Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP dengan target 77% pada 2021; dan**
- (2) **Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jakarta yang optimal dengan target 2 pada tahun 2021.**

d. **Sasaran Strategis 11: Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jakarta secara Akuntabel**

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam *Learning and Growth Perspective* yang menggambarkan kemampuan Balai Besar POM di Jakarta dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat adalah sasaran strategis ke-11, dengan ukuran keberhasilannya adalah:

(1) Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jakarta dengan target 91.9 sebesar pada tahun 2021; dan

(2) Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Jakarta dengan target Efisien (95%) pada tahun 2021.

2.2. Rencana Kinerja Tahunan 2021

Perencanaan kinerja tahunan Balai Besar POM di Jakarta terdapat dalam Dokumen Rencana Strategis Balai Besar POM di Jakarta tahun 2020-2024 yang ditetapkan dalam SK Kepala Balai Besar POM di Jakarta pada tahun 2021.

Tabel 2. Rencana Kinerja Tahunan Balai Besar POM di Jakarta TA 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	01-Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	01-Persentase Obat yang memenuhi syarat	80
		02-Persentase Makanan yang memenuhi syarat	95
		03-Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80
		04-Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	81
		05-Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	88
2.	02-Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	06-Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	85
3.	03-Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	07-Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	86.6
		08-Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	74.98
		09-Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	90
4.	04-Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	10-Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
	di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	11-Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	75
		12-Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85
		13-Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60
		14-Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	73
		15-Indeks Pelayanan Publik di Lingkup BBPOM di Jakarta	4,20
5.	05-Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	16-Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	93
		17-Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	40
		18-Jumlah desa pangan aman	14
		19-Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	2
6.	06-Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	20-Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		21-Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
7.	07-Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	22-Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	54
8.	08-Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	23-Indeks RB Balai Besar POM di Jakarta	82.4
		24-Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta	79.1
9.	09-Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jakarta yang berkinerja optimal	25-Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta	84.25
10.	10-Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	26-Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	77
		27-Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	2
11.		28-Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jakarta	91.9

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
	11-Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jakarta secara Akuntabel	29-Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Jakarta	Efisien (95%)

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Balai Besar POM di Jakarta menandatangani Perjanjian Kinerja untuk mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis 2020-2024 dan DIPA Balai Besar POM di Jakarta Tahun Anggaran 2021 dengan jumlah anggaran sebesar Rp 41.616.698.000,- (empat puluh satu milyar enam ratus enam belas juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah). Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis yang seharusnya terwujud pada tahun 2021 dengan indikator kinerja yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan serta target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Balai Besar POM di Jakarta, sebagai berikut:

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Jakarta TA 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
12.	01-Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	01-Persentase Obat yang memenuhi syarat	80
		02-Persentase Makanan yang memenuhi syarat	95
		03-Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80
		04-Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	81
		05-Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	88
13.	02-Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	06-Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	85

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
14.	03-Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	07-Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	86.6
		08-Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	74.98
		09-Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	90
15.	04-Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	10-Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89
		11-Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	75
		12-Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85
		13-Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60
		14-Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	73
		15-Indeks Pelayanan Publik di Lingkup BBPOM di Jakarta	4,20
16.	05-Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	16-Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	93
		17-Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	40
		18-Jumlah desa pangan aman	14
		19-Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	2
17.	06-Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	20-Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		21-Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
18.	07-Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	22-Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	54
19.	08-Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	23-Indeks RB Balai Besar POM di Jakarta	82.4
		24-Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta	79.1

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
20.	09-Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jakarta yang berkinerja optimal	25-Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta	84.25
21.	10-Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	26-Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	77
		27-Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	2
22.	11-Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jakarta secara Akuntabel	28-Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jakarta	91.9
		29-Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Jakarta	Efisien (95%)

2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis yang seharusnya terwujud pada tahun 2021 dengan indikator kinerja yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan serta target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Balai Besar POM di Jakarta, sebagai berikut:

Tabel 4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja BBPOM di Jakarta TA 2021

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target				Anggaran
			B03	B06	B09	B12	(Rupiah)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase Obat yang memenuhi syarat	86,5%	86,5%	86,5%	80%	309.593.550
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80%	80%	80%	95%	162.471.050
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86,5%	86,5%	86,5%	80%	309.593.550
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78,5%	78,5%	78,5%	81%	162.471.050

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target				Anggaran
			B03	B06	B09	B12	(Rupiah)
		Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat				88	17.276.000
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu				88	156.071.850
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan				86.6	56.977.100
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan				74.98	156.071.850
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Jakarta				90	1.111.991.500
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89%	89%	89%	89%	142.442.750
		Persentase keputusan/rekomendasi	60,2%	60,2%	60,2%	75%	142.442.750

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target				Anggaran
			B03	B06	B09	B12	(Rupiah)
	publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan					
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85%	85%	85%	85%	120.083.000
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	48%	48%	48%	60%	39.864.000
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	57%	57%	57%	73%	188.044.400
		Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Jakarta				4,2	160.801.300
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	90,99	90,99	90,99	93	1.624.100.000
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	15% (progres)	40% (progres)	60% (progres)	40	354.018.000
		Jumlah desa pangan aman	15% (progres)	40% (progres)	60% (progres)	14	783.316.000
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	15% (progres)	40% (progres)	60% (progres)	2	100.431.000
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	14%	36%	53%	100%	265.365.900
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	14%	36%	53%	100%	146.664.900

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target				Anggaran
			B03	B06	B09	B12	(Rupiah)
	wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta						
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	10%	20%	30%	54	1.042.636.000
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	Indeks RB Balai Besar POM di Jakarta				82.4	352.105.500
		Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta				79.1	430.407.500
9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jakarta yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta				84.25	24.425.665.000
10	Menguatnya laboratorium. pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar <i>GLP</i>				77	7.827.731.500
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	2	2	2	2	315.548.000

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target				Anggaran
			B03	B06	B09	B12	(Rupiah)
11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jakarta secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jakarta	14	37	56	91.9	352.105.500
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Jakarta	Efisien (95%)	Efisien (95%)	Efisien (95%)	Efisien (95%)	430.407.500

Terdapat perubahan target pada akhir tahun 2021 (B12) berdasarkan trend Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja tahun 2021 pada sasaran program berdasarkan Renstra tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan berdasarkan tren data capaian periode Renstra tahun sebelumnya. Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, maka Balai Besar POM di Jakarta sebagai unit kerja Eselon II wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah (Kepala Balai Besar POM di Jakarta) dengan pemberi amanah (Kepala BPOM RI) untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Pengukuran akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Perjanjian kinerja akan dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi dan digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan periode berikutnya.

2.5. Metode Pengukuran

Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis sesuai definisi operasional indikator, yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Penanggung jawab pengumpulan data yang mendukung pengukuran kinerja adalah tim monitoring dan evaluasi yang terkait dengan indikator tersebut.

Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis sesuai definisi operasional indikator, yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Adapun rumus perhitungan capaian kinerja yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Kriteria pencapaian kinerja

Kriteria	Capaian	Keterangan
Tidak dapat disimpulkan	$x > 120\%$	
Sangat Baik	$110\% < x \leq 120\%$	
Baik	$90\% \leq x < 110\%$	
Cukup	$70\% \leq x < 90\%$	
Kurang	$50\% \leq x < 70\%$	
Sangat Kurang	$< 50\%$	

Penetapan ini bertujuan untuk:

1. Mencegah penetapan target kinerja tahunan yang rendah;
2. Pemanfaatan monitoring kinerja secara berkala yang merupakan penerapan SAKIP sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pada bagian Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing pernyataan kinerja sasaran strategis Balai Besar POM di Jakarta guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja tahun 2021 Triwulan IV terhadap target yang telah ditetapkan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya serta melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Pada tahun 2021 Triwulan IV Balai Besar POM di Jakarta sasaran strategis dapat dihitung capaian dan ditetapkan kriterianya.

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN (NPS)	KRITERIA
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	95.60	Baik
2.	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap kualitas Obat dan Makanan	102.49	Baik
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	101.59	Baik
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	108.93	Baik
5.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	100.22	Baik
6.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	93.64	Baik
7.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	108.54	Baik
8.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	100.41	Baik
9.	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jakarta yang berkinerja optimal	100.53	Baik

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN (NPS)	KRITERIA
10.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	114.15	Baik
11.	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jakarta secara Akuntabel	99.43	Baik

Pada Rencana Strategis Balai Besar POM di Jakarta telah ditetapkan 11 sasaran strategis dan 29 indikator kinerja dengan pencapaian sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Volume			KRITERIA
			Target TW IV	Realisasi	Capaian	
a	b	c	d	e	f=(K6/D6*100)	g
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80%	74,88%	93,60	Baik
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	95%	94,73%	99,72	Baik
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80%	59,74%	74,68	Cukup
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	81%	94,93%	117,20	Sangat Baik
		Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	88%	81,67%	92,81	Baik
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	85	87,12	102,49	Baik
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	86,6	86,7	100,12	Baik
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	74,98	73,8	98,43	Baik
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Jakarta	90	95,61	106,23	Baik
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89%	92,19%	103,58	Baik
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	75%	78,02%	104,03	Baik
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85%	97,23%	114,39	Sangat Baik
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60%	69,02%	115,03	Sangat Baik
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	73%	79,21%	108,51	Baik
		Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Jakarta	4,2	4,54	108,10	Baik
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	93	93,83	100,89	Baik

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Volume			KRITERIA
			Target TW IV	Realisasi	Capaian	
	Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	40	40	100	Baik
		Jumlah desa pangan aman	14	14	100	Baik
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	2	2	100	Baik
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100%	90,85%	90,85	Baik
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100%	96,42%	96,42	Baik
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	54%	58,61%	108,54	Baik
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	Indeks RB Balai Besar POM di Jakarta	82,4	82,29	99,87	Baik
		Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta	79,1	79,85	100,95	Baik
9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jakarta yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta	84,25	84,7	100,53	Baik
10	Menguatnya laboratorium. pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar <i>GLP</i>	77	80,5	104,55	Baik
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	2	2,475	123,75	Tidak Dapat Disimpulkan
11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jakarta secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jakarta	92	86	93.61	Baik
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Jakarta	95% Efisien	100% Efisien	105.26	Baik

*) dihitung terhadap target sesuai target APBN-P

Dari 29 (dua puluh sembilan) indikator kinerja, 24 (dua puluh empat) indikator mencapai target dengan kategori “**baik**” ($90\% \leq x < 110\%$); 1 (satu) indikator mencapai kategori “**cukup**” ($70\% \leq x < 90\%$); 1 (satu) indikator mempunyai capaian melebihi 120% dengan kategori “**tidak dapat disimpulkan**”, 3 (tiga) indikator mencapai target dengan kategori “**sangat baik**” ($110\% \leq x < 120\%$).

Kriteria baik menunjukkan bahwa penguatan pengawasan Obat dan Makanan menjadi komitmen utama harus terus dipertahankan dan diperkuat secara optimal sehingga produk-produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan di Provinsi DKI Jakarta tetap terjamin aman, bermanfaat/berkhasiat dan bermutu untuk dikonsumsi oleh masyarakat.

Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target tersebut sehingga dapat memperkuat pengawasan Obat dan Makanan antara lain membentuk tim koordinasi dan pengawasan terpadu dengan pemerintah daerah dan lintas sektor terkait. Dari aspek produksi telah dilakukan upaya meningkatkan keamanan dan mutu produk obat dan makanan dengan intensifikasi pembinaan, bimbingan dan konsultasi pemenuhan cara produksi yang baik, informasi standar mutu dan penggunaan bahan berbahaya yang dilarang serta peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada produsen sehingga produk yang dihasilkan aman, bermutu dan berkhasiat/bermanfaat.

Terlebih dalam kondisi pasar bebas, AFTA dan MEA yang sudah berlangsung saat ini dan tidak dapat dibendung lagi masuknya produk-produk impor melalui jalur resmi maupun ilegal, maka dibutuhkan pengawasan yang komprehensif dan lebih kearah hulu yaitu sebelum produk beredar di masyarakat secara intensif. Untukantisipasi dampak produk yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan serta berisiko terhadap kesehatan maka dilakukan KIE bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati memilih dan mengkonsumsi produk obat dan makanan melalui penyuluhan, brosur, *banner* dan poster di tempat-tempat strategis dan informasi di media sosial serta upaya mendorong peran aktif masyarakat dalam mencari informasi dan pengetahuan tentang obat dan makanan.

Sasaran Strategis-1: Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1

1. Persentase Obat yang memenuhi syarat

a. *Perbandingan target dan realisasi triwulan IV tahun 2021*

Tabel 8. Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	TARGET TRIWULAN IV TAHUN 2021	REALISASI	CAPAIAN TRIWULAN IV TAHUN 2021 (%)	KRITERIA
Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	80	80	74.88	93.60	Baik

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017)

Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar dan kerangka *sampling* acak di tahun berjalan. Sampel Obat yang *disampling* sesuai dengan pedoman *sampling* tahun berjalan.

Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:

- (1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
- (2) Produk kadaluarsa
- (3) Produk rusak
- (4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan
- (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

Alur pemeriksaan hasil *sampling* Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.

Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets.

Jika termasuk kriteria 1 atau 2 atau 3, maka tidak dilakukan pengujian, namun apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan, maka sampel tetap diuji.

Jika ditemukan sampel Obat yang TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung sebagai 1 sampel TMS

Persentase obat yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Jakarta diperoleh dengan rumus:

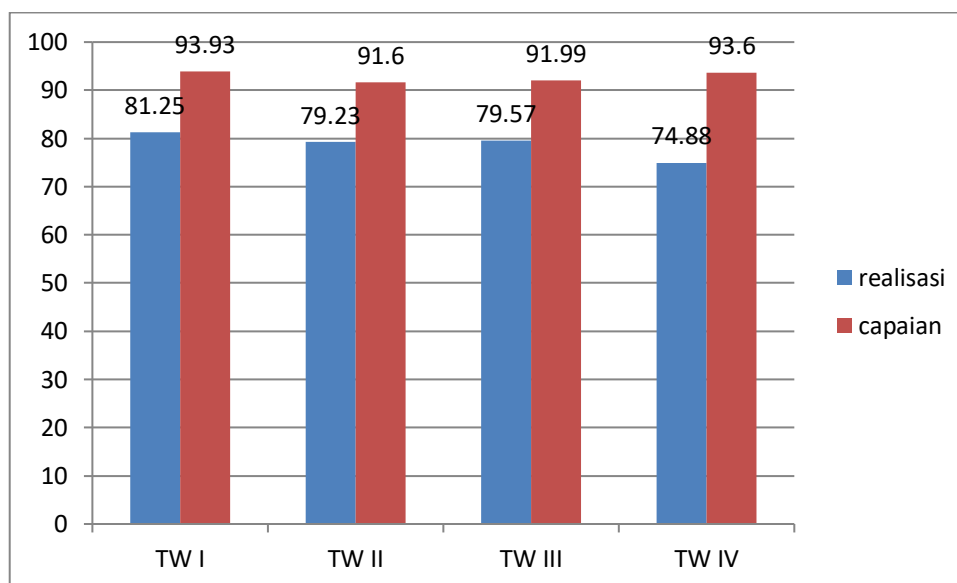
$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Total Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

- Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kedaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
- Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.
- Sampel Obat mencakup sampel balai dan Loka.

Capaian persentase obat yang memenuhi syarat di Provinsi DKI Jakarta Triwulan IV tahun 2021 adalah **93.60 %** dengan kriteria **“Baik”**.

b. Perbandingan realisasi dan capaian TW I, TW II, TW III dan TW IV tahun 2021



Gambar 7. Grafik Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Pada bulan November 2021, terdapat perubahan target dari sebelumnya 86,5 % menjadi 80%, hal ini berdasarkan trend capaian tahun sebelumnya dan triwulan berjalan. Sehingga capaian pada triwulan IV ini bisa lebih baik dari triwulan sebelumnya. Presentase obat yang memenuhi syarat pada Triwulan IV ini mengalami penurunan dibanding Triwulan sebelumnya, Sampai dengan Triwulan IV ini, terdapat 290 sampel (23,05%) yang hasil evaluasi

penandaannya tidak memenuhi ketentuan penandaan, terutama sampel kosmetik dan obat tradisional.

Berdasarkan hasil evaluasi pengujian produk Obat Tradisional terdapat 13 sampel (1,03%) sampel yang tidak memenuhi syarat pengujian yaitu 2 sampel mengandung BKO Glibenklamid dan Metformin dan 11 sampel tidak memenuhi syarat pengujian mikrobiologi yaitu APM enterobacteriace (10 sampel) dan ALT (1 sampel).

Berdasarkan hasil evaluasi pengujian produk Kosmetik terdapat 2 sampel (0,16%) yang tidak memenuhi syarat pengujian yaitu positif Arsen pada Blush On dan positif Metanol pada face toner Hal ini memerlukan perhatian khusus supaya pelaku industri selalu mematuhi ketentuan.

Cukup banyak produk obat tradisional yang tidak memenuhi ketentuan penandaan dan juga tidak memenuhi syarat pengujian. Khusus untuk produk Obat Tradisional impor yang mengandung BKO, diperlukan pengawasan khusus terkait dengan produk-produk impor supaya tidak ada lagi produk yang tidak memenuhi syarat beredar di masyarakat. Selain itu, sampel kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan penandaan disebabkan pendaftaran produk kosmetik hanya melalui notifikasi tanpa melalui evaluasi premarket yang komprehensif, terdapat juga sampel kosmetik yang tidak memenuhi syarat pengujian, hal ini memerlukan perhatian khusus seperti halnya obat tradisional.

c. *Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja*

Beberapa hal yang mendukung capaian obat yang memenuhi syarat, antara lain:

- Intervensi pengawasan dilakukan secara rutin dan terus-menerus kepada industri farmasi untuk pemenuhan penerapan Cara Produksi yang Baik (*GMP*) sehingga produk obat yang dihasilkan memenuhi standar termasuk aspek kesesuaian penandaannya. Apabila industri melakukan pelanggaran terhadap pemenuhan *GMP* maka industri farmasi wajib membuat *Corrective Action Preventive Action* (*CAPA*) dan dilakukan monitoring secara

berkesinambungan sehingga menjamin obat yang diproduksi memenuhi standar baik secara kualitas maupun kesesuaian dengan dokumen registrasi.

- Peningkatan koordinasi dengan Badan POM dan Balai Besar POM seluruh Indonesia terkait temuan produk obat TMS (tidak memenuhi syarat) pengujian maupun TMK (tidak memenuhi ketentuan) penandaan untuk produksi Industri di luar DKI Jakarta, terutama industri Obat Tradisional dan Kosmetik.
- Pelaksanaan kegiatan penyidikan selalu ditingkatkan yang diimbangi dengan peningkatan kompetensi personel dengan demikian cakupan temuan pelanggaran di bidang obat dan makanan lebih luas.
- Penyuluhan dan penyebaran informasi tentang KIE Keamanan Obat kepada masyarakat di Provinsi DKI Jakarta.

d. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

Pembinaan kepada pelaku usaha untuk selalu memenuhi ketentuan harus terus ditingkatkan terutama untuk pelaku usaha yang bergerak di bidang Obat Tradisional dan Kosmetik. Hal ini pun telah dilakukan oleh Kelompok Substansi Pemeriksaan dengan secara rutin mengadakan Bimbingan Teknis untuk para pelaku usaha.

2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan IV tahun 2021

Tabel 9. Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	TARGET TRIWULAN IV TAHUN 2021	REALISASI	CAPAIAN TRIWULAN IV TAHUN 2021 (%)	KRITERIA A
Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	95	95	94.73	99.72	Baik

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012)

Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar dan kerangka *sampling* acak di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman *sampling*.

Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:

- (1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
- (2) Produk kadaluarsa
- (3) Produk rusak
- (4) Tidak memenuhi ketentuan label
- (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

Alur pemeriksaan hasil *sampling* Pangan dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Pangan yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.

Jika termasuk kriteria 1, 2 atau 3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK label, maka sampel tetap diuji.

Jika ditemukan sampel makanan yang TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS.

Hasil evaluasi penandaan (MK atau TMK) mempengaruhi hasil kesimpulan akhir.

Persentase makanan yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus:

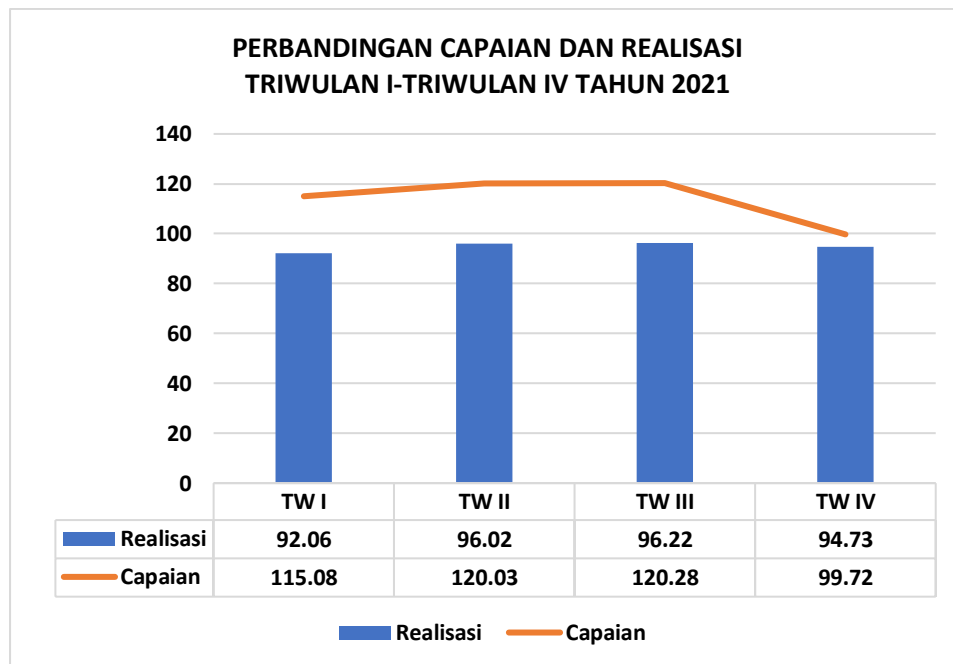
$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak Makanan MS}}{\text{Total Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

- Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kedaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
- Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.
- Sampel Makanan mencakup sampel Balai dan Loka.

Capaian Persentase Makanan yang aman dan bermutu yang memenuhi syarat di Provinsi DKI Jakarta Triwulan IV tahun 2021 **belum mencapai target** yang ditetapkan yaitu 99.71 % dengan kriteria **“baik”**.

b. Perbandingan realisasi dan capaian TW I, TW II, TW III dan TW IV tahun 2021



Gambar 10. Grafik Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Capaian persentase makanan yang memenuhi syarat di Triwulan IV tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan capaian di Triwulan sebelumnya, namun ada perubahan target di Triwulan IV (dari 80 % menjadi 95%), sehingga capaian menjadi lebih baik. Jumlah sampel yang tidak memenuhi persyaratan sampai TW IV ini adalah 24 sampel (3,95%) tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil

pengujian dan 5 sampel (0,82%) yang hasil evaluasi penandaannya tidak memenuhi ketentuan penandaan.

Berdasarkan hasil evaluasi pengujian kimia, dari 24 sampel yang tidak memenuhi syarat terdapat sampel madu yang menyumbang persentase terbesar sampai triwulan ini yaitu 7 sampel tidak memenuhi syarat nilai Enzim diastase dan Kadar HMF, 2 sampel tidak memenuhi syarat nilai enzim diastase, dan 6 sampel tidak memenuhi syarat kadar HMF nya. Selain itu terdapat 4 sampel yang TMS siklamat, 2 sampel TMS Kadar sulfit, 2 sampel TMS kadar BHA, 1 sampel TMS kadar asam benzoat, dan 1 sampel TMS kadar sakarin.

Berdasarkan hasil evaluasi pengujian mikrobiologi, 24 produk pangan yang tidak memenuhi syarat tersebut di atas semuanya memenuhi syarat mikrobiologi. Produk pangan yang tidak memenuhi syarat pengujian mikrobiologi terdapat 6 sampel yaitu ALT & Angka Enterobacteriaceae (2 sampel), AKK (2 sampel), ALT (1 sampel), dan Angka Pseudomonas aeruginosa (1 sampel).

Banyaknya produk madu yang tidak memenuhi syarat di peredaran, memerlukan pengawasan khusus agar tidak ada lagi produk yang tidak memenuhi syarat beredar di masyarakat.

c. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

- a. Realisasi persentase makanan yang memenuhi syarat pada TW IV tahun 2021 hampir mencapai target yang ditetapkan, dengan kriteria baik. Meskipun realisasi persentase makanan yang memenuhi syarat sudah hampir mencapai target, namun masih ada produk yang tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar).
- b. Membaiknya capaian pada TW IV disebabkan Badan POM telah melakukan penyesuaian target persentase makanan yang memenuhi syarat dari 80% menjadi menjadi 95% untuk tahun 2021 ini, berdasarkan realisasi di masing-masing propinsi di Indonesia. Kondisi pandemic Covid-19 turut mempengaruhi kualitas produk makanan yang beredar di pasaran. Dalam kondisi yang demikian kesadaran masyarakat untuk memilih produk yang berkualitas semakin meningkat agar daya tahan tubuh tetap terjaga dengan baik. Hal ini sangat mempengaruhi produk yang beredar, sehingga produk

makanan yang beredar adalah produk yang memenuhi syarat.

Beberapa hal yang mendukung capaian pangan yang memenuhi syarat, antara lain:

- a. Intervensi pengawasan dilakukan secara rutin dan terus-menerus kepada industri pangan untuk pemenuhan penerapan Cara Produksi yang Baik (GMP) sehingga produk pangan yang dihasilkan memenuhi standar termasuk aspek kesesuaian penandaannya. Apabila industri melakukan pelanggaran terhadap pemenuhan GMP maka industri wajib membuat Corrective Action Preventive Action (CAPA) dan dilakukan monitoring secara berkesinambungan sehingga menjamin pangan yang diproduksi memenuhi standar baik secara kualitas maupun kesesuaian dengan dokumen registrasi.
 - b. Peningkatan koordinasi dengan Badan POM dan Balai Besar POM seluruh Indonesia terkait temuan produk pangan TMS (tidak memenuhi syarat) pengujian maupun TMK (tidak memenuhi ketentuan) penandaan untuk produksi Industri di luar DKI Jakarta.
 - c. Pelaksanaan kegiatan penyidikan selalu ditingkatkan yang diimbangi dengan peningkatan kompetensi personel dengan demikian cakupan temuan pelanggaran di bidang obat dan makanan lebih luas.
 - d. Penyuluhan dan penyebaran informasi tentang KIE Keamanan Pangan kepada masyarakat di Provinsi DKI Jakarta.
- d. *Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya*

Peningkatan kompetensi laboratorium dan personil penguji dalam kinerjanya juga dilakukan dengan mengikuti uji profisiensi baik secara internal maupun eksternal. Terlaksananya Bimbingan Teknis Internal laboratorium pangan dan bahan berbahaya di Triwulan IV ini menambah ruang lingkup baru dan penambahan Metoda Analisis yang dibutuhkan dalam pengujian sehingga diharapkan dapat membantu meningkatkan kecepatan pengujian produk di laboratorium. Kendala operasional laboratorium untuk pemeliharaan alat laboratorium tahun 2020 sudah dapat diatasi di tahun 2021 karena pemantauan pemeliharaan alat sudah dilakukan secara lebih ketat dengan menugaskan personil sebagai penanggungjawab pemantauan tersebut. Dengan demikian ada jaminan alat dapat bekerja sesuai fungsinya, hal ini juga akan mendukung terjaminnya validitas uji.

3. **Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan**

a. *Perbandingan target dan realisasi triwulan IV tahun 2021*

Tabel 10. Realisasi Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	TARGET TRIWULAN IV TAHUN 2021	REALISASI	CAPAIAN TRIWULAN IV TAHUN 2021 (%)	KRITERIA
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80	80	59.74	74.68	Cukup

Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus:

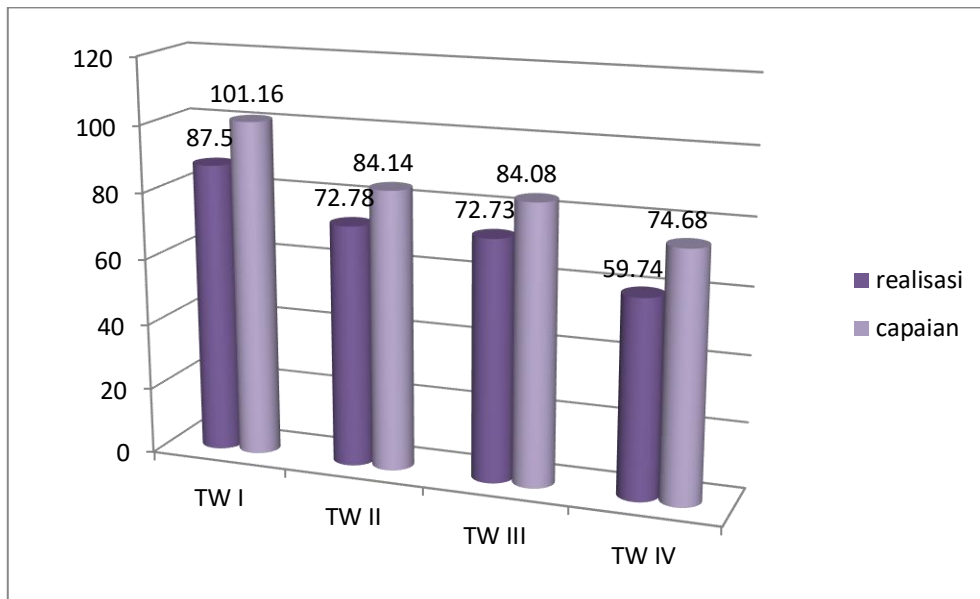
$$\% \text{Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

- Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
- Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

Capaian Persentase obat yang aman dan bermutu di Provinsi DKI Jakarta Triwulan IV tahun 2021 adalah **74.68 %** dengan kriteria “**Cukup**”.

b. Perbandingan capaian dan realisasi TW I, TW II, TW III, dan TW IV



Gambar 10. Grafik Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Obat yang Aman dan Bermutu

Realisasi persentase obat yang aman dan bermutu pada Triwulan IV tahun 2021 mengalami penurunan dibanding sebelumnya. Ditemukan 204 sampel atau 38,20% yang tidak memenuhi ketentuan penandaan (sebagian besar sampel kosmetik dan obat tradisional) dan 1,87% (10 sampel) tidak memenuhi syarat pengujian yaitu 6 sampel Obat Tradisional tidak memenuhi syarat pengujian Mikrobiologi (3 sampel ALT, 1 sampel ALT dan AKK, 2 sampel APM Enterobacteriaceae). Sedangkan untuk produk kosmetik terdapat 4 sampel tidak memenuhi syarat pengujian mikrobiologi (2 sampel ALT dan 2 sampel APM Enterobacteriaceae)

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Produk obat yang beredar di Provinsi DKI Jakarta masih cukup banyak yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu serta ketentuan penandaan, terutama kosmetik dan obat tradisional. Sampel kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan penandaan disebabkan pendaftaran produk kosmetik hanya melalui notifikasi tanpa melalui evaluasi premarket yang komprehensif, untuk itu diperlukan pengawasan post market yang ketat guna melindungi masyarakat dari produk yang beresiko terhadap kesehatan. Dalam kondisi pandemic Covid 19 ini, masyarakat sangat membutuhkan produk Obat yang

menunjang kesehatan dan daya tahan tubuh, sehingga diharapkan produk obat yang dikonsumsi adalah yang aman dan bermutu.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Beberapa hal yang mendukung capaian obat yang aman dan bermutu, antara lain:

- Intervensi pengawasan dilakukan secara rutin dan terus-menerus kepada UMKM Obat Tradisional supaya menerapkan Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) sehingga produk obat tradisional yang dihasilkan bisa memenuhi syarat.
- Peningkatan pengawasan kepada industri farmasi untuk pemenuhan penerapan Cara Produksi yang Baik (*GMP*) sehingga produk obat yang dihasilkan memenuhi standar termasuk aspek kesesuaian penandaannya. Apabila industri melakukan pelanggaran terhadap pemenuhan *GMP* maka industri farmasi wajib membuat *Corrective Action Preventive Action* (CAPA) dan dilakukan monitoring secara berkesinambungan sehingga menjamin obat yang diproduksi memenuhi standar baik secara kualitas maupun kesesuaian dengan dokumen registrasi.
- Peningkatan koordinasi dengan Badan POM dan Balai Besar POM seluruh Indonesia terkait temuan produk obat TMS (tidak memenuhi syarat) pengujian maupun TMK (tidak memenuhi ketentuan) penandaan untuk produksi Industri di luar DKI Jakarta, terutama industri Obat Tradisional dan Kosmetik.
- Pelaksanaan kegiatan penyidikan selalu ditingkatkan yang diimbangi dengan peningkatan kompetensi personel dengan demikian cakupan temuan pelanggaran di bidang obat dan makanan lebih luas.
- Penyuluhan dan penyebaran informasi tentang KIE Keamanan Obat kepada masyarakat di Provinsi DKI Jakarta

e. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

Di Triwulan IV ini, pengadaan Alat Laboratorium sudah berjalan sehingga ada penambahan jumlah alat Laboratorium yang bisa mempercepat pelaksanaan

pengujian dan pemeliharaan alat laboratorium yang rusak sudah dilaksanakan sehingga alat-alat tersebut sudah bisa berfungsi seperti sediakala.

Tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya telah dilakukan, yaitu peningkatan penerapan sistem manajemen mutu ISO 17025:2017 dan ISO 9001:2015 secara konsisten serta peningkatan kompetensi personil sehingga hasil uji selalu dapat dijamin validitasnya. Selain itu juga dilakukan pengembangan metode analisis yang sesuai dengan trend produk beredar.

Namun karena yang banyak menyumbang rendahnya capaian ini adalah banyaknya sampel yang tidak memenuhi ketentuan penandaan, maka pembinaan kepada pelaku usaha untuk selalu memenuhi ketentuan perlu menjadi prioritas untuk dilakukan secara terus menerus. Hal ini pun telah dilakukan oleh Kelompok Substansi Pemeriksaan dengan secara rutin melakukan kegiatan berikut :

- a. Intervensi pengawasan yang dilakukan terhadap sarana produksi obat untuk meningkatkan kepatuhan produsen terhadap peraturan yang berlaku serta pemenuhan penerapan Cara Produksi yang Baik (*GMP*), termasuk aspek kesesuaian penandaannya, sehingga produk obat yang dihasilkan memenuhi standar baik secara kualitas maupun kesesuaian dengan dokumen registrasi.
- b. Melaksanakan bimbingan teknis Iklan dan Penandaan Obat untuk meningkatkan kemampuan petugas dalam melakukan evaluasi Iklan dan Penandaan sehingga hasil pengawasan iklan dan penandaan dapat sesuai dengan pedoman.

4. Persentase Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta

a. *Perbandingan target dan realisasi triwulan IV tahun 2021*

Tabel 11. Realisasi Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	TARGET TRIWULAN IV TAHUN 2021	REALISASI	CAPAIAN TRIWULAN IV TAHUN 2021 (%)	KRITERIA
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	81	81	94.93	117.20	Sangat Baik

Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta diperoleh dengan rumus:

$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

- Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label
- Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

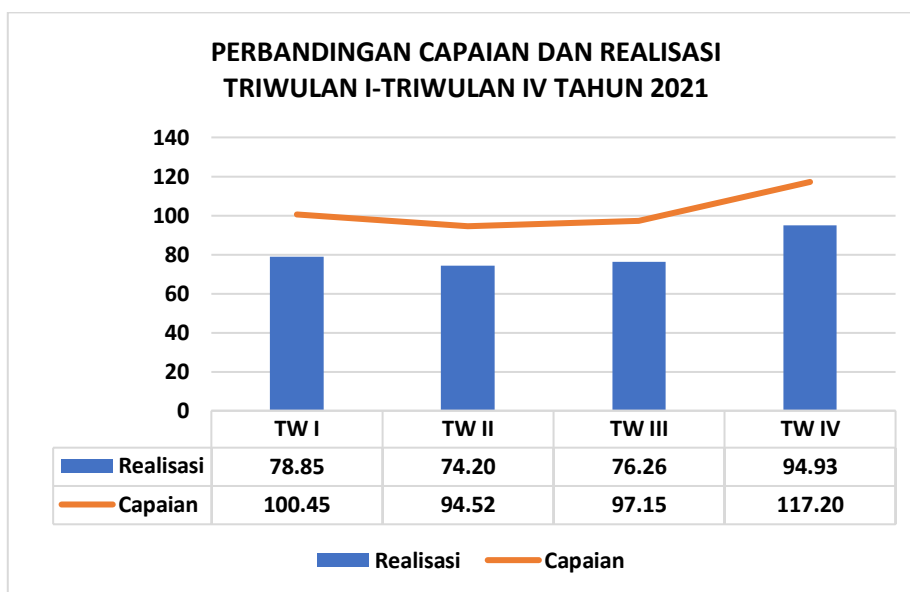
Capaian Persentase Makanan aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di Provinsi DKI Jakarta triwulan IV tahun 2021 **melebihi target** yang ditetapkan yaitu 117.20 % dengan kriteria **“Sangat Baik”**.

b. *Perbandingan realisasi dan capaian TW I, TW II, TW III dan TW IV* tahun 2021

Indikator kinerja utama “Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan” merupakan indikator yang ditetapkan di tahun 2020 dan masih digunakan di tahun 2021. Data realisasi tahun 2020 merupakan baseline untuk realisasi tahun-tahun berikutnya. Realisasi persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan. Untuk capaian Triwulan IV 2021 terdapat kenaikan dibanding capaian TW III tahun 2021, dan masuk dalam kriteria **“sangat baik”**.

Pada tahun 2021 fortifikasi terpisah dari sampel targeted sehingga mengurangi jumlah sampel targeted. Berdasarkan evaluasi hasil pengujian

diperoleh bahwa sampai TW IV ini jumlah makanan yang tidak aman dan bermutu hanya sedikit. Ini menunjukkan produk pangan yang beredar di masyarakat sudah aman dan bermutu.



Gambar 11.Perbandingan realisasi dan capaian Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta TW IV dengan TW III, TW II dan TW I tahun 2021

c. *Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan*

Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada TW IV tahun 2021 mencapai target yang ditetapkan yaitu 94.93 % dengan capaian 117.20%, persentase sampel Makanan yang aman dan bermutu juga sudah memperhitungkan penandaan label, sampel tanpa ijin edar, kadaluarsa dan rusak. Persentase Makanan yang aman dan bermutu di tahun 2021 menunjukkan sedikit penurunan dibanding tahun sebelumnya

d. *Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja*

Realisasi persentase makanan yang aman dan bermutu pada TW IV tahun 2021 sudah mencapai target namun meningkat dibanding capaian Triwulan III tahun 2021 dengan kriteria sangat baik.

e. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

Audit Sistem manajemen mutu yang dilakukan pada awal tahun menjadi konsen utama dalam peningkatan dan monitoring mutu hasil pengujian. Pengembangan metode analisis yang sesuai trend produk yang beredar juga dilakukan secara berkala setiap tahunnya. Pengembangan kompetensi personil baik lama maupun baru dilakukan secara berkala dengan melakukan bimbingan teknis secara internal maupun eksternal. Peningkatan kompetensi laboratorium dan personil penguji dalam kinerjanya juga dilakukan dengan mengikuti uji profisiensi baik secara internal maupun eksternal.

Namun karena yang banyak menyumbang rendahnya capaian ini adalah banyaknya sampel yang tidak memenuhi ketentuan penandaan, maka pembinaan kepada pelaku usaha untuk selalu memenuhi ketentuan perlu menjadi prioritas untuk dilakukan secara terus menerus. Hal ini pun telah dilakukan oleh Kelompok Substansi Pemeriksaan dengan secara rutin melakukan kegiatan berikut :

Intervensi pengawasan yang dilakukan terhadap sarana produksi makanan untuk meningkatkan kepatuhan produsen terhadap peraturan yang berlaku serta pemenuhan penerapan Cara Produksi pangan yang Baik (CPPOB), termasuk aspek kesesuaian penandaannya, sehingga oaproduk makanan yang dihasilkan memenuhi standar baik secara kualitas maupun kesesuaian dengan dokumen registrasi.

Melaksanakan bimbingan teknis Iklan dan Penandaan Makanan untuk meningkatkan kemampuan petugas dalam melakukan evaluasi Iklan dan Penandaan sehingga hasil pengawasan iklan dan penandaan dapat sesuai dengan pedoman.

5. Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2021

Tabel 12. Realisasi Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Jakarta

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	TARGET TRIWULAN IV TAHUN 2021	REALISASI	CAPAIAN TRIWULAN IV TAHUN 2021 (%)	KRITERIA
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	88	88	81.67	92.81	Baik

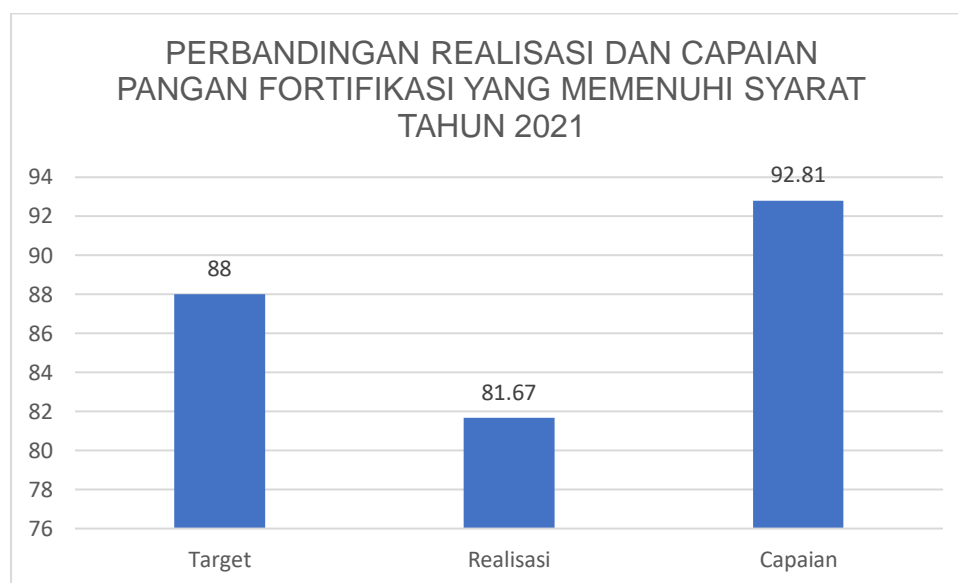
- Pangan fortifikasi adalah pangan olahan yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan untuk diperkaya dengan zat gizi mikro yang diperlukan masyarakat.
- Pangan fortifikasi yang diambil sesuai standar dan memenuhi syarat adalah pangan fortifikasi yang disampling sesuai dengan Pedoman Sampling pada tahun berjalan dan hasil ujinya memenuhi syarat sesuai ketentuan perundangundangan.
- Pemeriksaan sampel mengikuti metode baru yakni pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label dan pengujian.
- Pengambilan keputusan MS/TMS hanya berdasarkan hasil pengujian zat fortifikan yang ditambahkan pada pangan fortifikasi.
Hasil pemeriksaan pada poin c dilakukan dalam rangka tindak lanjut pengawasan.

% Pangan Fortifikasi yang MS =

$$\frac{\text{Pangan Fortifikasi yang MS}}{\text{Total Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

Capaian Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat di Provinsi DKI Jakarta Triwulan IV tahun 2021 **belum memenuhi target** yang ditetapkan yaitu 92.81 %, namun masih masuk dalam kriteria **“baik”**.

b. Perbandingan realisasi dan capaian Pangan Fortifikasi tahun 2021



Gambar 12. Grafik Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat

Realisasi persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat di Triwulan VI tahun 2021 sebesar 81.67%. Realisasi persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat masih belum mencapai target yang ditentukan di tahun 2021. Capaian persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat di tahun 2021 ini sebesar 92.81%.

c. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pada tahun 2021 ini, IKU “Pangan fortifikasi yang memenuhi syarat” merupakan tambahan IKSK 1 dari SK1 (Terwujudnya obat dan makanan yang memenuhi syarat), dengan memisahkan pangan fortifikasi dari IKU “Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan”.

Realisasi persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat pada tahun 2021 belum mencapai target yang ditetapkan, namun persentase capaian pangan fortifikasi masih masuk dalam kriteria “baik“. Berdasarkan hasil evaluasi pengujian kimia, jumlah pangan fortifikasi yang memenuhi syarat sebanyak 98 sampel (81.67%). Produk pangan fortifikasi yang tidak memenuhi

syarat sebanyak 22 sampel (18.33%) yaitu 19 sampel garam dan 3 sampel tepung terigu dengan parameter yang diuji adalah penetapan kadar KIO₃ pada garam dan penetapan kadar Fe dan Zn pada tepung terigu. Semua sampel pangan fortifikasi yang tidak memenuhi syarat ini memenuhi syarat mikrobiologi.

Kondisi pandemic Covid-19 turut mempengaruhi kualitas produk makanan yang beredar di pasaran. Dalam kondisi yang demikian kesadaran masyarakat untuk memilih produk yang berkualitas semakin meningkat agar daya tahan tubuh tetap terjaga dengan baik. Hal ini sangat mempengaruhi produk yang beredar, sehingga produk makanan yang beredar adalah produk yang memenuhi syarat.

Beberapa hal yang mendukung capaian pangan fortifikasi yang memenuhi syarat, antara lain:

Intervensi pengawasan dilakukan secara rutin dan terus-menerus kepada industri pangan untuk pemenuhan penerapan Cara Produksi yang Baik (*GMP*) sehingga produk pangan yang dihasilkan memenuhi standar termasuk aspek kesesuaian penandaannya. Apabila industri melakukan pelanggaran terhadap pemenuhan *GMP* maka industri wajib membuat *Corrective Action Preventive Action* (*CAPA*) dan dilakukan monitoring secara berkesinambungan sehingga menjamin pangan yang diproduksi memenuhi standar baik secara kualitas maupun kesesuaian dengan dokumen registrasi.

Peningkatan koordinasi dengan Badan POM dan Balai Besar POM seluruh Indonesia terkait temuan produk pangan TMS (tidak memenuhi syarat) pengujian maupun TMK (tidak memenuhi ketentuan) penandaan untuk produksi Industri di luar DKI Jakarta.

Pelaksanaan kegiatan penyidikan selalu ditingkatkan yang diimbangi dengan peningkatan kompetensi personel dengan demikian cakupan temuan pelanggaran di bidang obat dan makanan lebih luas.

Penyuluhan dan penyebaran informasi tentang KIE Keamanan Pangan kepada masyarakat di Provinsi DKI Jakarta.

d. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

Peningkatan kompetensi laboratorium dan personil penguji dalam kinerjanya juga dilakukan dengan mengikuti uji profisiensi baik secara internal maupun eksternal. Terlaksananya Bimbingan Teknis Internal laboratorium pangan dan bahan berbahaya di Triwulan IV ini menambah ruang lingkup baru dan penambahan Metoda Analisis yang dibutuhkan dalam pengujian sehingga diharapkan dapat membantu meningkatkan kemampuan dan kecepatan penyelesaian pengujian.

Kendala operasional laboratorium untuk pemeliharaan alat laboratorium tahun 2020 sudah dapat diatasi di tahun 2021 karena pemantauan pemeliharaan alat sudah dilakukan secara lebih ketat dengan menugaskan personil sebagai penanggungjawab pemantauan tersebut. Dengan demikian ada jaminan alat dapat bekerja sesuai fungsinya, hal ini juga akan mendukung terjaminnya validitas uji.

Dari pencapaian 4 target indikator pada sasaran strategis 1, maka dapat dihitung nilai pencapaian sasarannya (NPS) sebagai rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya.

$$\text{NPS} = \frac{\text{NPI 1} + \text{NPI 2} + \text{NPI 3} + \text{NPI 4} + \text{NPI 5}}{5}$$

$$\text{NPS} = \frac{93.60\% + 99.71\% + 74.68\% + 117.20\% + 92.81\%}{5}$$

$$\text{NPS} = 95.60\%$$

Dengan NPS 95.60%, maka Balai Besar POM di Jakarta berhasil mencapai sasaran terwujudnya obat dan makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta.

Sasaran Strategis-2: Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

6. Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Jakarta.

a. *Perbandingan target dan realisasi triwulan IV tahun 2021*

Tabel 13. Realisasi Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Jakarta Triwulan IV Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	TARGET TRIWULAN IV TAHUN 2021	REALISASI	CAPAIAN TRIWULAN IV TAHUN 2021 (%)	KRITERIA
Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	85	85	87.12	102.49	Baik

Indeks kesadaran masyarakat merupakan ukuran kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan menggunakan pendekatan AIDA (*Awareness, Interest, Desire, Action*) dalam memilih Obat dan Makanan. Kesadaran yang diukur mencakup beberapa aspek yaitu pengetahuan, sikap dan perilaku.

Pengetahuan (*Knowledge*) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap

pemahaman masyarakat. Aspek pengetahuan mengenai Obat dan Makanan aman dan bermutu meliputi manfaat produk, ciri-ciri produk yang aman dan bermutu, produk yang tidak aman dan berbahaya, aturan pakai yang tepat serta logo golongan pada kemasan Obat.

Sikap (*Attitude*) untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan yang beredar saat ini, termasuk peredaran Obat atau Obat Tradisional palsu. Selanjutnya dipetakan sikap masyarakat tersebut dalam memilih serta mengkonsumsi obat dan makanan yang benar. Ditambahkan pula penilaian masyarakat terhadap Badan POM yang memiliki tugas pokok dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan. Aspek sikap mengenai Obat dan Makanan aman dan bermutu meliputi sikap dalam menangani produk kedaluwarsa, tidak aman dan berbahaya serta palsu, dan cara melakukan penyimpanan produk.

Perilaku (*Practices*) untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Kemudian bagaimana dukungan masyarakat terhadap program Badan POM. Aspek perilaku mengenai Obat dan Makanan aman dan bermutu meliputi perilaku dalam menyimpan produk, membaca label/kemasan/dus/brosur, produk aman dan bermutu.

Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta diperoleh melalui survei yang dilakukan oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan (PRKOM) dengan metode *multi stage cluster random sampling* dengan *margin of error* 10% dan dilaksanakan di 34 provinsi dengan estimasi level provinsi. Unit observasi adalah rumah tangga dengan menggunakan dua jenis kerangka sampel, yaitu kerangka sampel blok sensus dan kerangka sampel rumah tangga. Survei menggunakan stratifikasi daerah perkotaan (*urban*) dan perdesaan (*rural*). Tahap pemilihan sampel-*Two Stage Cluster Sampling* yaitu memilih blok sensus secara PPS (*Probability Proportional Size*) yaitu sampling dengan *size* jumlah rumah tangga di setiap strata provinsi perkotaan/perdesaan dan selanjutnya memilih sebanyak 10 rumah tangga secara sistematis sampling dari setiap blok sensus terpilih dari daftar populasi rumah tangga.

Pengumpulan data dengan melakukan wawancara tatap muka (*face to face interview*) terhadap target responden. Subyek studi adalah anggota rumah

tangga yang menggunakan produk Obat dan Makanan berusia 17-65 tahun, sehat jasmani dan rohani dan termasuk dalam Daftar Sampel Rumah Tangga (DSRT) dalam Daftar Sampel Blok Sensus (DSBS) sebanyak 1157 blok sensus. Setiap blok sensus berjumlah 10 responden dan total berjumlah 11570 responden di 34 Provinsi di Indonesia. Teknik pengambilan sampel telah dilakukan pengacakan oleh pihak BPS sehingga tingkat keterwakilan dan keacakan (*random*) sampel sangat tinggi. Untuk responden rumah tangga, unit sampling terkecil dalam survei ini adalah rumah tangga sesuai Blok Sensus BPS. Analisis data dilakukan secara univariat dan bivariat untuk mendapatkan nilai indeks kesadaran masyarakat serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Kriteria yang digunakan adalah:

Kategori	Interval Indeks
Tidak Baik	< 45
Kurang Baik	45 – 60
Cukup Baik	60 – 75
Baik	75 – 90
Sangat Baik	≥ 90

Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021 diperoleh sebesar 87.12 dengan kategori Baik. Hasil ini telah melampaui target kinerja sebesar 85 sehingga diperoleh capaian sebesar 102.49% kategori kinerja Baik. Dengan hasil ini, DKI Jakarta memperoleh capaian indeks kesadaran masyarakat tertinggi dibandingkan 33 provinsi lainnya secara nasional.

Indeks kesadaran masyarakat ini dibentuk dari 3 (tiga) indikator pengukuran, yaitu:

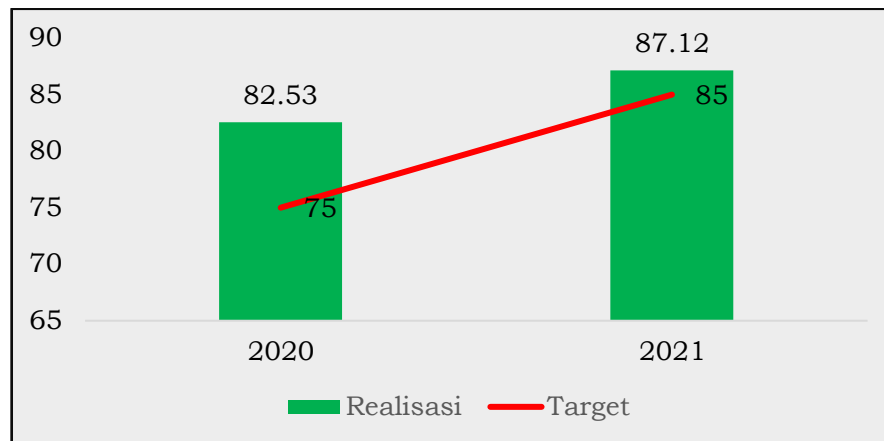
- 1) Pengetahuan, diperoleh indeks pengetahuan sebesar 93.48 dengan kategori Sangat Baik. Hasil ini merupakan nilai indeks pengetahuan masyarakat tertinggi secara nasional. Indeks pengetahuan masyarakat tertinggi berdasarkan produk adalah produk pangan olahan sebesar 95.50 (Sangat Baik) diikuti dengan produk Obat sebesar 95.38 (Sangat Baik), produk Kosmetik sebesar 93.23 (Sangat Baik), dan produk Suplemen

Kesehatan sebesar 91.65 (Sangat Baik). Indeks pengetahuan masyarakat berdasarkan produk terendah adalah produk Obat Tradisional sebesar 90.08 dengan kategori indeks Sangat Baik. Hasil indeks pengetahuan per kategori produk masyarakat Jakarta secara keseluruhan masuk ke dalam kategori Sangat Baik. Hal ini mengindikasikan bahwa pengetahuan masyarakat akan Obat dan Makanan yang bermutu sudah Sangat Baik.

- 2) Sikap, diperoleh indeks sikap sebesar 83.89 dengan kategori Baik. Hasil ini merupakan hasil indeks sikap masyarakat tertinggi kedua setelah Kepulauan Riau. Indeks sikap per kategori produk tertinggi diperoleh terhadap produk Obat sebesar 84.75 (Baik) diikuti produk Suplemen Kesehatan sebesar 83.77 (Baik), produk Kosmetik sebesar 83.54 (Baik), Obat Tradisional sebesar 83.46 (Baik), dan produk Pangan Olahan sebesar 83.35 (Baik). Hal ini mengindikasikan meskipun pengetahuan masyarakat mengenai produk pangan menghasilkan nilai tertinggi belum dibarengi dengan sikap masyarakat dalam memilih produk pangan yang aman dan bermutu.
- 3) Perilaku, diperoleh indeks perilaku masyarakat sebesar 83.99 dengan kategori Baik. Hasil ini merupakan hasil indeks sikap masyarakat tertinggi kedua setelah Jawa Tengah. Indeks perilaku per kategori produk tertinggi diperoleh terhadap produk Obat sebesar 86.61 (Baik), kemudian berturut-turut diikuti oleh produk Pangan Olahan sebesar 84.33 (Baik), Kosmetik sebesar 83.34 (Baik), Suplemen Kesehatan sebesar 82.49 (Baik), dan Obat Tradisional sebesar 81.88 (Baik). Hal ini mengindikasikan bahwa perilaku masyarakat dalam menyimpan produk, dan membaca label/kemasan/dus/brosur dari Obat Tradisional aman dan bermutu masih lebih rendah dibandingkan komoditi Obat dan Makanan lainnya.

Dari nilai indikator pembentuk pengukuran, diketahui indikator tertinggi berasal dari pengetahuan dengan nilai 93.48 dan terendah berasal dari sikap sebesar 83.89.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2021 dengan tahun 2020



Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021 meningkat bila dibandingkan tahun 2020 sebesar 4.59 poin dari 82.53 (Baik) di tahun 2020 menjadi 87.12 (Baik) di tahun 2021. Apabila dibandingkan dengan target, nilai indeks yang diperoleh di tahun 2020 dan 2021 sudah melampaui dengan capaian sebesar 110.04% (Sangat Baik) di tahun 2020 dan 102.49% (Baik) di tahun 2021. Hal ini karena *baseline* target di tahun 2021 meningkat secara signifikan dibandingkan tahun 2020 dari 75 menjadi 85.

Apabila dilihat dari indikator pembentuknya, indeks pengetahuan dan perilaku tahun 2021 mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun 2020, yaitu berturut-turut dari 83.38 (Baik) menjadi 93.48 (Sangat Baik) dan dari 79.35 (Baik) menjadi 83.99 (Baik). Sedangkan untuk indeks sikap tahun 2021 mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun 2020 dari 84.87 (Baik) menjadi 83.89 (Baik). Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun pengetahuan masyarakat mengenai Obat dan Makanan yang bermutu sudah sangat baik belum dibarengi dengan sikap dalam menangani produk kadaluarsa, tidak aman dan berbahaya serta palsu, dan cara melakukan penyimpanan produk.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan

Beberapa faktor penyebab keberhasilan dari peningkatan Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- 1) Kondisi pandemi Covid-19 menyebabkan masyarakat memiliki kesadaran yang lebih tinggi dalam mencari informasi terkait produk Obat dan Makanan yang aman dan bermutu terutama mengenai Obat dan Vaksin Covid-19 serta penerapan perilaku hidup sehat di era *new normal*.

- 2) Metode Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang efektif baik secara tatap muka maupun non tatap muka dengan diadakannya Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat melalui KIE bersama Tokoh masyarakat yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat, seperti komunitas ibu Rumah Tangga, Remaja/Karang Taruna, Pelaku Usaha di bidang Obat dan Makanan ataupun penyebaran informasi melalui media sosial (*Instagram, Facebook, Twitter*).
- 3) Konten materi KIE yang menarik dan mencakup semua komoditi Obat dan Makanan sehingga dapat memberikan pengetahuan dan dapat mempengaruhi sikap dan perilaku dalam memilih Obat dan Makanan yang aman dan bermutu.

d. *Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja*

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021 antara lain:

- 1) Intensifikasi penyebaran informasi Obat dan Makanan melalui berbagai program inovasi, seperti Aripin (Asupan Rabuan Pintar) yang menyajikan infografis di media sosial BBPOM di Jakarta, Kerling Jakarta (Sertifikasi dan Layanan Informasi Keliling) dan Sultan Betawi (Loket konsultasi dan layanan informasi sertifikasi di Mall Pelayanan Publik DKI Jakarta).
- 2) Terselenggaranya program pemberdayaan masyarakat melalui program Prioritas Nasional keamanan pangan di wilayah DKI Jakarta, yaitu program Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, dan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS) yang langsung memberikan pembinaan dan bimbingan teknis praktik keamanan pangan kepada komunitas kelurahan, pasar, dan sekolah.

e. *Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya*

Tindak lanjut atas rekomendasi pada pencapaian kinerja indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Jakarta periode sebelumnya yaitu berupa upaya untuk memperbanyak kegiatan KIE dan penyebaran informasi kepada masyarakat, terutama melalui intensifikasi inovasi program KIE dengan pemanfaatan media sosial (*Instagram, Facebook, Twitter, dan Youtube*). Untuk meningkatkan indeks kesadaran masyarakat perlu disusun program KIE dengan pesan utama paparan materi yang mencakup semua komoditi Obat dan Makanan dan diperlukan sosialisasi tugas dan fungsi BPOM dalam pengawasan Obat dan Makanan agar masyarakat lebih sadar akan perannya dalam sistem pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia.

Adapun upaya yang dapat dilakukan sebagai rekomendasi perbaikan kinerja di masa mendatang antara lain:

- 1) Meningkatkan strategi komunikasi dan sosialisasi dalam pelaksanaan KIE.
- 2) Meningkatkan sinergi lintas sektor terkait pengawasan Obat dan Makanan.
- 3) Menyusun konten/materi informasi dan edukasi tentang produk Obat dan Makanan yang menarik dan mudah dipahami masyarakat.

Sasaran Strategis-3: Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3

7. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

a. Perbandingan target dan realisasi capaian triwulan IV

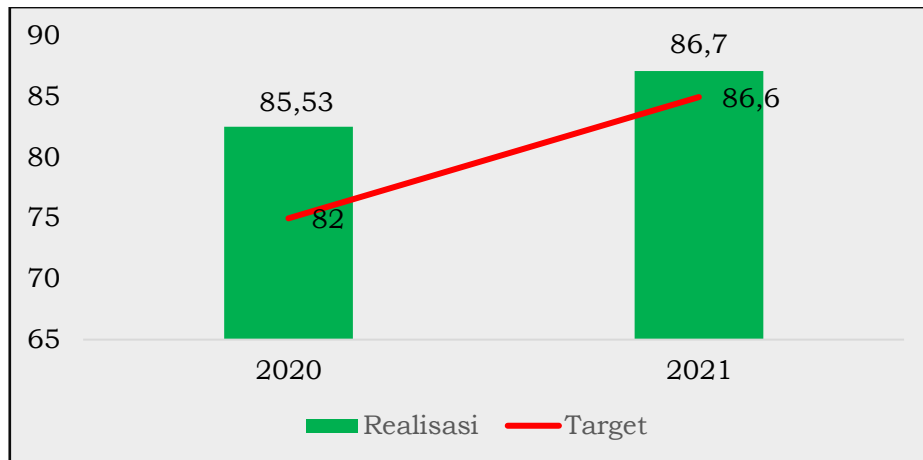
Tabel 14. Realisasi Indeks kepuasan masyarakat terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan BPOM di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta triwulan IV tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	TARGET TRIWULAN IV AHUN 2021	REALISASI	CAPAIAN TRIWULAN IV TAHUN 2021	KRITERIA
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	86.6	86.6	86.7	100.12	Baik

Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan public. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara

pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat.

b. Perbandingan realisasi tahun 2020 dengan tahun 2021



Pada triwulan IV tahun 2021, Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan sebesar 86,6. Dengan demikian nilai pencapaian sasaran indikator tersebut adalah sebesar 86,7% dengan kriteria Baik.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja antara lain adalah pembinaan penerapan CPPOB secara bertahap kepada UMKM di Bidang Pangan oleh petugas Balai Besar POM di Jakarta telah dengan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Cara Pengolahan Pangan yang Baik di DKI Jakarta. Melalui pendampingan secara berkesinambungan, diharapkan UMKM Pangan tersebut dapat menerapkan aspek-aspek CPPOB secara bertahap.

d. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

Rencana aksi yang dilakukan untuk mendukung tercapainya target indikator indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BBPOM di Jakarta adalah meningkatkan sarana dan prasarana untuk pelayanan publik yang ada. Untuk pengujian sampel pihak ketiga dilakukan untuk memaksimalkan layanan pengujian pihak ketiga agar tepat waktu dan memuaskan penerima layanan. Untuk layanan informasi terkait obat dan makanan dilakukan baik terhadap masyarakat yang datang langsung ke Kantor Balai Besar POM di Jakarta maupun terhadap masyarakat yang mencari informasi melalui telepon ataupun

media sosial seperti *instagram*, *facebook*, dan *twitter*. Layanan informasi melalui *Whatsapp* meningkatkan jumlah layanan informasi dan pengaduan di Balai Besar POM di Jakarta dan meningkatkan kecepatan respon yang diberikan. Respon yang cepat terhadap pertanyaan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kepuasan masyarakat atas layanan BBPOM di Jakarta

8. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

a. *Perbandingan target dan realisasi triwulan IV tahun 2021*

Tabel 15. Realisasi Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	TARGET TRIWULAN IV 2021	REALISASI	CAPAIAN TRIWULAN IV TAHUN 2021 (%)	KRITERIA
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	74.98	74.98	73.8	98.43	Baik

Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan adalah hasil pengukuran dari survei berupa angka dari hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat adalah konsumen Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, dan Makanan termasuk produk layanan yang diawasi BPOM. Indikator pembentuk terdiri atas 5 (lima) indikator, yaitu: (1) *Reliability*, kemampuan pengawasan Obat dan Makanan; (2) *Assurance*, kemampuan memberikan perlindungan; (3) *Tangible*, layanan informasi tentang keamanan produk; (4) *Empathy*, kepedulian atas kebutuhan masyarakat untuk produk yang aman; (5) *Responsiveness*, tindakan atas produk berbahaya. Lingkup pertanyaan kuesioner kepuasan masyarakat meliputi kepuasan terhadap kinerja dan layanan BPOM serta pertanyaan tambahan terkait Covid-19.

Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan merupakan kepuasan secara tidak langsung yang dirasakan oleh masyarakat karena terkait *outcome* kinerja BPOM. Pengukuran Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan dilakukan oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan (PRKOM) dengan menggunakan survei yang bersifat komposit skala Nasional dan Provinsi dengan metode *multistage cluster random sampling* dengan *margin of error* 10%. Hasil survei ini digunakan sebagai rekomendasi untuk peningkatan kinerja BPOM dalam melakukan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dan Pengawasan produk Obat dan Makanan.

Unit observasi adalah rumah tangga dengan menggunakan dua jenis kerangka sampel, yaitu kerangka sampel blok sensus dan kerangka sampel rumah tangga.

Kriteria yang digunakan adalah:

Kategori	Interval Indeks
Tidak Baik	< 45
Kurang Baik	45 – 60
Cukup Baik	60 – 75
Baik	75 – 90
Sangat Baik	≥ 90

Cara memperoleh nilai indeks dihitung dengan rumus:

$$\text{Indeks} = \frac{I_i - I_{\min}}{I_{\max} - I_{\min}} \times 100, \text{ dengan } i=1,2, \dots, n.$$

Keterangan

I_i = skor faktor ke- i

I_{\min} = skor faktor minimal

I_{\max} = skor faktor maksimal

n = banyaknya responden

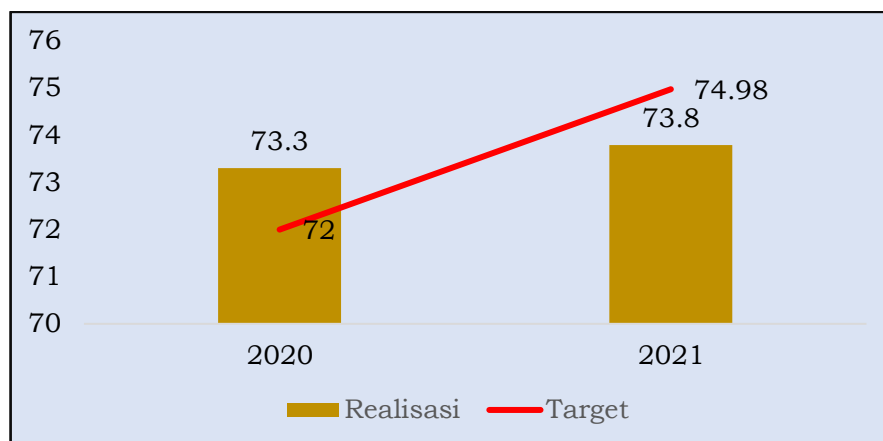
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021 diperoleh sebesar 73.8 (Cukup Baik). Jika dibandingkan dengan target sebesar 74.98, maka indeks tahun 2021 belum mencapai target dengan capaian sebesar 98.43 (kategori kinerja Baik). Hal ini dimungkinkan terjadi akibat pengetahuan masyarakat yang tinggi terkait Obat dan Makanan di masa pandemi Covid-19 yang berdampak pada ekspektasi yang meningkat terhadap jaminan keamanan produk.

Berdasarkan aspek penyusunnya meliputi aspek *reliability*, *responsiveness*, *assurance*, dan *empathy*, indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan

Makanan tertinggi diperoleh dari aspek *responsiveness* (tindakan atas produk berbahaya bagi kesehatan masyarakat) sebesar 74.83 (Cukup Baik), kemudian berturut-turut diikuti oleh aspek *reliability* (upaya pengawasan BPOM terhadap produk) sebesar 73.99 (Cukup Baik), aspek *empathy* (perhatian BPOM terhadap jaminan keamanan produk yang beredar di masyarakat) sebesar 73.47 (Cukup Baik) dan aspek terendah adalah *assurance* (kemampuan BPOM dalam melindungi masyarakat dari produk yang berbahaya) sebesar 72.93 (Cukup Baik).

Apabila dilihat per kategori produk, indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan tertinggi diperoleh dari produk Obat sebesar 74.58 (Cukup Baik) dan diikuti oleh produk Suplemen Kesehatan sebesar 74.11 (Cukup Baik), Obat Tradisional sebesar 73.39 (Cukup Baik), Kosmetik sebesar 73.29 (Cukup Baik) dan yang terendah adalah produk Pangan Olahan sebesar 73.17 (Cukup Baik).

a. *Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2021 dengan tahun 2020*



Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021 sebesar 73.8 (Cukup Baik) mengalami peningkatan sebesar 0.5 poin bila dibandingkan indeks tahun 2020 sebesar 73.3 (Cukup Baik). Jika dibandingkan dengan target tahun 2021 sebesar 74.98 diperoleh capaian kinerja sebesar 98.43% (kinerja Baik). Hasil ini menurun bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020 sebesar 101.81% (Kinerja Baik) dengan target sebesar 72. Hal ini kemungkinan disebabkan adanya peningkatan *baseline* target yang cukup signifikan di tahun 2021. Selain itu, terjadinya peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan Obat dan Makanan yang aman dan bermutu mempengaruhi peningkatan ekspektasi masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan terlebih di masa pandemi Covid-19.

c. *Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan*

Beberapa faktor penyebab capaian Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- 1) Kondisi pandemi Covid-19 secara tidak langsung menjadi salah satu faktor BPOM lebih dikenal masyarakat melalui informasi keamanan vaksin, pemberian izin EUA (*emergency used authorization*), informasi mengenai Obat Covid-19, Suplemen Kesehatan, dan Obat Tradisional untuk peningkatan daya tahan tubuh di masa pandemi dan penyediaan laboratorium untuk pengujian Covid-19 serta penyuluhan terkait perilaku hidup sehat di era *new normal*. Hal ini menyebabkan kesadaran masyarakat akan Obat dan Makanan yang aman dan bermutu meningkat serta diikuti oleh ekspektasi terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang tinggi.
- 2) Intensifikasi publikasi berbagai program pengawasan Obat dan Makanan melalui berbagai kegiatan, seperti pertemuan lintas sektor dalam rangka penguatan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah DKI Jakarta, konsultasi publik, pemanfaatan *subsite* dan media sosial melalui berita aktual dan infografis yang menampilkan informasi mengenai kinerja pengawasan yang lebih menarik.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Program/kegiatan yang menunjang tercapainya Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021 antara lain:

- 1) Penerapan inovasi peningkatan kinerja, seperti LAILA (Layanan Informasi dan Pengaduan melalui Aplikasi *Whatsapp*), None Sisi (Layanan Konsultasi Sertifikasi *Online*), Laron Baja (Verifikasi Lartas *Online* Kiriman melalui Bea Cukai Pasar Baru), Aripin (Asupan Rabuan Pintar) yang menyajikan infografis di media sosial BBPOM di Jakarta, Kerling Jakarta (Sertifikasi dan Layanan Informasi Keliling) dan Sultan Betawi (Loket konsultasi dan layanan informasi sertifikasi di Mall Pelayanan Publik DKI Jakarta) yang memberikan kemudahan masyarakat dalam menggunakan layanan yang ada di BBPOM di Jakarta sehingga masyarakat dapat merasakan dampak secara langsung dari kinerja pengawasan BBPOM di Jakarta.
- 2) Terselenggaranya program-program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, seperti intensifikasi pengawasan dan Razia Obat dan Makanan yang kedaluwarsa, tidak memiliki izin edar, dan produk ilegal serta program pemberdayaan masyarakat melalui program Prioritas Nasional keamanan pangan di wilayah DKI Jakarta, yaitu program Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, dan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS) yang langsung memberikan pembinaan dan bimbingan teknis praktik keamanan pangan kepada komunitas kelurahan, pasar, dan sekolah.

- e. *Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya*

Rekomendasi perbaikan kinerja sebelumnya meliputi penguatan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta mulai dari *pre-market* hingga *post-market control* yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*), penerapan dan peningkatan inovasi pelayanan publik untuk meningkatkan efektifitas KIE yang akan berdampak pada tingkat kepuasan dan kesadaran masyarakat akan Obat dan Makanan yang aman dan bermutu.

Sebagai tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja tersebut telah dilakukan berbagai upaya intensifikasi pengawasan *pre-market* hingga *post-market control*, program pemberdayaan masyarakat melalui berbagai program pembinaan, seperti fasilitasi UMKM, *desk* layanan sertifikasi, penerapan program pemberdayaan masyarakat melalui program prioritas nasional keamanan pangan, kemudahan akses layanan BBPOM di Jakarta melalui berbagai kanal baik tatap muka maupun non tatap muka.

Untuk dapat meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masa mendatang, diperlukan kegiatan publikasi yang lebih masif terkait berbagai program BBPOM di Jakarta yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dengan pesan utama untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan sehingga masyarakat mengetahui program pengawasan dan dapat merasakan dampak atas kinerja BBPOM di Jakarta dan pada akhirnya dapat meningkatkan kepuasan atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan.

9. Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

- a. *Perbandingan target dan realisasi triwulan IV tahun 2021*

Tabel 16. Realisasi Indeks kepuasan terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta triwulan IV tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	TARGET TRIWULAN IV TAHUN 2021	REALISASI	CAPAIAN TRIWULAN IV TAHUN 2021 (%)	KRITERIA
Indeks kepuasan terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	90	90	95.61	106.32	Baik

Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat.

Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada pedoman yang disiapkan Inspektorat Utama BPOM mengacu pada pedoman terkini (Saat ini PermenPAN No. 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik). Target dinyatakan dalam angka.

Indeks kepuasan Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta diperoleh melalui survei dengan metode *multi stage cluster random sampling* dengan *margin of error* 10% terhadap responden yaitu Kepala/Anggota Rumah Tangga dengan rentang usia 17 – 65 tahun.

Kriteria yang digunakan adalah:

Kategori	Interval Indeks
Tidak Baik	< 45
Kurang Baik	45 – 60
Cukup Baik	60 – 75
Baik	75 – 90
Sangat Baik	≥ 90

Cara memperoleh nilai indeks dihitung dengan rumus:

$$\text{Indeks} = \frac{I_i - I_{\min}}{I_{\max} - I_{\min}} \times 100, \text{ dengan } i=1,2, \dots, n.$$

Keterangan

I_i = skor faktor ke- i

I_{min} = skor faktor minimal

I_{maks} = skor faktor maksimal

n = banyaknya responden

Pengukuran Indeks kepuasan terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta dilakukan dengan survei yang dilakukan mulai 18 Februari s.d. 14 Juni 2021 terhadap 188 responden. Survei kepuasan masyarakat tahun 2021 pada Balai Besar POM di Jakarta dilakukan terhadap 2 (dua) jenis layanan, yaitu layanan pengujian (4 responden) dan layanan informasi dan pengaduan (184 responden).

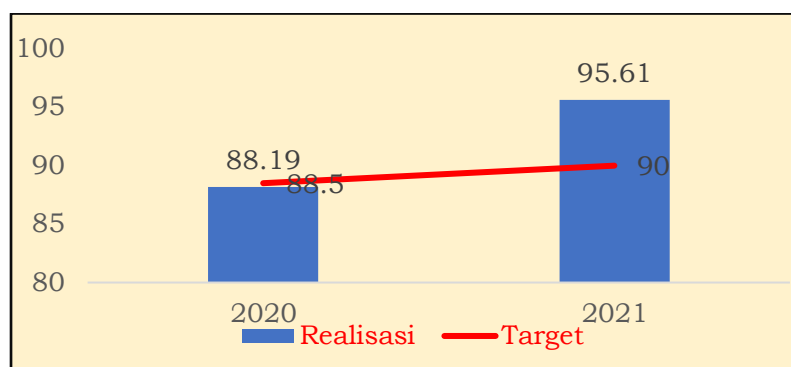
Hasil survei pengukuran Indeks kepuasan terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta diperoleh nilai sebesar 95.61 melebihi target nilai yang ditetapkan yaitu 90.00 sehingga diperoleh capaian target 106.23%. Berdasarkan nilai tersebut disimpulkan bahwa mutu layanan BBPOM di Jakarta mendapat kategori A (Sangat Baik). Nilai Survei Kepuasan Masyarakat per unsur pelayanan pada BBPOM di Jakarta sebagai berikut:

Unsur Pelayanan		Nilai
U1	Persyaratan	95.30
U2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	94.24
U3	Waktu Penyelesaian	95.45
U4	Biaya/Tarif	95.74
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	95.30
U6	Kompetensi Pelaksana	96.19
U7	Perilaku Pelaksana	96.81
U8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	96.10
U9	Sarana dan Prasarana	95.39
Nilai		95.61

Sedangkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat per jenis pelayanan dan per unsur pelayanan tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Jenis Pelayanan	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	Nilai SKM per Layanan
Pengujian	95.83	95.83	91.67	100.00	95.83	100.00	95.83	91.67	91.67	95.37
Layanan Informasi dan Pengaduan	95.29	94.20	95.53	95.65	95.29	96.11	96.83	96.20	95.47	95.62

b. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya



Indeks kepuasan terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021 sebesar 95.61 telah melampaui target kinerja sebesar 90.5 sehingga diperoleh capaian sebesar 105.65%. Nilai indeks meningkat sebanyak 7.42 dari nilai indeks tahun 2020 yaitu sebesar 88.19. Adapun nilai survei kepuasan masyarakat per unsur pelayanan pada BBPOM di Jakarta tahun 2020 dan 2021 sebagai berikut:

Unsur Pelayanan		2020	2021	Naik/Turun
U1	Persyaratan	84.65	95.30	10.65
U2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	84.82	94.24	9.42
U3	Waktu Penyelesaian	88.28	95.45	7.17
U4	Biaya/Tarif	88.12	95.74	7.62
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	87.29	95.30	8.01
U6	Kompetensi Pelaksana	91.09	96.19	5.1
U7	Perilaku Pelaksana	92.24	96.81	4.57

U8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	90.10	96.10	6.0
U9	Sarana dan Prasarana	87.13	95.39	8.26
Nilai		88.19	95.61	7.42

Dari unsur pelayanan di atas, unsur persyaratan memberikan kontribusi kenaikan terbesar dan unsur kompetensi pelaksana memberikan kontribusi paling kecil. Selain itu, dapat disimpulkan bahwa terjadi kenaikan pada semua unsur pelayanan.

c. *Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan*

Indeks kepuasan terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021 sebesar 95.61 dengan kategori A (Sangat Baik). Beberapa faktor penyebab keberhasilan dari pencapaian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan sosialisasi ke masyarakat tentang informasi layanan informasi dan pengaduan di BBPOM di Jakarta baik secara *online* maupun tatap muka. Pelayanan secara *online* terutama melalui *Whatsapp* dan media social (*Instagram, Facebook, dan Twitter*) meningkatkan kemudahan dan kecepatan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Hal ini terlihat dengan peningkatan jumlah layanan informasi dan pengaduan melalui media *Whatsapp*. Pelayanan yang cepat dan informasi yang benar juga membantu pelaku usaha untuk mengerti alur pengurusan nomor izin edar.
- 2) Optimalisasi implementasi rencana tindak lanjut hasil survei kepuasan masyarakat tahun 2020 terhadap seluruh layanan sesuai dengan saran/masukan yang dipergunakan sebagai acuan perbaikan layanan dan kebijakan layanan.
- 3) Peningkatan sarana dan prasarana BBPOM di Jakarta sebagai salah satu indikator peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima sehingga memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam menggunakan layanan yang mudah diakses dan transparan. Salah satu bentuk peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik BBPOM di Jakarta yaitu telah tersedianya loket yang terpisah untuk masing-masing jenis layanan dan ruangan tertutup khusus untuk pengaduan di *front office* sehingga mudah diakses. Hal ini juga merupakan salah satu perbaikan yang dilakukan

berdasarkan masukan hasil SKM tahun 2020 terkait pelayanan dan kenyamanan tempat yang semakin ditingkatkan serta jarak antara ruang layanan sehingga tidak mengganggu proses pelayanan yang berbeda.

- 4) Peningkatan layanan pengujian yang dapat disampaikan secara *online* melalui *Whatsapp* atau e-mail kepada petugas penerima sampel.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Indeks kepuasan terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021 antara lain:

- 1) Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) mandiri yang pelaporannya dilakukan setiap bulan serta monitoring dan evaluasi terhadap SKM mandiri yang dilakukan per triwulan sebagai bentuk pemantauan dan perbaikan yang bersifat terus-menerus guna memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
- 2) Pelaksanaan inovasi pelayanan publik Kerling Jakarta (Sertifikasi dan Layanan Informasi Keliling) dan Sultan Betawi (Loket konsultasi dan layanan informasi sertifikasi di Mall Pelayanan Publik DKI Jakarta) untuk memudahkan masyarakat dan pelaku usaha dalam memperoleh layanan sertifikasi dan layanan informasi obat dan makanan yang lebih mendekatkan layanan kepada masyarakat mengingat adanya masukan dari hasil SKM periode sebelumnya bahwa lokasi kantor BBPOM di Jakarta sulit untuk dijangkau.

e. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

Berdasarkan rekomendasi perbaikan hasil SKM tahun 2020 yang meliputi peningkatan pelayanan dan kenyamanan ruang pelayanan, telah dilakukan berbagai upaya tindak lanjut meliputi peningkatan sarana dan prasarana ruang pelayanan publik yang memenuhi standar unit pelayanan publik yang mudah diakses dan transparan serta penambahan alternatif masyarakat dalam mengakses layanan yang ada di BBPOM di Jakarta baik secara tatap muka dengan implementasi inovasi pelayanan publik Kerling Jakarta dan Sultan

Betawi serta layanan secara *online* baik layanan informasi dan pengaduan serta layanan pengujian melalui *Whatsapp*.

Adapun rencana tindak lanjut sebagai rekomendasi perbaikan hasil SKM periode selanjutnya terkait undur persyaratan, system, mekanisme, dan prosedur serta produk spesifikasi jenis pelayanan antara lain:

- 1) Peningkatan kompetensi petugas layanan, khususnya terkait teknik komunikasi yang baik sehingga aliran informasi dapat lebih persuasif.
- 2) Menyediakan sarana komunikasi yang memadai untuk memudahkan petugas dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat.
- 3) Melakukan kaji ulang terkait dokumen standar pelayanan publik secara internal dan melakukan dengar pendapat dengan pihak *stakeholder* untuk mendapatkan saran perbaikan.
- 4) Sosialisasi prosedur/alur layanan secara lebih luas kepada masyarakat menggunakan media sosial serta kanal informasi lain.
- 5) Melakukan kaji ulang terkait *timeline* yang ditetapkan secara internal.
- 6) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kesesuaian standar pelayanan dengan realisasi pelaksanaan pelayanan.

Dari pencapaian 3 target indikator pada sasaran strategis 3, maka dapat dihitung nilai pencapaian sasarannya (NPS) sebagai rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya.

$$\text{NPS} = \frac{\text{NPI 1} + \text{NPI 2} + \text{NPI 3}}{3}$$

$$\text{NPS} = \frac{100.12\% + 98.43\% + 106.23\%}{3}$$

$$\text{NPS} = 101,59\%$$

Dengan NPS 101.59%, maka Balai Besar POM di Jakarta berhasil mencapai sasaran Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4

10. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan IV tahun 2021

Tabel 11. Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta triwulan IV tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	TARGET TW IV 2021	REALISASI	CAPAIAN TW IV 2021 (%)	KRITERIA
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89	89	92.19	103.58	Baik

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi.

Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Yang dimaksud keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari:

- Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
- Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
- Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat

- Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:

Pelaku usaha;

Lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)

Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di Provinsi DKI Jakarta diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang dilaksanakan = $(A+B+C+D)/4$

- (1) Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

Cara perhitungan = $(\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT} / \text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}) \times 100\%$

- (2) Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

Cara Perhitungan = $(\text{Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT} / \text{jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh UPT}) \times 100\%$

- (3) Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain

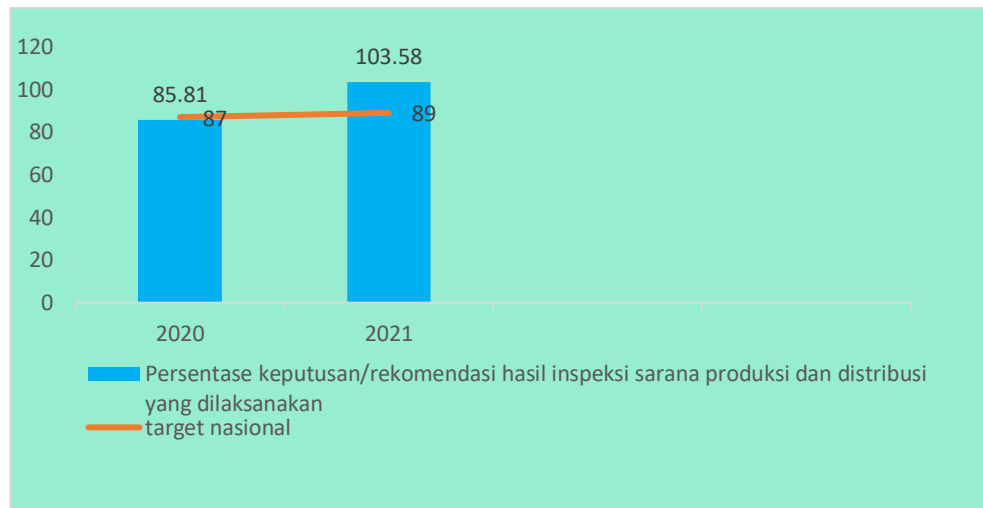
Cara Perhitungan = $(\text{Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain} / \text{jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}) \times 100\%$

- (4) Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

Cara Perhitungan = $(\text{Jumlah rekomendasi dari lintas sector terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UOT} / \text{jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait}) \times 100\%$

Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan sampai TW IV tahun 2021 masih kurang dari target yang ditetapkan dengan kriteria “baik”.

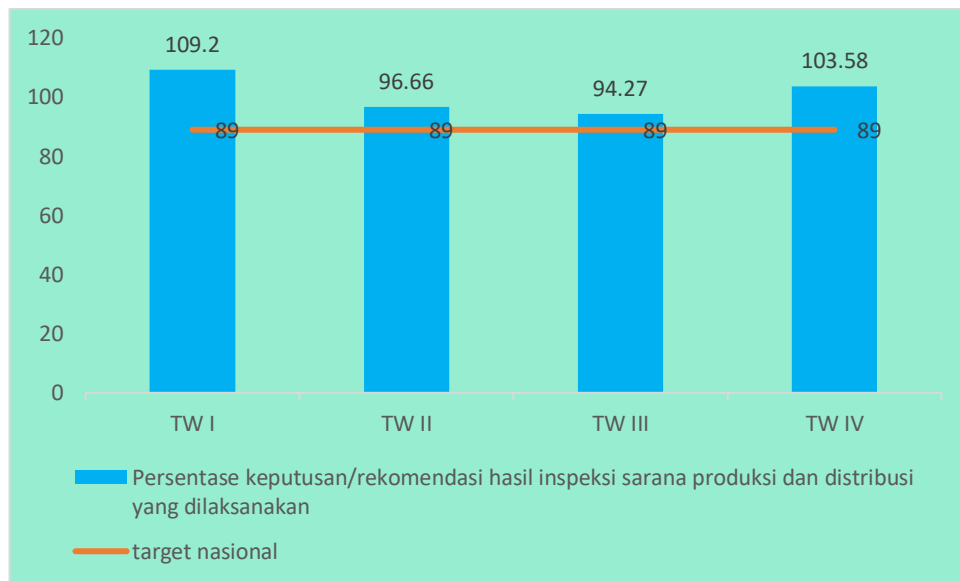
b. *Perbandingan Capaian Tahun 2021 dengan Tahun 2020*



Gambar 13. Perbandingan Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta antara Tahun 2020 dan 2021

Persentase capaian tahun 2020 sebesar 85.81 % dengan kriteria “cukup”, sedangkan persentase capaian tahun 2021 sebesar 103.58% juga dengan kriteria “Baik”. Capaian sampai TW IV tahun 2021 **lebih tinggi** dibandingkan tahun 2020 sehubungan dengan meningkatnya target yang ditetapkan sehingga tidak dapat dijadikan tolak ukur karena belum terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya.

c. *Perbandingan Capaian TW I, TW II, TW III dan TW IV Tahun 2021*



Gambar 14. Perbandingan Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta antara TW I, TW II, TW III dan TW IV tahun 2021

Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta pada TW IV **naik** dibandingkan dengan TW I, TW II dan TW III yakni dengan kriteria “Baik” (tetapi belum ada penurunan berarti dari TW I). Hal ini disebabkan meningkatnya respon dari Badan POM terhadap surat rekomendasi dari BBPOM di Jakarta.

d. *Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan*

Capaian indikator kinerja sudah melebihi target yang tersebut dipengaruhi oleh:

- Jumlah dan ketepatan waktu pengiriman surat tindak lanjut oleh BBPOM di Jakarta terhadap pelaku usaha yang melanggar / tidak sesuai ketentuan.
- Jumlah tindak lanjut dari BBPOM di Jakarta terhadap rekomendasi dari Pusat, sesama UPT, maupun pemangku kepentingan.
- Pusat semakin responsif terhadap rekomendasi dari BBPOM di Jakarta sehubungan dengan koordinasi lebih intensif dengan unit pusat tentang tindaklanjut dari rekomendasi Balai maupun Laporan dari Balai

e. *Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja*

- Balai Besar POM di Jakarta mempunyai Sistem si DOEL (Sistem (Spreadsheet) Data Online Pemantauan Sarana dan Tindak Lanjut). Pada system ini berupa form monitoring hasil pengawasan rutin, sehingga dapat dilakukan kontrol terhadap tindak lanjut yang telah/belum dilaksanakan oleh BBPOM di Jakarta.
- Adanya kontrol surat masuk dari Pusat, UPT lain, maupun lintas sektor sehingga dapat dikendalikan pelaksanaannya.
- Diperlukannya monitoring khusus untuk rekapitulasi respon dari pusat.

11. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan IV tahun 2021

Tabel 12. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	TARGET TW IV 2021	REALISASI	CAPAIAN TW IV 2021 (%)	KRITERIA
keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	75	75	78.02	104	Baik

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan.

Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:

pelaku usaha;

lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan

atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Tindak lanjut adalah *feedback/respon* dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

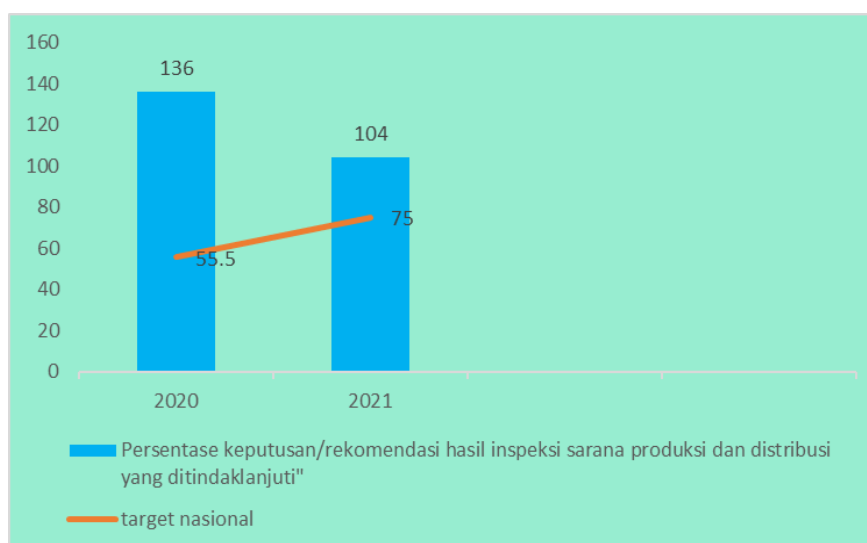
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan = $(A+B)/2$

$$A = \frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepalalintas sektor}} \times 100\%$$

Realisasi keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder di Provinsi DKI Jakarta sebesar 79,13% telah mencapai target yang ditetapkan yaitu lebih dari 60,20%. Untuk persentase capaian dari realisasi tersebut sebesar 131,44% dengan kriteria “Tidak Dapat Disimpulkan” karena melebihi dari 120% capaian.

b. *Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2021 dengan tahun 2020*

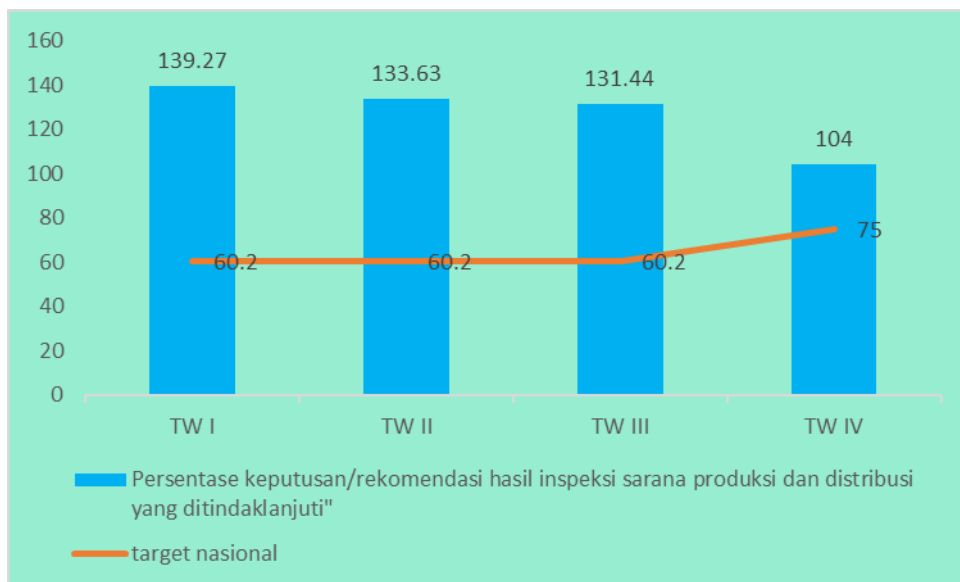


Gambar 15. Perbandingan Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta antara Tahun 2020 dan 2021

Persentase capaian TW IV tahun 2021 sebesar 104 % (realisasi 78.02% dari target 75%) dengan kriteria “BAIK”, sedangkan persentase capaian TW IV tahun 2020 sebesar 136 % juga dengan kriteria “TIDAK DAPAT DISIMPULKAN”.

Capaian TW IV tahun 2021 **lebih rendah** dibandingkan tahun 2020 tetapi penurunan tidak signifikan dan tidak dapat disimpulkan sehubungan dengan perbedaan target terbaru.

c. *Perbandingan capaian TW I, TW II, TW III dan TW IV tahun 2021*



Gambar 16. Perbandingan Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta TW I, TW II, TW III dan TW IV tahun 2021

Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta TW IV **menurun** dibandingkan dengan TW I, TW II, dan TW III. Pada TW IV Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan sudah melebihi target, dengan kriteria “BAIK” tetapi target tidak dapat dibandingkan dengan TW III dan triwulan sebelumnya dikarenakan adanya kenaikan target menjadi 75% dengan target sebelum 60,20%.

- d. *Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan*
- a. Semakin banyak jumlah respon dari pelaku usaha terhadap surat tindak lanjut yang dikirim BBPOM di Jakarta maka akan semakin tinggi capaian indikator kinerjanya.
 - b. Semakin banyak tindak lanjut yang dilaksanakan oleh lintas sektor maka akan semakin tinggi juga capaian indikator kinerjanya. Tindak lanjut lintas sektor terkait pembinaan sarana hanya untuk PIRT oleh Suku Dinas Kesehatan terkait, melalui aplikasi SMART-POM sebagai salah satu wadah komunikasi dengan BBPOM di Jakarta juga dengan BPOM pusat, sudah berjalan dengan baik sehingga semakin meningkatnya pembinaan yang dilakukan Suku Dinas Kesehatan terhadap sarana PIRT yang melanggar.
- e. *Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja*
- c. Semakin dioptimalkannya penggunaan Form CAPA yang diisi saat pemeriksaan retail kecil di pasar tradisional maupun pinggiran wilayah DKI Jakarta.
 - d. Mengirimkan surat tembusan tindak lanjut hasil pemeriksaan (hardcopy dan lewat email) kepada Suku Dinas Kesehatan dan lintas sektor terkait untuk segera melakukan pembinaan sarana.

12. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

- a. *Perbandingan target dan realisasi triwulan IV tahun 2021*

Tabel 17. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	TARGET TW IV 2021	REALISASI	CAPAIAN TW IV 2021 (%)	KRITERIA
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85	85	97.23	114.39	Sangat Baik

Keputusan penilaian sertifikasi mencakup:

- (1) Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT
- (2) Hasil Pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk
- (3) Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik
- (4) Surat rekomendasi pendaftaran produk pangan olahan dalam rangka mendapatkan nomor izin edar
- (5) Surat rekomendasi bagi sarana importir kosmetik dan usaha perorangan/badan usaha yang melakukan kontrak produksi kosmetik
- (6) Surat Rekomendasi obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT/SK
- (7) Sertifikat (Laporan Hasil Uji) hasil pengujian sampel pihak ketiga (sampel dari POLRI, Kementerian/Lembaga lain, pelaku usaha (termasuk UMKM), sampel *early warning system*)
- (8) Penerbitan persetujuan denah bangunan PBF

Yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati *timeline* yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian.

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu} = \frac{\text{Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah permohonan penilaian sertifikasi}} \times 100\%$$

Penilaian sertifikasi mencakup yang diselesaikan pada tahun berjalan dan *carry over* tahun sebelumnya

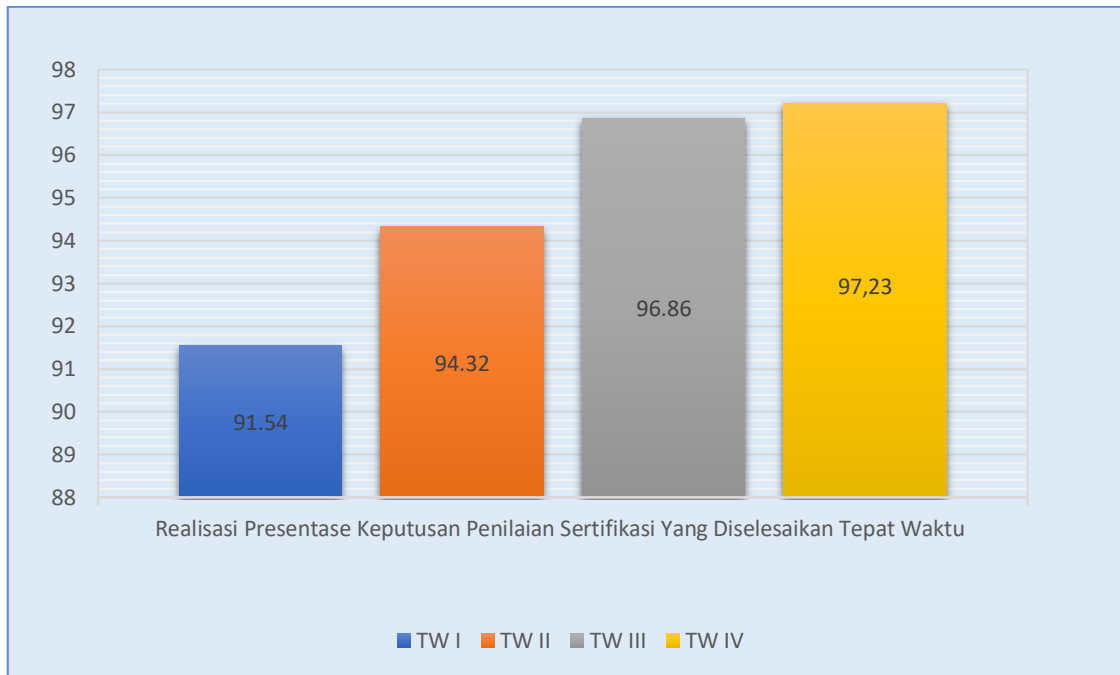
Capaian persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi DKI Jakarta sebanyak 97.23% dari target yang ditetapkan 85 %, jika dihitung terhadap target capaian sampai triwulan IV tahun 2021 sebesar 114.39% dengan kriteria “sangat baik”. Secara umum untuk hasil

capaian sampai triwulan IV ini, semua proses dalam rangka menerbitkan rekomendasi tidak melewati batas waktu yang telah ditetapkan.

Total seluruh keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan sampai dengan triwulan empat 2021 sebanyak 619 (enam ratus Sembilan belas). Keputusan yang tepat waktu sebanyak 609 (enam ratus Sembilan) yang memenuhi *timeline* yang telah ditetapkan dan sebanyak 10 (sepuluh) keputusan sertifikasi tidak tepat waktu. Sebanyak 619 (enam ratus Sembilan belas) keputusan merupakan kumulatif dari penyelesaian permohonan tahun 2020 dan 2021 yang terdiri dari 107 (seratus tujuh) keputusan yang berasal dari permohonan tahun 2020 dan 512 (lima ratus dua belas) keputusan yang berasal dari permohonan tahun 2021. Terdapat perbedaan definisi operasional pada keputusan Sertifikasi tahun 2021, yaitu, keputusan sertifikasi tahun 2020 adalah jumlah rekomendasi yang diterbitkan terhadap permohonan yang diterima tahun 2020, sedangkan keputusan sertifikasi tahun 2021 adalah jumlah permintaan tindakan perbaikan yang diterbitkan untuk permohonan yang diterima tahun 2021.

Sampai dengan triwulan keempat tahun 2021 terdapat 521 (lima ratus dua puluh satu) permohonan yang diterima di Balai Besar POM di Jakarta dan telah diterbitkan keputusan sebanyak 512 (lima ratus dua belas). Permohonan yang belum terbit keputusan disebabkan karena dilakukan berkas permohonan diterima di akhir bulan Desember 2021 dan direncanakan untuk dilakukan audit pada awal bulan Januari 2022, Adapun jumlah permohonan pengujian sampel sampai triwulan keempat 2021 sebanyak 54 (lima puluh empat) dan semuanya dapat diselesaikan tepat waktu

b. Perbandingan realisasi dan capaian TW I, TW II, TW III, dan TW IV Tahun 2021



Gambar 17. Realisasi persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi DKI Jakarta

a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu merupakan jaminan kepastian pelayanan yang diberikan oleh Balai Besar POM di Jakarta kepada pelaku usaha. Dalam memberikan keputusan penilaian sertifikasi yang meliputi surat rekomendasi dan surat hasil pemeriksaan produksi/distribusi dan surat permintaan perbaikan dalam rangka pendaftaran produk Obat dan Makanan, Balai Besar POM di Jakarta telah menetapkan batas waktu dari mulai diterimanya berkas permohonan hingga penerbitan surat rekomendasi/ surat hasil pemeriksaan dan surat permintaan perbaikan tersebut.

Pemenuhan batas waktu dalam memberikan keputusan penilaian sertifikasi dapat terhambat dengan keterbatasan sumber daya manusia. Tetapi hal ini dapat diatasi dengan subsidi tenaga dari subkelompok substansi inspeksi dan dari kelompok substansi infokom yang memiliki kompetensi audit.

b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Beberapa kegiatan di tahun 2021 yang menunjang keberhasilan pencapaian target persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu antara lain :

1. Fasilitasi UMKM Pangan secara simultan meningkatkan pemenuhan keputusan sertifikasi tepat waktu. Dengan adanya fasilitasi UMKM Pangan Olahan membuat proses yang terjadi pada UMKM lebih cepat. Bukan hanya rekomendasi yang tepat waktu untuk pemeriksaan sarana Balai akan tetapi izin edar produk Pangan MD juga dapat dipercepat diperoleh oleh pelaku usaha.
2. Percepatan pelayanan prima terus dilaksanakan di Balai Besar POM di Jakarta guna mempercepat perizinan berusaha di Indonesia dalam hal ini percepatan pemberian izin edar produk, percepatan penerapan cara produksi yang baik. Balai Besar POM di Jakarta sebagai salah satu institusi penyelenggara pelayanan publik, berkewajiban memberikan pelayanan publik yang berorientasi kepada masyarakat pengguna layanan oleh karenanya Balai Besar POM di Jakarta melaksanakan (*Desk CAPA*) bagi para pelaku usaha. Perusahaan yang kesulitan memenuhi kekurangan saat audit diundang untuk melakukan diskusi terkait perbaikan dengan masing-masing auditor sehingga pemenuhan kekurangan pada saat audit lebih cepat dan lebih efektif dan efisien. *Desk CAPA* sampai dengan triwulan keempat 2021 diselenggarakan pada 9 Februari 2021, 18 Juni 2021 dan 16 Setember 2021 yang diselenggarakan secara daring dan 16 Desember 2021 diselenggarakan secara luring. Diskusi ini diprioritaskan pada sarana yang dinilai mengalami kesulitan dalam penyelesaian perbaikan
3. Tantangan memberikan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan ramah tentunya telah menjadi tuntutan masyarakat kini. Balai Besar POM di Jakarta sangat menyadari hal ini dan perlu didukung oleh kompetensi yang mumpuni dari setiap orang yang bertugas

memberikan pelayanan publik. Untuk mendukung hal tersebut maka beberapa kali dilakukan pelatihan dan diseminasi oleh peserta pelatihan.

4. Terbitnya *e-book* Sertifikasi Komoditi Distribusi Kosmetik untuk memudahkan pelaku usaha mengakses informasi jika akan mengajukan permohonan rekomendasi baik sebagai importir kosmetik maupun sebagai pemberi kontrak produksi ke Balai Besar POM di Jakarta. E-book ini dapat diakses dan telah dipublikasikan oleh Balai Besar POM di Jakarta.
5. Kegiatan desk registrasi yang diselenggarakan bersama dengan Direktorat Registrasi Pangan Olahan pada tanggal 2 Maret 2021, 25 Juni 2021 dan 28 September 2021 dan 11 dan 12 November 2021 untuk membantu pelaku usaha dalam memperoleh nomor izin edar.
6. Pelayanan prima di Mall Pelayanan Publik Provinsi DKI Jakarta
Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka mendekatkan pelayanan publik yang dilakukan oleh BBPPOM di Jakarta kepada masyarakat. Masyarakat bisa datang ke both BBPPOM di Jakarta yang berada di Mall Pelayanan Publik untuk mendapatkan informasi terkait pendaftaran obat dan makanan
7. Pendampingan UMKM Bersama lintas sector
Kegiatan ini diselenggarakan untuk memberikan bimbingan teknis kepada pelaku usaha yang tergabung dalam jackpreneur. Adapun kegiatan tersebut adalah Kolaborasi dengan Dinas PPKUKM dalam penyelenggaraan bimbingan teknis kepada pelaku usaha yang tergabung dalam jackpreneur dan Bimbingan Teknis Kepada Bunda Bunda Jackpreneur maupun para pelaku usaha yang merupakan binaan Dinas dan Suku Dinas PPKUKM di 6 Wilayah DKI Jakarta.
8. Kegiatan Kerling Jakarta (Sertifikasi dan Informasi Keliling)
Kegiatan ini dilakukan untuk mendekatkan pelayanan konsultasi baik dalam rangka sertifikasi maupun pemberian informasi ke seluruh wilayah DKI Jakarta. Kegiatan ini diselenggarakan di lima wilayah DKI Jakarta, yaitu Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta selatan, Jakarta Timur dan Jakarta Utara

Kendala yang masih dialami Balai Besar POM di Jakarta yaitu:

1. Sebagian sarana pemahaman terhadap persyaratan masih rendah dan diiringi dengan komitmen untuk memahami kalau penerapan Cara Produksi yang baik rendah karena menganggap semua hal yang harus dilengkapi hanya sekedar persyaratan bukan untuk pemenuhan mutu dan keamanan produk yang dihasilkan.
2. Masih ada sarana yang menyelesaikan pemenuhan terhadap CAPA audit sertifikasi memerlukan waktu yang lama dan berulang kali karena keterbatasan kompetensi dan *awareness* dari pelaku usaha.
3. Kekurangan sumber daya dari petugas Balai POM di Jakarta juga membuat pelayanan kurang optimal karena beban kerja yang berlebih. Hal ini buktikan dengan peningkatan jumlah permohonan di tahun 2021, pada tahun 2020 jumlah permohonan yang masuk 290 sedangkan pada tahun 2021 jumlah permohonan yang diterima oleh Balai Besar POM di Jakarta adalah 521. Hal ini pulalah yang menyebabkan adanya putusan yang diterbitkan tidak tepat waktu.

Untuk peningkatan kinerja triwulan berikutnya akan dikembangkan beberapa hal :

- a. Akan terus dilakukan program *desk CAPA* yang dilakukan secara terprogram, maupun yang dilakukan secara individu oleh masing-masing auditor. Mengingat keterbatasan sumberdaya *desk CAPA* akan diselenggarakan secara daring. Adapun sasaran *desk CAPA* adalah sarana yang dinilai mengalami kesulitan dalam penyelesaian *CAPA*
- b. Untuk meningkatkan kompetensi dan penyamaan persepsi secara rutin akan dilakukan *sharing knowledge* antara petugas di Kelompok substansi Pemeriksaan dan Kelompok substansi Infokom
- c. Melakukan simpifikasi *SOP* dan dokumen atau formulir yang digunakan pada saat melakukan audit maupun pelaporan dan penerbitan keputusan sertifikasi dan penyesesuaian dengan peraturan terbaru

- d. Memperkuat sosialisasi tentang pentingnya mutu dan keamanan produk secara *online* dengan penerapan Cara Produksi dan Distribusi yang Baik
- e. Sistem terintegrasi dalam fasilitasi UMKM sehingga mempercepat proses fasilitasi UMKM.

13. Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta.

a. *Perbandingan target dan realisasi triwulan IV tahun 2021*

Tabel 18. Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	TARGET TW IV 2021	REALISASI	CAPAIAN TW IV 2021 (%)	KRITERIA
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	60	60	69.02	115	Sangat Baik

Sarana Produksi Obat

Sarana produksi Obat adalah sarana produksi obat, bahan baku obat, produk biologi dan sarana khusus (misalnya: unit transfusi darah, fasilitas radiofarmaka, laboratorium sel punca dan instalasi farmasi rumah sakit).

Memenuhi Ketentuan adalah apabila tidak ada temuan kritikal pada saat dilakukan pemeriksaan dan tindaklanjutnya berupa Perbaikan.

Sarana Produksi OT

Sarana produksi Obat Tradisional mencakup IOT, UKOT dan UMOT. Sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan apabila:

Untuk sarana IOT: tidak ada temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major.

Untuk sarana UKOT dan UMOT: tidak ada temuan kritis atau sanitasi higiene major.

Catatan: Pemeriksaan sarana UKOT dan UMOT akan menggunakan form yang berbeda dengan sarana produksi IOT

Sarana Produksi Kosmetik

Sarana produksi kosmetik mencakup Industri Kosmetik golongan A dan B.

Sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan apabila tidak ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major.

Sarana produksi Suplemen Kesehatan

Sarana produksi Suplemen Kesehatan mencakup IOT, UKOT (GMP), Industri Farmasi (Fasber) dan Industri Pangan.

Sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan apabila tidak ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major.

Sarana Produksi Pangan

Sarana produksi pangan mencakup sarana produksi MD dan IRTP/UMKM. Sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan apabila:

- a. Sarana produksi pangan MD yang memperoleh rating A dan B.
- b. Sarana produksi IRTP/UMKM memperoleh level 1 dan 2.

Catatan: Pemeriksaan sarana IRTP/UMKM menggunakan form pemeriksaan yang berbeda dengan sarana produksi (industri) pangan

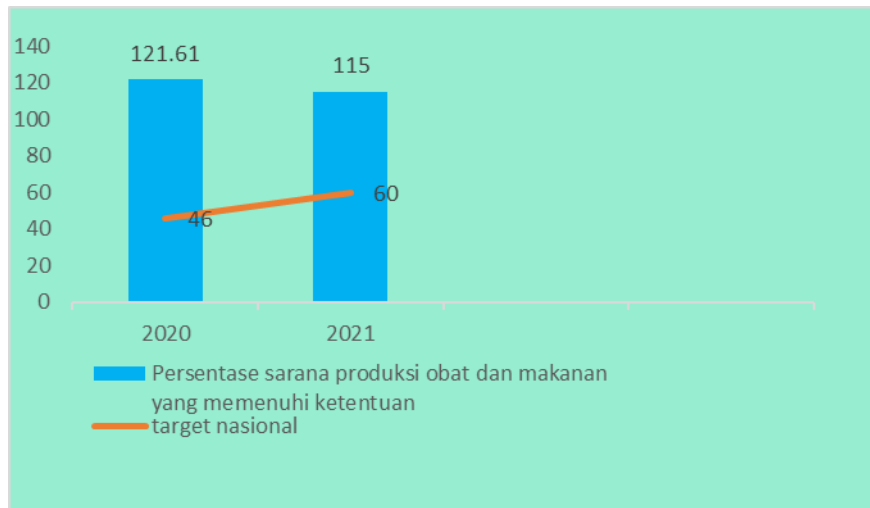
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Nilai Persentase} = \frac{\text{Jumlah Sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan}}{\text{Target jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritas berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa}} \times 100\%$$

Jumlah sarana produksi obat dan makanan yang diperiksa harus sama dengan jumlah sarana produksi obat dan makanan yang diprioritaskan.

Capaian persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta **telah melebihi target** yang ditetapkan yaitu 115 % dengan kriteria “**Sangat Baik**” tetapi hal ini belum dapat disimpulkan sehingga masih diperlukan data tambahan pada triwulan selanjutnya untuk bisa menyimpulkan hasil dari data yang sebenarnya.

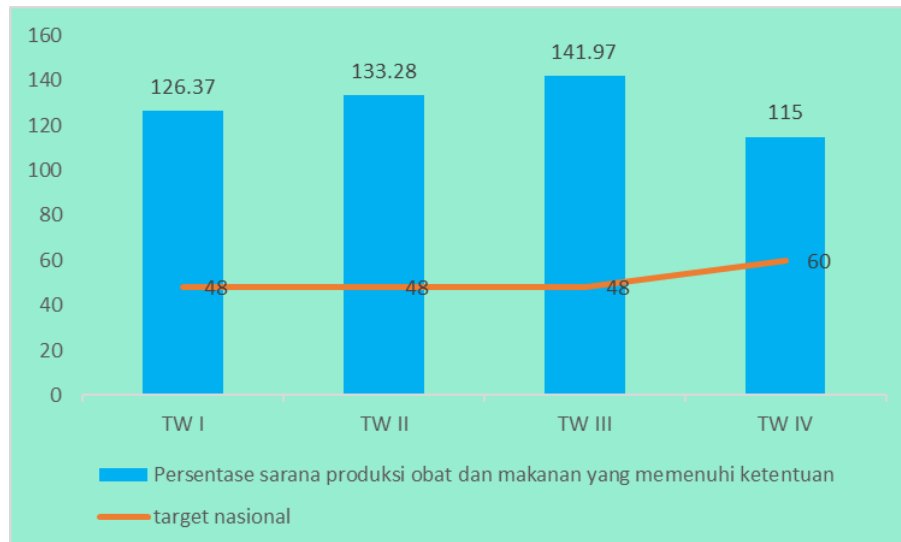
b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2021 dengan tahun 2020



Gambar 18. Perbandingan Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta antara Tahun 2020 dan 2021

Capaian tahun 2021 **lebih rendah** dibandingkan tahun 2020. Pada tahun sebelumnya realisasi persentase sarana memenuhi ketentuan cukup banyak dan juga meningkat pada tahun 2021 karena meningkatnya target yang ditetapkan.

c. Perbandingan capaian TW I, TW II, TW III, dan TW IV tahun 2021



Gambar 19. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta TW I, TW II, TW III, dan TW IV tahun 2021

Berdasarkan grafik tersebut diketahui persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta TW IV (kriteria “Sangat Baik”) **menurun** dibandingkan dengan TW I, TW II dan TW III (semua juga kriteria “Tidak Dapat Disimpulkan”). Hal ini disebabkan semakin meningkatnya sarana produksi yang “memenuhi ketentuan” yang diperiksa di bulan Oktober – Desember 2021.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan sebesar 115 % **sudah melebihi target** yang ditentukan. Hasil pemeriksaan sarana produksi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 18. Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan

NO	SARANA PRODUKSI	JUMLAH SARANA YANG DIPERIKSA	HASIL PEMERIKSAAN	
			MK	TMK
1.	Industri Farmasi	18	14	4
2.	Fasilitas Bahan Baku Obat/ Produk Biologi/Sarana Khusus (Unit Transfusi Darah, Radiofarmaka, Lab Sel Punca)	6	4	2
3.	Industri Obat Tradisional (IOT)	8	5	3
4.	Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA)	0	0	0
5.	Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	35	26	9
6.	Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	5	5	0
7.	Industri Farmasi (IF) yang memproduksi Suplemen Kesehatan	3	3	0
8.	Industri Obat Tradisional (IOT) yang memproduksi Suplemen Kesehatan	5	3	2
9.	Industri Pangan (IP) yang memproduksi Suplemen Kesehatan	0	0	0
10.	Industri Kosmetik	71	51	20
11.	Industri Pangan	111	85	26
12.	Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	64	29	35
TOTAL		326	225	101

Walaupun secara umum persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan **sudah melebihi target** yang ditentukan, tetapi terdapat sarana produksi yang tidak mencapai target indicator antara lain PIRT.

Kegagalan pencapaian target indikator persentase sarana produksi yang memenuhi ketentuan disebabkan oleh beberapa hal yaitu:

1. Dari uraian capaian pada tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian memenuhi ketentuan yang rendah banyak pada UMKM yaitu Industri Rumah Tangga Pangan.
2. Pemeriksaan sarana produksi UMKM tahun ini lebih banyak dibandingkan dengan tahun lalu.
3. Rendahnya kemampuan UMKM untuk memenuhi cara produksi yang baik dan menerapkan cara produksi yang baik pada sarana produksinya
4. Capaian memenuhi ketentuan lain yang masih kurang yaitu pada sarana IOT dan IOT yang memproduksi suplemen kesehatan, hal ini karena sarana tersebut masih belum melakukan aktivitas sesuai standar Cara Produksi Obat Tradisional Yang Baik, dimana masih diperlukan asistensi/pembimbingan/pembinaan untuk penerapan aspek aspek CPOTB.

Beberapa hal yang telah dilakukan oleh Balai Besar POM di Jakarta dalam mengatasi masih rendahnya sarana yang memenuhi ketentuan adalah:

1. Melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait pembinaan Industri Rumah Tangga Pangan sehingga konsisten dalam penerapan cara produksi yang baik.
2. Melakukan pertemuan secara intens dengan Dinas Penanaman Modal dan PTSP untuk menegaskan lagi agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan pemberian ijin sarana terutama untuk Industri Rumah Tangga Pangan sehingga yang diberi Ijin adalah yang bebnar-benar memenuhi kriteria sarana produksi Industri Rumah Tangga Pangan, misalnya untuk produk yang tidak bisa diproduksi oleh Industri rumah tangga pangan seperti olahan daging, *frozen food*, minuman untuk tidak dikeluarkan lagi ijin PIRTnya dan diarahkan untuk mendaftarkan produk ke Badan POM untuk mendapatkan MD sehingga pengendalian cara produksi yang baik akan meningkatkan jumlah sarana yang memenuhi ketentuan.

Kendala dan permasalahan yang dihadapi Balai Besar POM di Jakarta dalam pemenuhan target *output*:

- ✓ Belum adanya form pemeriksaan khusus untuk UMKM dan form pemeriksaan sarana produksi pangan sama untuk semua jenis kategori pangan sehingga menyulitkan pemenuhan untuk sarana UMKM. Hal ini dari 2 tahun terakhir sudah diusulkan untuk revisi form 166 pemeriksaan sarana produksi pangan. Telah ada solusi dan inovasi dari Direktorat Pengawasan Pangan Resiko Rendah dan Sedang untuk membuat form 62 untuk UMKM akan tetapi form ini belum dapat diimplementasikan karena belum final dan belum disahkan.
- ✓ Kemampuan Sumberdaya dalam jumlah dan kualitas pembinaan oleh Lintas Sektor terkait masih terbatas dan bervariasi dari setiap wilayah.

e. *Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja*

Kegiatan pengawasan sarana produksi obat dan makanan yang dilaksanakan adalah pemeriksaan sarana industri farmasi (CPOB), industri kecil obat tradisional (IKOT), industri obat tradisional (IOT), industri kosmetik, industri pangan, dan industri rumah tangga pangan (IRTP). Beberapa kegiatan lain yang diupayakan untuk meminimalisasi kegagalan pencapaian kinerja antara lain :

- Pelatihan peningkatan kompetensi petugas Balai Besar POM di Jakarta, antara lain pelatihan aspek aspek CPOB dan pelatihan lainnya. Dengan meningkatnya kompetensi petugas Balai Besar POM di Jakarta, maka hasil pemeriksaan sarana produksi juga lebih berkualitas.
- Pembinaan kepada pelaku usaha (*regulatory assistance*), penerapan sanksi (proses projustitia maupun administratif) sesuai ketentuan yang berlaku terhadap sarana produksi obat dan makanan yang melakukan pelanggaran.
- *Desk CAPA (corrective action preventive action)* atas hasil pemeriksaan akan membantu pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan

f. *Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya*

Berdasarkan hasil rekomendasi, maka indikator ini diubah menjadi pesentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan supaya lebih menggambarkan kinerja Balai Besar POM di Jakarta. Di triwulan 3 tahun 2021, capaian melebihi dari target yang ditetapkan, tetapi dengan kriteria "Tidak

Dapat Disimpulkan”. Sehingga dengan hasil ini sebenarnya belum memberikan gambaran nyata keberhasilan indikator kinerja.

14. Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta.

a. *Perbandingan target dan realisasi triwulan IV tahun 2021*

Tabel 19. Realisasi Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	TARGET TW IV 2021	REALISASI	CAPAIAN TW IV 2021 (%)	KRITERIA
Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	73	73	79.21	108.5	Baik

Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ Sarana Distribusi MK} = \frac{\text{Jumlah Sarana distribusi OM yang memenuhi ketentuan}}{\text{Jumlah sarana distribusi OM yang diperiksa}} \times 100\%$$

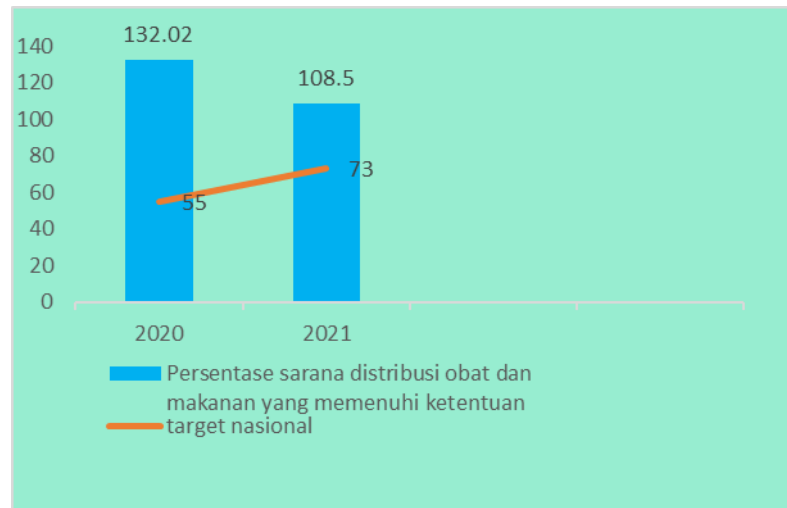
Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin).

Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian resiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada:

- (1) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat
- (2) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi OT, Kos dan SK
- (3) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi pangan
- (4) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Fasilitas Distribusi Obat/Bahan Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian

Capaian persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta sudah melebihi target yang ditetapkan yaitu 108.5% dengan kriteria “Baik”.

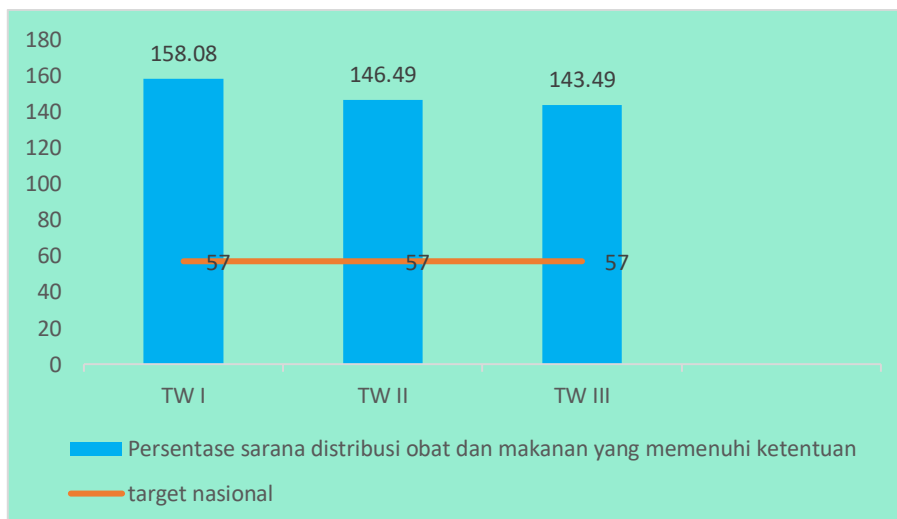
b. *Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2021 dengan tahun 2020*



Gambar 20. Perbandingan Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta antara Tahun 2020 dan 2021

Penetapan definisi operasional baru sesuai Reviu Renstra 2020-2024 tentang kriteria memenuhi ketentuan pada pemeriksaan sarana distribusi obat menyebabkan realisasi tahun 2021 **meningkat** dibandingkan tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa Balai Besar POM di Jakarta **berhasil meningkatkan** persentase pemeriksaan sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan sehingga melebihi target nasional.

c. *Perbandingan capaian TW I, TW II, TW III dengan TW IV tahun 2021*



Gambar 19. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta TW I, TW II, TW III dan TW IV tahun 2021

Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta sampai TW IV tahun 2021 telah mencapai target yang ditetapkan, serta dapat diketahui bahwa persentase pada TW IV **mengalami penurunan** dibandingkan dengan TW I, TW II dan TW III (berkriteria “Tidak Dapat Disimpulkan”). Hal ini dipengaruhi oleh makin meningkatnya kepatuhan pelaku usaha sarana distribusi obat dan makanan dalam mematuhi regulasi yang ada, tetapi belum dapat disimpulkan sehubungan adanya kenaikan target di TW IV.

d. *Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan*

Balai Besar POM di Jakarta berhasil mencapai target sarana distribusi obat, obat tradisional dan pangan yang memenuhi ketentuan. Hasil pemeriksaan sarana distribusi obat dan makanan adalah sebagai berikut :

Tabel 20. Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan Tahun 2021 s/d Triwulan IV di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jakarta

NO	SARANA DISTRIBUSI	JUMLAH SARANA YANG DIPERIKSA	HASIL PEMERIKSAAN	
			MK	TMK
1.	Pedagang Besar Farmasi (PBF)	113	75	38
2.	Apotek	120	71	49
3.	Toko Obat	37	23	14
4.	Instalasi Sediaan Farmasi/Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)	13	11	2
5.	Rumah Sakit (RS)	59	57	2
6.	Puskemas	280	278	2
7.	Klinik	52	31	21
8.	Lain-lain (Praktek Dokter dan Bidan)	0	0	0
9.	Fasilitas Distribusi Obat Tradisional	141	110	31
10.	Fasilitas Distribusi Suplemen	31	23	8
11.	Fasilitas Distribusi Kosmetik	199	173	26
12.	Fasilitas Distribusi Pangan	355	257	98
TOTAL		1400	1109	291

Beberapa hal yang menunjang keberhasilan pencapaian target persentase distribusi obat yang memenuhi syarat adalah:

- Mulai diberlakukannya aturan yang mengharuskan PBF mempunyai sertifikat Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB), sehingga pihak sarana berupaya untuk memenuhi persyaratan CDOB yang ditetapkan secara maksimal.
- Kesadaran pelaku usaha terhadap kepatuhan terhadap peraturan meningkat
- Pembinaan kepada pelaku usaha (*regulatory assistance*), penerapan sanksi (proses projustitia maupun administratif) sesuai ketentuan yang berlaku terhadap sarana distribusi obat yang melakukan pelanggaran antara lain menjual produk obat yang tidak memenuhi ketentuan.
- Pemeriksaan untuk saryanfar (Puskesmas, Klinik, RS) sebagian besar adalah pemeriksaan intensifikasi vaksin Covid-19, mengingat masa pandemic ini diperlukan pengawasan khusus terhadap sarana penyimpanan dan pelayanan vaksin Covid-19 untuk menunjang keberhasilan program vaksinasi Covid-19 agar mutu dan khasiatnya terjaga.

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk lebih meningkatkan jumlah sarana yang memenuhi ketentuan:

- a. Peningkatan pembinaan terhadap sarana distribusi yang ada dan menerapkan sanksi yang lebih tegas seperti jika masih ditemukan apotek yang melakukan penjualan obat Covid-19 (Ivermectin dll) tanpa resep dokter diberikan sanksi PSK (Penghentian Sementara Kegiatan).
- b. Pembinaan kepada stakeholder misalnya fasilitasi pelatihan terkait distribusi CCP (vaksin) dan pelatihan lain.

Kendala dan permasalahan yang dihadapi Balai Besar POM di Jakarta dalam pemenuhan target *output*:

- ✓ Masih ditemukan sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian yang melakukan distribusi dan pengadaan obat antar apotek, misalnya jaringan apotek Kimia Farma.
- ✓ Kurangnya pengetahuan pelaku usaha seperti toko obat dan sarana distribusi retail terkait peraturan yang berlaku

Usulan kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2021 dan tahun-tahun berikutnya:

1. Memaksimalkan penerapan system online yang ada sehingga kendala Sumber Daya dapat diatasi.
2. Evaluasi lebih konsisten setiap bulan dan tindakan perbaikan dan kegiatan pencegahan terhadap pencapaian *output*.

e. *Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja*

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan antara lain :

- Pelatihan peningkatan kompetensi petugas Balai Besar POM di Jakarta, antara lain Pelatihan aspek aspek Cara Distribusi Obat yang Baik. Dengan meningkatnya kompetensi petugas Balai Besar POM di Jakarta, maka hasil pemeriksaan sarana distribusi lebih berkualitas.
- Pembinaan kepada pelaku usaha (*regulatory assistance*), penerapan sanksi (proses *projustitia* maupun administratif) sesuai ketentuan yang berlaku terhadap sarana distribusi obat yang melakukan pelanggaran.
- Sistem dalam penetapan target pemeriksaan yang lebih tepat dengan menggempur pendistribusian dari sarana legal ke sarana illegal.

f. *Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya*

Berdasarkan hasil rekomendasi, maka indikator ini diubah menjadi pesentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan supaya lebih menggambarkan kinerja Balai Besar POM di Jakarta. Di triwulan IV tahun 2021, capaian sudah melebihi target yang ditetapkan. Namun demikian, hasil ini belum memberikan gambaran nyata keberhasilan indikator kinerja.

15. Indeks pelayanan publik di lingkup Balai Besar POM di Jakarta

a. *Perbandingan target dan realisasi tahun 2021*

Tabel 3. Realisasi indeks pelayanan publik di lingkup BBPOM di Jakarta tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	TARGET TRIWULAN IV TAHUN 2021	REALISASI	CAPAIAN TRIWULAN III TAHUN 2021 (%)	KRITERIA
Indeks pelayanan publik di lingkup Balai Besar POM di Jakarta	4.20	4.20	4.54	108.10	BAIK

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

- 1) Kebijakan Pelayanan (bobot 30%);
- 2) Profesionalitas SDM (18%);
- 3) Sarana Prasarana (15%);
- 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%);
- 5) Konsultasi dan Pengaduan (15%);
- 6) Inovasi (7%).

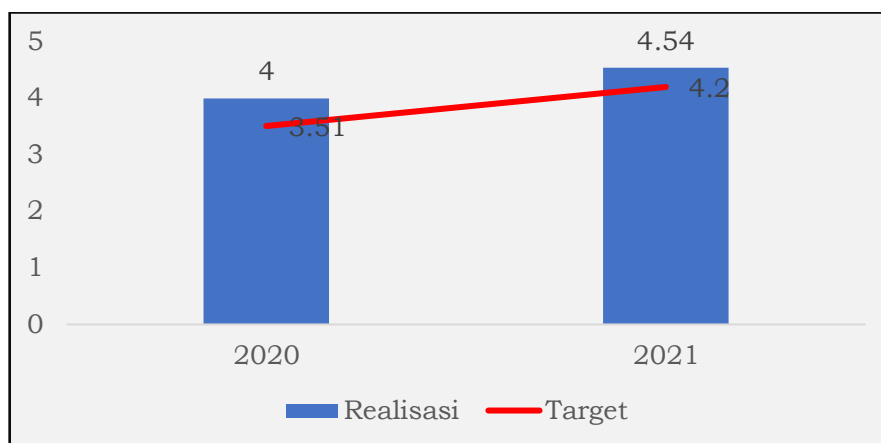
Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Penilaian dilakukan oleh Tim Penilai UPP BPOM, dengan kategori nilai sebagai berikut:

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup (dengan catatan)
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik (dengan catatan)
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

Berdasarkan hasil penilaian internal kinerja UPP BPOM yang telah dilaksanakan pada periode Mei-Juni 2021, Indeks Pelayanan Publik (IPP) Unit

Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) BBPOM di Jakarta diperoleh sebesar 4.54 (A/ Pelayanan Prima). IPP yang diperoleh BBPOM di Jakarta telah melampaui target tahun 2021, yaitu 4.20 dengan capaian 108.10%, sehingga diperoleh kinerja dengan kriteria sangat baik. Dengan hasil ini, BBPOM di Jakarta telah berhasil mencapai Pelayanan Prima dan menjadi 5 (lima) besar UPP BPOM terbaik tahun 2021 setelah BBPOM di Denpasar, Direktorat Registrasi Pangan Olahan, Biro Hukum dan Organisasi, dan BBPOM di Yogyakarta.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2021 dengan tahun 2020



Gambar 2 Perbandingan realisasi dan capaian indeks pelayanan publik di lingkup Balai Besar POM di Jakarta tahun 2020 dan 2021

Indeks pelayanan publik (IPP) di lingkup Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021 sebesar 4.54 (Pelayanan Prima) meningkat secara signifikan dari tahun 2020 sebesar 4.00 (Baik). Realisasi IPP tahun 2021 ini telah melampaui target sebesar 4.20 dengan capaian sebesar 108.10% (kategori Baik). Begitu pula capaian tahun 2020 juga telah melampaui target sebesar 3.51 dengan capaian 113.96% (kategori Sangat Baik).

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Keberhasilan capaian Indeks Pelayanan Publik di lingkup Balai Besar POM di Jakarta pada tahun 2021 ini hingga memperoleh Pelayanan Prima dengan nilai 4.54 dapat disebabkan oleh beberapa upaya yang telah dilakukan sebagai berikut:

- Pada aspek kebijakan layanan, SK standar pelayanan telah mencakup 14 komponen sesuai dengan Permenpan RB No 15 tahun 2014 tentang

Pedoman Standar Layanan dan juga sudah mencakup seluruh layanan, meliputi Layanan Pengujian Sampel Obat dan Makanan Pihak Ketiga, Layanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat, dan Layanan Sertifikasi.

- Sudah tersedianya sistem antrian elektronik dibagi untuk setiap jenis layanan, nomor antrian sudah ditampilkan di layar, diarahkan ke loket yang dituju serta dipandu dengan pengeras suara.
- Penyusunan Standar Pelayanan sudah melibatkan *stakeholders* (lurah, akademisi, dan pelaku usaha) serta telah memanfaatkan hasil masukan survei kepuasan masyarakat (SKM) dalam proses penyusunannya.
- Standar pelayanan sudah dipublikasikan di area ruang pelayanan (berupa *leaflet*/brosur/poster/*banner*, buku saku/katalog), baliho di kelurahan, media cetak koran, *subsite* serta media sosial.
- Maklumat pelayanan telah dipublikasikan dalam bentuk poster, *banner*, buku saku/katalog, media cetak koran, *subsite*, media sosial dan di ruang terbuka publik.
- Pengisian SKM oleh seluruh pengguna layanan baik secara langsung dan/ atau *online* baik yang permohonannya disetujui maupun ditolak.
- Informasi hasil SKM telah diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat di berbagai tempat dan media informasi (media sosial, *subsite*, baliho/*banner*, *leaflet*, buku saku/katalog, media cetak koran).
- Telah dilakukan SKM secara mandiri, hasil SKM dan bentuk saran serta rekomendasi telah ditindaklanjuti dan digunakan sebagai acuan perbaikan layanan dan kebijakan layanan.
- Telah dibuat SK tim layanan publik yang dikelompokkan berdasarkan jenis layanan dan profilnya dapat diakses di *subsite*.
- Adanya jam kerja layanan harian dari 08.00-16.00 tanpa jeda waktu istirahat dengan sistem istirahat bergilir tanpa menghentikan pelayanan publik saat istirahat serta adanya layanan konsultasi *extra time* pada hari libur/malam hari melalui media sosial (Instagram dan Twitter).
- Pelaksana layanan sudah dilengkapi dengan pakaian seragam khusus, identitas nama, PIN/atribut/logo unit pelayanan dan mempraktikkan 5S (Sambut dengan Senyum dan Salam didasari Semangat untuk memberikan Solusi).

- Sudah tersedia sarana prasarana khusus untuk kelompok rentan/penyandang difabel, berupa area parkir khusus, kursi roda, loket khusus, toilet khusus dan petugas layanan khusus).
- Sudah lengkapnya fasilitas toilet yang mencakup toilet terpisah antara pria dan wanita serta ada pilihan kloset duduk maupun jongkok dilengkapi wastafel dan toiletres.
- Telah tersedianya ruang layanan khusus yang tertutup untuk pengaduan masyarakat yang terpisah dari loket pelayanan lainnya di bagian depan kantor sehingga mudah diakses.
- Informasi pengelolaan dan pengaduan, buku *Q&A* konsultasi dan *e-book* sertifikasi sudah tersedia di *subsite* dan dapat diakses oleh masyarakat secara mudah.
- Telah tersedia informasi non elektronik yang mendukung pelayanan yang diketahui seluruh lapisan masyarakat berupa *leaflet*, *banner* yang dipublikasikan di ruang publik dan didistribusikan ke *stakeholder* berupa perpustakaan daerah, kantor pemerintah lainnya, seperti kantor kelurahan, kantor walikota, kantor suku dinas kesehatan.
- Adanya inovasi pelayanan publik yang telah dilaksanakan lebih dari 1 (satu) tahun dan dapat direplikasi, yaitu Laron Baja (Verifikasi Lartas *Online* Kiriman melalui Bea Cukai Pasar Baru).

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kegiatan

Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indeks pelayanan publik di lingkup Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021 hingga mencapai Pelayanan Prima, antara lain:

- Penambahan jenis layanan berupa Layanan Sertifikasi ke dalam Standar Pelayanan BBPOM di Jakarta sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
- Pelaksanaan monev pengaduan dan SKM mandiri yang dilakukan secara rutin tiap Triwulan dan bulanan sebagai acuan dalam perbaikan standar pelayanan secara terus-menerus.
- Intensifikasi pemanfaatan subsite dan media sosial sebagai sarana publikasi dan layanan yang tidak terbatas waktu dan tempat.

- Peningkatan kualitas sarana prasarana berupa renovasi ruang layanan, pembangunan toilet yang memadai, pengadaan mesin antrian elektronik serta fasilitas kantin dan ATK untuk pengguna layanan.
- Peningkatan inovasi pelayanan publik agar dapat diterapkan secara optimal untuk memberikan kemudahan masyarakat dalam menerima layanan publik di lingkungan Balai Besar POM di Jakarta, seperti LAILA (layanan informasi dan pengaduan melalui aplikasi Whatsapp), None Sisi (Layanan Konsultasi Sertifikasi Online), Laron Baja (Verifikasi Lartas *Online* Kiriman melalui Bea Cukai Pasar Baru), e-book sertifikasi, Kerling Jakarta (Kegiatan Sertifikasi dan Layanan Informasi Keliling BBPOM Jakarta) dan layanan permohonan pengujian yang sudah dapat dilakukan secara *online* melalui *Whatsapp* maupun *e-mail*.
- Pelatihan Penerapan Budaya Prima kepada seluruh pegawai yang dilakukan dengan metode *hybrid* (kombinasi luring dan daring) dengan tema “*Customer Service Excellent Mindset and Implementation*” pada 9 April 2021.

e. *Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya*

Indeks pelayanan public tahun 2021 ini berhasil meningkat secara signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2020 dan telah tercatat sebagai keberhasilan BBPOM di Jakarta meraih pelayanan prima. Adapun evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode tahun 2020, meliputi:

- **Aspek Kebijakan Pelayanan**

Rekomendasi yang terkait meliputi monev terhadap Standar Pelayanan, pemanfaatan masukan hasil monev pengaduan masyarakat dalam penyusunan Standar Pelayanan Publik dan pemasangan Standar Pelayanan Publik yang dapat dibaca dengan mudah di ruang pelayanan berupa leaflet/banner, media cetak dan *website*.

Tindak lanjut dari rekomendasi ini sudah dilaksanakan seluruhnya, yaitu sudah dilakukannya monev Standar Pelayanan dengan memanfaatkan masukan saran dari hasil SKM, standar dan maklumat pelayanan pun sudah dipublikasikan berupa leaflet/brosur/poster/banner, buku saku/katalog, baliho, media cetak koran, subsite, dan media sosial serta telah dipublikasikan di ruang pelayanan publik dan area terbuka.

- **Aspek Profesionalisme SDM**

Rekomendasi yang terkait aspek ini meliputi implementasi penggunaan atribut berupa PIN/logo Unit Pelayanan serta profil pelaksana yang dipublikasi di ruang pelayanan dan data dukung penerapan kode etik pelayanan dan penerapan sanksi yang telah ditetapkan.

Tindak lanjut yang telah dilakukan meliputi sudah dilengkapinya pelaksana layanan dengan pakaian seragam khusus, identitas nama, PIN/atribut/logo unit pelayanan dan mempraktikkan 5S (Sambut dengan Senyum dan Salam didasari Semangat untuk memberikan Solusi), profil pelaksana layanan juga sudah dipublikasi di ruang pelayanan dan *subsite*.
- **Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik**

Rekomendasi berupa *subsite* UPP BPOM dilengkapi dengan unsur profil penyelenggara, pelaksana, standar pelayanan, maklumat pelayanan, pengelolaan pengaduan dan penilaian kinerja lembaga serta data sistem informasi pendukung operasional pelayanan publik berupa sistem data informasi pelayanan yang mengacu *subsite*, aplikasi proses bisnis mengacu qms.pom.go.id, sistem pengelolaan pengaduan mengacu Simpel LPK, SKM mengacu Simolekdesi, dan SDM mengacu SIASN.

Tindak lanjut yang telah dilakukan meliputi pemutakhiran data sistem informasi pelayanan publik di *subsite* yaitu informasi terkait standar pelayanan, maklumat pelayanan, profil pelaksana layanan, pengelolaan dan pengaduan, buku Q&A konsultasi dan e-book sertifikasi sudah tersedia di *subsite* dan dapat diakses oleh masyarakat secara mudah.
- **Aspek Konsultasi dan Pengaduan**

Rekomendasi berupa penambahan data dukung dokumen/arsip untuk tamu yang datang langsung serta rekapitulasi hasil pengaduan sehingga mudah diakses oleh masyarakat.

Tindak lanjut yang telah dilakukan berupa telah tersedianya buku katalog di ruang pelayanan yang berisi standar pelayanan, maklumat pelayanan, hasil SKM, data pengaduan sehingga mudah untuk diakses tamu yang datang langsung.
- **Aspek Inovasi**

Rekomendasi berupa implementasi inovasi secara terus-menerus dan monev berkelanjutan untuk menilai dampaknya terhadap masyarakat dan selanjutnya dapat direplikasi serta diikutsertakan dalam Kompetisi Pelayanan Publik dan/ atau penghargaan lainnya.

Tindak lanjut yang telah dilakukan ialah implementasi inovasi Laron Baja (Verifikasi Lartas *Online* Kiriman melalui Bea Cukai Pasar Baru) sebagai inovasi yang telah diterapkan dan dimanfaatkan masyarakat selama lebih dari 1 (satu) tahun secara berkelanjutan dan sedang dalam proses untuk direplikasi oleh unit BPOM lainnya.

Selain itu, terdapat pula rekomendasi baru untuk peningkatan kinerja periode berikutnya, meliputi:

- Perlu dibuat laporan implementasi penilaian pemberian *reward* dan *punishment* tiap bulannya.
- Perlunya surat edaran mengenai seragam Senin sampai dengan Jumat bagi pegawai dan petugas pelayanan publik BBPOM di Jakarta.

Dari pencapaian 4 target indikator pada sasaran strategis 1, maka dapat dihitung nilai pencapaian sarannya (NPS) sebagai rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya.

$$NPS = \frac{NPI\ 1 + NPI\ 2 + NPI\ 3 + NPI\ 4 + NPI5 + NPI6}{6}$$

6

$$NPS = \frac{103,58\% + 104\% + 104\% + 1115\% + 108,5 + 108,1}{6}$$

6

$$NPS = 108,93\%$$

Dengan NPS 108,93%, maka Balai Besar POM di Jakarta berhasil mencapai sasaran “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta”.

Sasaran Strategis-5: Meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi obat dan makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5

16. Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

a. *Perbandingan target dan realisasi tahun 2021*

Tabel 21. Realisasi Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan yang efektif di di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	TARGET TRIWULAN IV TAHUN 2021	REALISASI	CAPAIAN TRIWULAN III TAHUN 2021 (%)	KRITERIA
Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	93	93	93.83	100.89	Baik

Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi).

Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi:

- 1) KIE melalui media cetak dan elektronik;
- 2) KIE langsung ke masyarakat; dan
- 3) KIE melalui media sosial

Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

- 1) Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
- 2) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
- 3) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
- 4) Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan.

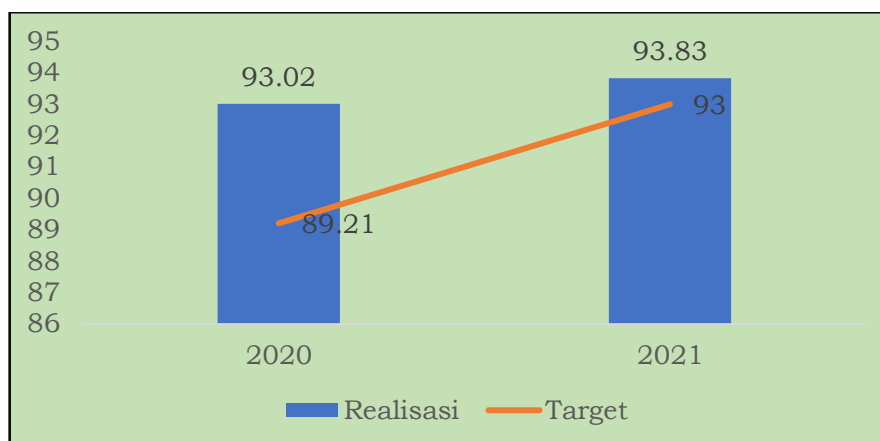
Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir. Teknik survei dapat berupa *face to face interview*, penyebaran kuisioner dan *online survei*. Tingkat efektivitas KIE obat dan makanan diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE BPOM melalui berbagai media pada tahun berjalan.

Hasil pengukuran tingkat efektivitas KIE dikategorikan sebagai berikut:

Skor Indeks 100	Interpretasi Efektivitas
<65,00	Kurang Efektif
65,01-75,00	Cukup Eektif
75,01-85,00	Efektif
85,01-95,00	Sangat Efektif
95,01-100	Sangat Efektif Sekali

Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta sampai dengan Triwulan III tahun 2021 diperoleh nilai 93.73 (Sangat Efektif) melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 90.99 (103.01%) dengan kriteria Baik. Perhitungan Indeks Efektivitas KIE Triwulan III tahun 2021 merupakan akumulasi hasil pengukuran Triwulan I hingga III tahun 2021. Nilai ini diperoleh dari 196 responden survei yang merupakan masyarakat yang telah terpapar kegiatan KIE Obat dan Makanan selama periode hingga Triwulan III tahun 2021.

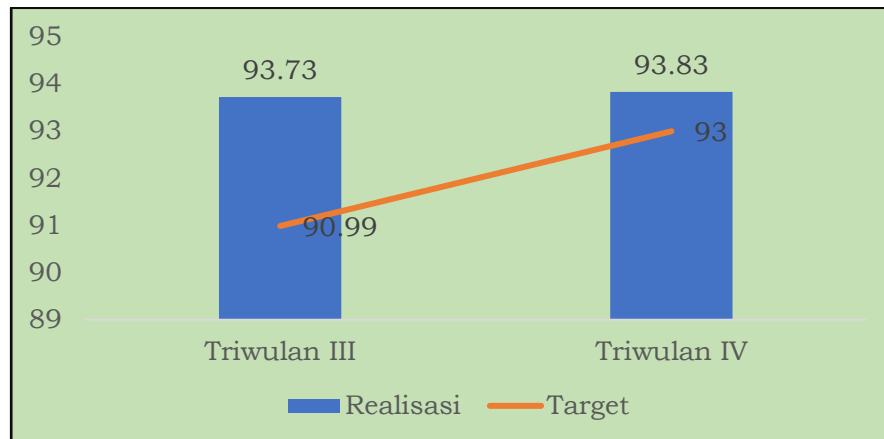
b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2021 dengan tahun 2020



Gambar 3 Perbandingan realisasi dan capaian tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2020 dan 2021

Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta sampai dengan Triwulan IV tahun 2021 sebesar 93.83 (Sangat Efektif) meningkat bila dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2020 sebesar 93.02 (Sangat Efektif). Apabila dibandingkan dengan target, capaian hingga Triwulan IV tahun 2021 ini telah melampaui target 93 (100.89%) dengan kriteria kinerja Baik. Begitu pula pada tahun 2020 capaian yang diperoleh telah melampaui target 89.21 (104.27%) dengan kriteria kinerja Baik.

c. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III dengan Triwulan IV Tahun 2021



Gambar 4 Perbandingan realisasi kinerja tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta Triwulan III dan Triwulan IV tahun 2021

Realisasi tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta Triwulan IV tahun 2021 merupakan akumulasi hasil pengukuran Triwulan I hingga IV tahun 2021. Hasil tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta Triwulan IV ini diperoleh berdasarkan hasil survei terhadap 196 responden sebesar 93.83 dengan capaian kinerja 100.89% (kriteria Baik). Jika dibandingkan dengan hasil Triwulan II, tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta Triwulan III ini sedikit mengalami penurunan namun telah berhasil melampaui target 2021. Adapun untuk target kinerja tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta mengalami revisi berdasarkan Surat Sekretaris Utama No. B-PR.01.02.2.21.11.21.570

perihal Penyampaian Kesepakatan Target Kinerja UPT BPOM Tahun 2021-2024 dalam rangka Reviu Renstra Unit Organisasi/Satker Tahun 2020-2024 tanggal 8 November 2021 dari semula 90.99 menjadi 93.

Jika dibandingkan dengan hasil Triwulan III, tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta Triwulan IV ini mengalami peningkatan sebesar 0.1 poin meliputi nilai masing-masing indikator dengan indeks per indikator sebagai berikut:

- 1) Ragam kegiatan sebesar 91.16, naik sebesar 0.1 poin dibandingkan triwulan sebelumnya (90.16),
- 2) Pemahaman sebesar 97.76, naik sebesar 0.62 poin dibandingkan triwulan sebelumnya (97.14),
- 3) Manfaat sebesar 94.41, turun sebesar 0.11 poin dibandingkan triwulan sebelumnya (94.52),
- 4) Minat sebesar 87.36, turun sebesar 0.27 poin dibandingkan triwulan sebelumnya (87.63).

Kontribusi capaian terbesar berasal dari indikator pemahaman yang berarti menunjukkan tingkat pemahaman masyarakat terhadap konten informasi yang diterima meningkat. Kontribusi terendah berasal dari indikator Minat yang menunjukkan minat masyarakat dalam mengikuti kegiatan KIE.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Peningkatan nilai indikator pada pencapaian Triwulan ini dapat disebabkan beberapa hal, yaitu:

- 1) Kenaikan indeks efektivitas KIE pada triwulan 4 secara umum karena adanya penurunan level Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sehingga KIE dapat lebih banyak dilakukan melalui penyuluhan/sosialisasi secara langsung kepada masyarakat, yaitu berupa bimbingan teknis yang memungkinkan peserta KIE berinteraksi dua arah sehingga materi dapat mudah dipahami.
- 2) Intensifikasi sosialisasi dan KIE mengenai Obat dan Makanan melalui media sosial dalam berbagai bentuk seperti infografis, videografis, dan video sehingga interaksi dengan masyarakat meningkat.

e. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

Pencapaian indeks efektivitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta sampai dengan Triwulan IV tahun 2021 ini ditunjang oleh berbagai program yang telah berjalan, meliputi:

- 1) Adanya penyelenggaraan KIE dalam rangka Pengawasan Desa Pangan Aman terhadap Kader-Kader Keamanan Pangan Kelurahan intervensi tahun-tahun sebelumnya.
- 2) Penyebaran konten KIE melalui media sosial dengan berbagai tema dan bentuk seperti infografis, videografis, dan video. Salah satunya adalah implementasi inovasi Aripin (Asupan Rabuan Pintar) yang menyediakan konten mengenai obat dan makanan yang disosialisasikan setiap hari Rabu di media sosial BBPOM di Jakarta (*Instagram, Facebook, dan Twitter*).

f. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

Sebagai tindak lanjut yang dapat dilakukan dalam rangka perbaikan kinerja ialah melakukan monitoring terhadap pemenuhan jumlah responden, termasuk proses *cleaning* jika terdapat data responden ganda, meningkatkan koordinasi dan *engagement* dengan responden KIE sehingga metode KIE yang dilakukan dapat memenuhi kebutuhan dan meningkatkan keterlibatan responden dalam survei. Variasi konten KIE juga dapat dilakukan guna meningkatkan pemahaman, minat, dan manfaat bagi responden. Evaluasi dan analisis terhadap hasil survei dipelrukan untuk mengembangkan strategi KIE yang lebih efektif di masa mendatang. Selain itu, juga diperlukan tindak lanjut berupa koordinasi dengan Kelompok Substansi Pengaduan Masyarakat, Biro Hukum dan Organisasi BPOM sebagai pengolah survei apabila ada kendala penggunaan aplikasi Evaluasi KIE

17. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2021

Tabel 22. Realisasi Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	TARGET TRIWULAN IV TAHUN 2021	REALISASI	CAPAIAN TRIWULAN III TAHUN 2021 (%)	KRITERIA
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	40	40 <i>(progress 100%)</i>	40 <i>(progress 100%)</i>	100	Baik

PJAS adalah kepanjangan dari Pangan Jajanan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah. Lokasi Penyedia PJAS dapat diperoleh dari jalur distribusi PJAS yang dapat diakses oleh Anak Usia Sekolah baik di sekolah, lingkungan sekitar sekolah, rumah tinggal, dan atau *e-commerce*. Waktu akses PJAS adalah sepanjang waktu, kapan pun anak usia sekolah (baik yang di sekolah maupun di rumah dan tempat lain) untuk mendapatkan PJAS. Satuan Pendidikan yang dilakukan intervensi keamanan PJAS terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA.

Intervensi keamanan PJAS adalah semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan meliputi tahapan advokasi lintas sektor keamanan PJAS, sosialisasi keamanan PJAS, Bimtek kader keamanan pangan sekolah, pemberian paket edukasi keamanan pangan, monitoring pemberdayaan kader keamanan pangan sekolah, sertifikasi PJAS Aman.

Kriteria Sekolah dengan PJAS Aman adalah:

- a. Memiliki Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif,
- b. Melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah,
- c. Mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan.

Tujuan intervensi keamanan PJAS yaitu menjamin keamanan pangan yang dikonsumsi anak usia sekolah serta memastikan anak usia sekolah khususnya dan komunitas sekolah umumnya memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku keamanan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan kesehatan.

Realisasi bulanan dan Triwulan dihitung berdasarkan *progress* tahapan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Skor	Target Pelaksanaan
1	Advokasi Lintas Sektor Keamanan PJAS	20%	Februari-April (TW 1-TW 2)
2	Sosialisasi Keamanan Pangan	5%	Februari-Juni (TW 1-TW 2)
3	Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah	15%	April-Juni (TW 1-TW 2)
4	Pemberian Paket Edukasi Keamanan Pangan	10%	April-November (TW 2-TW 4)
5	Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah <ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan Tim Keamanan Pangan Sekolah (5%) - Intervensi Keamanan Pangan kepada komunitas sekolah oleh Kader Keamanan Pangan Sekolah (10%) 	15%	Juli-September (TW 3)
6	Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman Level 1	15%	Oktober-Desember (TW 4)
7	Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman Level 2	20%	Oktober-Desember (TW 4)
	Total Skor	100%	

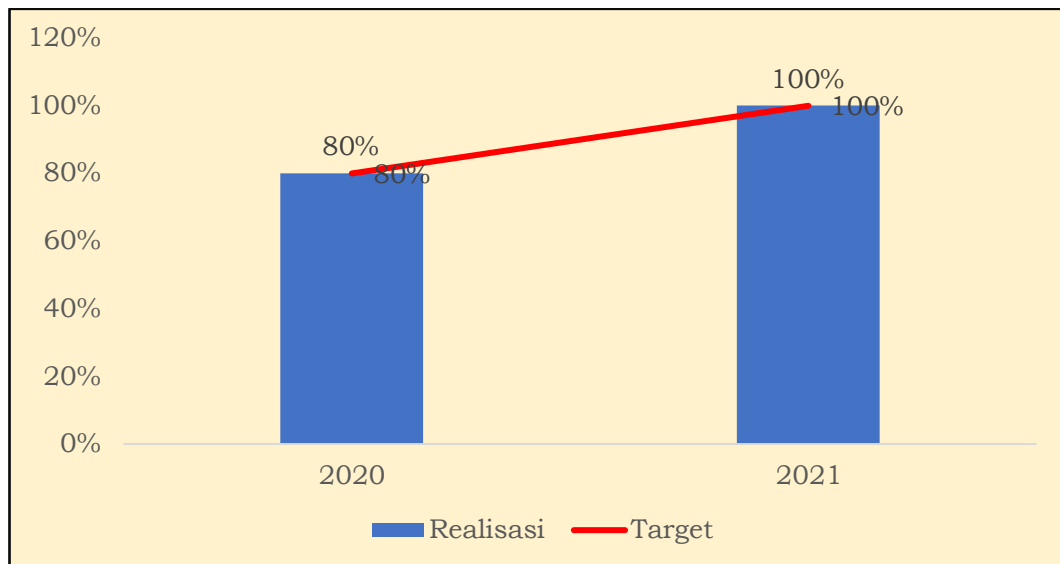
Adapun untuk pembobotan tahapan program PJAS tahun 2021 terdapat revisi berdasarkan surat Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan No. B-PM.02.04.55.553.10.21.263 perihal Penyampaian Perubahan Bobot Tahapan Program PJAS tahun 2021 tanggal 29 Oktober 2021 sebagai berikut:

No	Kegiatan	Skor	Target Pelaksanaan
1	Advokasi Lintas Sektor PJAS	20%	Januari-April (TW 1-TW 2)
2	Sosialisasi Keamanan Pangan	10%	Maret-April (TW 1-TW 2)
3	Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah	15%	April-Juni (TW 2-TW 3)
4	Pemberian Paket Edukasi/Paket Informasi Keamanan Pangan	10%	April-November (TW 2-TW 4)
5	Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah <ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan Tim Keamanan Pangan Sekolah - Intervensi Keamanan Pangan kepada komunitas sekolah oleh Kader Keamanan Pangan Sekolah 	15%	Juli-September (TW 3-TW 4)
6	Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman	20%	Agustus-November (TW 4)
7	Pengawasan	10%	Oktober-Desember (TW 4)
	Total Skor	100%	

Realisasi *progress* tahapan intervensi keamanan PJAS pada Triwulan IV tahun 2021 ialah sebesar 100% dengan telah terselenggaranya seluruh tahapan intervensi PJAS dan mencapai target intervensi terhadap 40 sekolah (28

sekolah intervensi baru dan 12 sekolah dalam rangka pengawalan intervensi tahun sebelumnya). Dengan realisasi ini, capaian kinerja intervensi keamanan PJAS sebesar 100% telah mencapai target Triwulan IV 40 sekolah dan *progress* tahapan 100% dengan kriteria Sangat Baik.

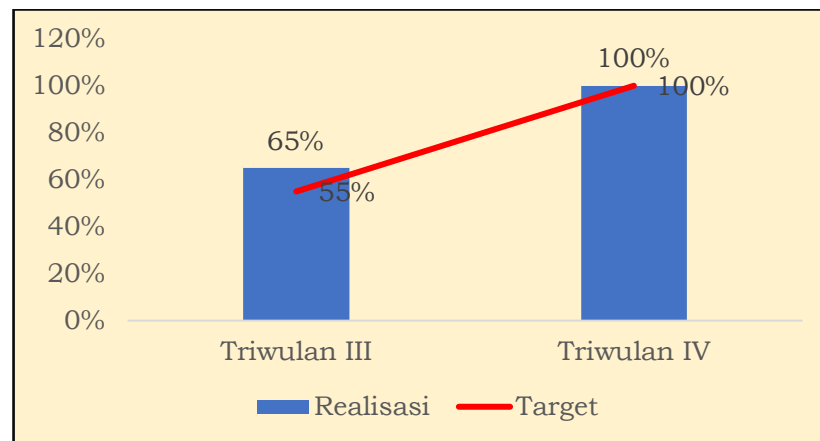
b. *Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2021 dengan tahun 2020*



Gambar 21 Perbandingan realisasi dan capaian *progress* tahapan PJAS di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2020 dan 2021

Realisasi *progress* tahapan program PJAS di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta hingga Triwulan IV tahun 2021 sebesar 100%. Realisasi tahapan program PJAS pada tahun 2020 sebesar 80% karena adanya penyesuaian pelaksanaan tahapan kegiatan pada tahun 2020 di masa pandemic Covid-19, yaitu tidak adanya program PBKPKS dan Lomba Sekolah Pangan Aman dan sudah mencapai target pemenuhan program sebesar 80% dengan capaian 100% (kinerja Baik). Dengan demikian, realisasi dan capaian program PJAS tahun 2020 dan 2021 sudah sesuai target program.

c. *Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III dengan Triwulan IV Tahun 2021*



Gambar 22 Perbandingan realisasi kinerja *progress* tahapan PJAS di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta Triwulan III dan Triwulan IV tahun 2021

Realisasi kinerja *progress* tahapan program PJAS di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta hingga Triwulan IV tahun 2021 sebesar 100% telah mencapai target sebesar 100% dengan capaian sebesar 100.00% (kinerja Baik). Hasil ini meningkat jika dibandingkan dengan realisasi di Triwulan III yaitu sebesar 65% karena seluruh tahapan selesai hingga Triwulan IV tahun 2021.

d. *Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan*

Penyebab keberhasilan capaian program intervensi PJAS pada Triwulan IV ini yaitu:

- 1) Adanya sinergisme dan dukungan lintas sektor terkait seperti Pemda, Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Pusat melalui kegiatan Advokasi.
- 2) Terlaksananya Workshop Monev Program Keamanan Pangan Terpadu Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2021 yang bertujuan untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan intervensi PJAS tahun intervensi 2021 dengan stakeholder-stakeholder terkait, meliputi Walikota, Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Perekonomian, Direktur Perumda Pasar Jaya, Bappeda, Suku Dinas Kesehatan, Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan II, Suku Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik, Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil,

dan Menengah, Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian, Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Ketua Tim Penggerak PKK, Camat, Lurah dan Tim Keamanan Pangan Pangan dari Kelurahan yang diintervensi Desa Pangan Aman tahun 2021 (Kelurahan Cikini, Rawasari, Bedungan Hilir, Kenari, Sumur Batu, Harapan Mulia, Gunung Sahari Utara, Petojo Selatan, Galur), Manajer Area 03, Kepala Pasar Gembrong, dan 28 Sekolah yang diintervensi PJAS Tahun 2021 di Kota Administrasi Jakarta Pusat.

- 3) Adanya forum komunikasi dengan kader keamanan pangan dari sekolah-sekolah intervensi memudahkan koordinasi dalam pelaksanaan tahapan program PJAS

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan kinerja adalah berupa optimalisasi koordinasi dengan sekolah intervensi PJAS mengenai pembentukan Tim Keamanan Pangan Sekolah serta intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah oleh kader dilakukan melalui media *Whatsapp* dan *Zoom Meeting* sehingga informasi dan respon dapat diberikan dan diterima secara cepat. Selain itu, koordinasi melalui komunikasi yang efektif ini diharapkan dapat mendorong keberhasilan program intervensi PJAS.

f. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

Agar target kinerja dapat tercapai dan meningkat dari tahun sebelumnya diperlukan perencanaan dan pelaksanaan tahapan kegiatan yang baik diikuti dengan komunikasi yang efektif dengan lintas sektor dan sekolah target, contohnya komunikasi efektif melalui forum komunikasi via *Whatsapp* dan pertemuan diskusi baik secara tatap muka maupun secara daring via *Zoom*.

18. Jumlah desa pangan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

a. *Perbandingan target dan realisasi tahun 2021*

Tabel 23. Realisasi Jumlah desa pangan aman Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	TARGET TRIWULAN IV TAHUN 2021	REALISASI	CAPAIAN TRIWULAN IV TAHUN 2021 (%)	KRITERIA
Jumlah desa pangan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	14	14 (Progress 100%)	14 (Progress 100%)	100.00	Baik

Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, fasilitasi keamanan pangan dan pengawasan keamanan pangan serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan.

Desa yang menjadi sasaran intervensi dapat terdiri dari desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM > 0,707 dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707, IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi.

Kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan keamanan pangan di desa meliputi, Perkuatan Kapasitas Desa, Pemberdayaan Komunitas Desa, Pengawasan Keamanan Pangan, Monitoring dan Evaluasi

Desa pangan aman ditentukan dari kriteria:

- 1) Kader keamanan pangan desa yang aktif,
- 2) Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa,
- 3) Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain).

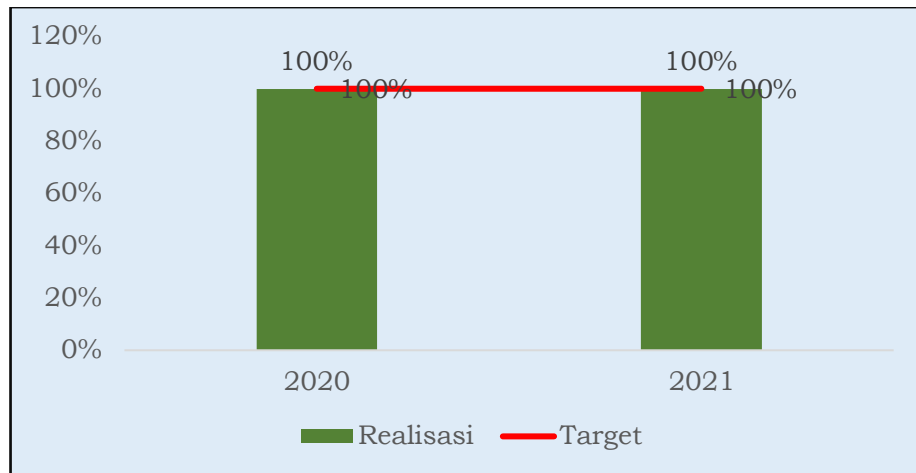
Jumlah desa/ kelurahan yang diintervensi tahun 2021 di wilayah Provinsi DKI Jakarta ialah 14 kelurahan yang meliputi 9 kelurahan intervensi baru dan 5 kelurahan pengawalan dari intervensi tahun 2020.

Realisasi bulanan dan Triwulan dihitung berdasarkan *progress* tahapan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Skor	Target Pelaksanaan
1	Advokasi Kelembagaan Desa	20%	Januari-April (TW 1-TW 2)
2	Pengadaan paket informasi keamanan pangan, <i>rapid test</i> , dll.	5%	Januari-April (TW 1-TW 2)
3	Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD)	15%	April-Juli (TW 2-TW 3)
4	Bimtek Komunitas, sekaligus survei pre intervensi untuk komunitas	15%	Mei-Oktober (TW 2-TW 4)
5	Fasilitasi Keamanan Pangan	10%	Juni-November (TW 2-TW 4)
6	Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan	10%	- Pre Intervensi: Mei-Oktober (dapat dilakukan bersamaan dengan bimtek komunitas) - Post Intervensi: November (dapat dilakukan bersamaan dengan pengambilan data/survei post intervensi)
7	Monitoring dan Evaluasi	15%	November-Desember (TW 4)
8	Pengawalan	10%	Juni-Desember (TW 2-TW 4)
	Total Skor	100%	

Realisasi *progress* tahapan intervensi Desa Pangan Aman pada Triwulan IV tahun 2021 ialah sebesar 100% dengan telah terselenggaranya seluruh tahapan intervensi Desa Pangan Aman terhadap target 14 kelurahan (9 kelurahan intervensi tahun 2021 dan 5 kelurahan intervensi tahun sebelumnya dalam rangka pengawalan). Dengan realisasi ini, capaian kinerja intervensi Desa Pangan Aman telah mencapai target Triwulan IV yaitu 14 desa dengan *progress* tahapan 100% dengan capaian 100% (kriteria Baik).

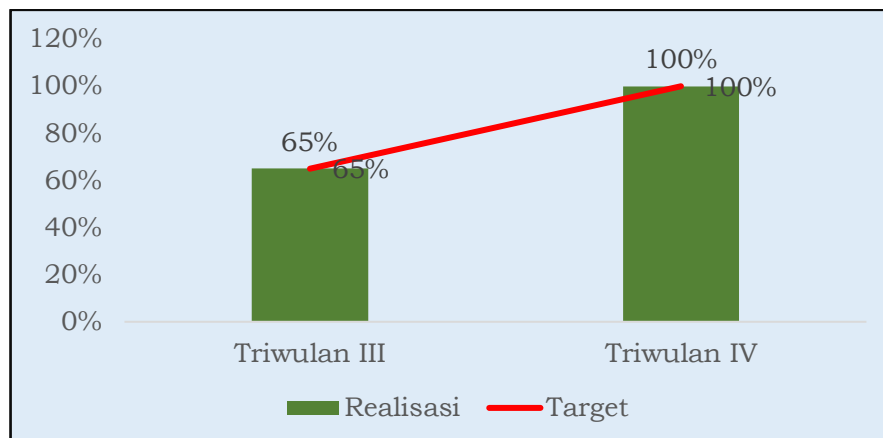
b. *Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2021 dengan tahun 2020*



Gambar 21 Perbandingan realisasi dan capaian *progress* tahapan desa pangan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2020 dan 2021

Realisasi *progress* tahapan program desa pangan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta hingga Triwulan IV tahun 2021 sebesar 100%. Realisasi tahapan program desa pangan aman pada tahun 2020 sebesar 100% dengan capaian juga senilai 100% (kinerja Baik). Dengan demikian, realisasi dan capaian program Desa Pangan Aman tahun 2020 dan 2021 sudah sesuai target program.

c. *Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III dengan Triwulan IV Tahun 2021*



Gambar 22 Perbandingan realisasi kinerja *progress* tahapan desa pangan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta Triwulan II dan Triwulan III tahun 2021

Realisasi kinerja *progress* tahapan program desa pangan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta hingga Triwulan IV tahun 2021 sebesar 100% telah sesuai target dengan capaian 100% (kinerja Baik). Hasil ini

meningkat jika dibandingkan dengan realisasi di Triwulan III yaitu sebesar 65% dengan capaian sebesar 100% (kinerja Baik) karena seluruh tahapan intervensi selesai pada Triwulan 4.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Penyebab keberhasilan capaian program Desa Pangan Aman pada Triwulan IV ini yaitu:

- 1) Adanya komitmen dan dukungan dari Pemerintah Daerah (Pemda) dan OPD terkait keamanan pangan sebagai hasil kegiatan Audiensi dengan Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Advokasi Terpadu Pelaksanaan Program Keamanan Pangan Desa Pangan Aman, PJAS Aman, dan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas
- 2) Terlaksananya Workshop Monev Program Keamanan Pangan Terpadu Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2021 yang bertujuan untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan Desa Pangan Aman tahun intervensi 2021 dengan stakeholder-stakeholder terkait, meliputi Walikota, Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Perekonomian, Direktur Perumda Pasar Jaya, Bappeda, Suku Dinas Kesehatan, Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan II, Suku Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik, Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian, Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Ketua Tim Penggerak PKK, Camat, Lurah dan Tim Keamanan Pangan Pangan dari Kelurahan yang diintervensi Desa Pangan Aman tahun 2021 (Kelurahan Cikini, Rawasari, Bedungan Hilir, Kenari, Sumur Batu, Harapan Mulia, Gunung Sahari Utara, Petojo Selatan, Galur), Manajer Area 03, Kepala Pasar Gembrong, dan 28 Sekolah yang diintervensi PJAS Tahun 2021 di Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- 3) Terbentuknya forum komunikasi dengan Tim dan Kader Keamanan Pangan dari kelurahan intervensi juga memudahkan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan intervensi Desa Pangan Aman.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan kinerja adalah berupa optimalisasi koordinasi dengan lintas sektor kelurahan melalui media *Whatsapp* sehingga koordinasi dengan Tim Keamanan Pangan dan Kader Keamanan Pangan Desa/Kelurahan dapat terus berjalan dengan efektif dan kontinu.

f. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

Target intervensi program Desa Pangan Aman pada tahun 2021 ini ialah 14 kelurahan yang terdiri atas 9 kelurahan intervensi baru dan 5 kelurahan pengawalan dari intervensi tahun 2020. Agar target kinerja dapat tercapai dan meningkat dari tahun sebelumnya diperlukan perencanaan dan pelaksanaan tahapan kegiatan yang baik diikuti dengan komunikasi yang efektif dengan lintas sektor kelurahan.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan program Desa Pangan Aman tahun 2021, telah dilakukan berbagai upaya, salah satunya dengan cara intensifikasi koordinasi melalui forum komunikasi dengan kelurahan intervensi dan OPD terkait yang dapat dilakukan dengan *Whatsapp* dan diskusi pembahasan program baik secara tatap muka maupun daring melalui *Zoom*

19. Jumlah pasar aman berbasis komunitas di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2021

Tabel 24. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	TARGET TRIWULAN III TAHUN 2021	REALISASI	CAPAIAN TRIWULAN III TAHUN 2021 (%)	KRITERIA
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	2	2 <i>(progress 100%)</i>	2 <i>(progress 100%)</i>	100	Baik

Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD terkait sebagai pasar percontohan untuk pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas. Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja Survey pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar, monev pasar, serta pelatihan fasilitator pasar dalam rangka mencapai pasar pangan aman berbasis komunitas.

Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dan demand. Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survey pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, monev pasar, serta pelatihan fasilitator pasar.

Komunitas pasar adalah kelompok meliputi pedagang pasar, pengelola pasar, pengunjung pasar, anggota asosiasi pasar yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat.

Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar) dan penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya serta rencana program pengawalan pada tahun berikutnya.

Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dapat berupa penerapan CRPB oleh pedagang pasar di pasar rakyat. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *demand* dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata. Jumlah pasar aman dihitung dari jumlah pasar aman yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Mendapat intervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya,
- 2) Terjadi penurunan %TMK cemaran kimia dan mikrobiologi pada Monev Tahap 1 dibandingkan Monev Tahap 2.

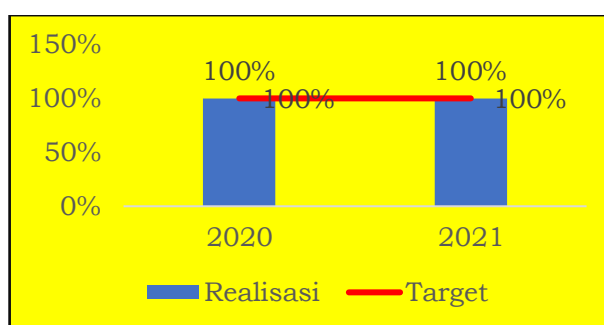
Jumlah pasar yang diintervensi program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta ialah 2 (satu) pasar yaitu 1 pasar intervensi baru dan 1 pasar pengawalan intervensi tahun 2020.

Realisasi bulanan dan Triwulan dihitung berdasarkan *progress* tahapan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Skor	Target Pelaksanaan
1	Advokasi	20%	Januari-April (TW 1-TW 2)
2	Survei Pasar	5%	Januari (TW 1)
3	Bimtek Pengelola Pasar + Materi Pelatihan Fasilitator	15%	April-Mei (TW 2)
4	Monev (Sampling dan Pengujian) Tahap 1 Pasar	20%	April (TW 2)
5	Penyuluhan	5%	Juni-Juli (TW 2-TW 3)
6	Kampanye	5%	Juni-Juli (TW 2-TW 3)
7	Monev Tahap 2 (Sampling dan Pengujian) Pasar	20%	September-Oktober (TW 3-TW 4)
8	Lomba Pasar Aman	10%	Desember (TW 4)
	Total Skor	100%	

Realisasi *progress* tahapan intervensi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas pada Triwulan IV tahun 2021 ialah sebesar 100% dengan telah terselenggaranya seluruh tahapan intervensi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas terhadap 2 pasar intervensi (1 pasar intervensi baru dan 1 pasar pengawalan intervensi tahun 2020). Dengan realisasi ini, capaian kinerja intervensi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Triwulan IV sebesar 100% telah mencapai target yaitu 100% dengan capaian 100.00% (kriteria Baik).

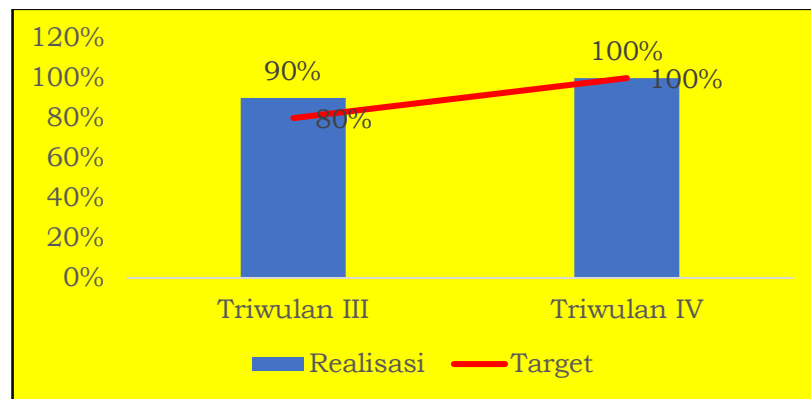
b. *Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2021 dengan tahun 2020*



Gambar 23 Perbandingan realisasi dan capaian *progress* tahapan pasar pangan aman berbasis komunitas di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2020 dan 2021

Realisasi *progress* tahapan program pasar pangan aman berbasis komunitas di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta hingga Triwulan IV tahun 2021 sebesar 100%. Realisasi dan capaian tahapan program pasar pangan aman berbasis komunitas pada tahun 2020 sebesar 100% (kinerja Baik). Dengan demikian, realisasi dan capaian program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas tahun 2020 dan 2021 sudah sesuai target program.

c. *Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III dengan Triwulan IV Tahun 2021*



Gambar 24 Perbandingan realisasi kinerja *progress* tahapan pasar pangan aman berbasis komunitas di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta Triwulan II dan Triwulan IV tahun 2021

Realisasi kinerja *progress* tahapan program pasar pangan aman berbasis komunitas di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta hingga Triwulan IV tahun 2021 sebesar 100% telah mencapai target sebesar 100% dengan capaian sebesar 100.00% (kinerja Baik). Hasil ini meningkat jika dibandingkan dengan realisasi di Triwulan III yaitu sebesar 90% karena seluruh tahapan intervensi selesai pada Triwulan 4.

d. *Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan*

Penyebab keberhasilan tercapainya pelaksanaan program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas ini antara lain:

- 1) Kemudahan koordinasi dengan Pengelola Pasar dan Perumda Pasar Jaya dalam pelaksanaan kegiatan melalui forum komunikasi baik secara tatap muka maupun *online*.
- 2) Adanya komitmen dan dukungan dari Pemerintah Daerah (Pemda) dan OPD terkait keamanan pangan sebagai hasil kegiatan Audiensi dengan Walikota

Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Advokasi Terpadu Pelaksanaan Program Keamanan Pangan Desa Pangan Aman, PJAS aman, dan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas.

- 3) Pelaksanaan Workshop Monev Program Keamanan Pangan Terpadu Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2021 yang bertujuan untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas tahun intervensi 2021 dengan stakeholder-stakeholder terkait, meliputi Walikota, Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Perekonomian, Direktur Perumda Pasar Jaya, Bappeda, Suku Dinas Kesehatan, Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan II, Suku Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik, Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian, Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Ketua Tim Penggerak PKK, Camat, Lurah dan Tim Keamanan Pangan Pangan dari Kelurahan yang diintervensi Desa Pangan Aman tahun 2021 (Kelurahan Cikini, Rawasari, Bedungan Hilir, Kenari, Sumur Batu, Harapan Mulia, Gunung Sahari Utara, Petojo Selatan, Galur), Manajer Area 03, Kepala Pasar Gembrong, dan 28 Sekolah yang diintervensi PJAS Tahun 2021 di Kota Administrasi Jakarta Pusat juga merupakan salah satu factor penyebab tercapainya target kinerja intervensi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas.
- 4) Terbentuknya forum komunikasi dengan pengelola pasar juga mejadi penyebab keberhasilan pencapaian target pelaksanaan Bimtek Pengelola Pasar, Monev Tahap I, Penyuluhan dan Kampanye Pasar serta Monev Tahap II.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan kinerja adalah berupa optimalisasi koordinasi dengan lintas sektor pengelola pasar melalui media *Whatsapp* sehingga koordinasi dapat terus berjalan dengan efektif dan kontinu.

f. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

Target intervensi program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas pada tahun 2021 ini adalah 2 pasar meliputi 1 pasar intervensi baru dan 1 pasar

pengawasan intervensi tahun 2020. Agar target kinerja dapat tercapai dan meningkat dari tahun sebelumnya diperlukan perencanaan dan pelaksanaan tahapan kegiatan yang baik diikuti dengan komunikasi yang efektif dengan pengelola pasar target, contohnya komunikasi efektif melalui forum komunikasi via *Whatsapp* dan pertemuan diskusi baik secara tatap muka maupun secara daring via *Zoom*.

Dari pencapaian 5target indikator pada sasaran strategis 5, maka dapat dihitung nilai pencapaian sasarannya (NPS) sebagai rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya.

$$NPS = \frac{NPI 1 + NPI 2 + NPI 3 + NPI 4}{4}$$

$$NPS = \frac{100.89 + 100.00 + 100.00 + 100.00}{4}$$

$$NPS = 100.22\%$$

Dengan NPS 100.22%, maka Balai Besar POM di Jakarta berhasil dalam mencapai sasaran meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6

20. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

a. *Perbandingan target dan realisasi triwulan IV tahun 2021*

- Tabel 25. Realisasi persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	TARGET TRIWULAN IV TAHUN 2021	REALISASI	CAPAIAN TRIWULAN IV TAHUN 2021 (%)	KRITERIA
Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar.	100	100	90.85	90.85	Baik



Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen Kesehatan

Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman *sampling*. Sesuai standar adalah standar pedoman *sampling* dan juga standar *timeline* yang ditetapkan dalam pedoman/ *SOP*

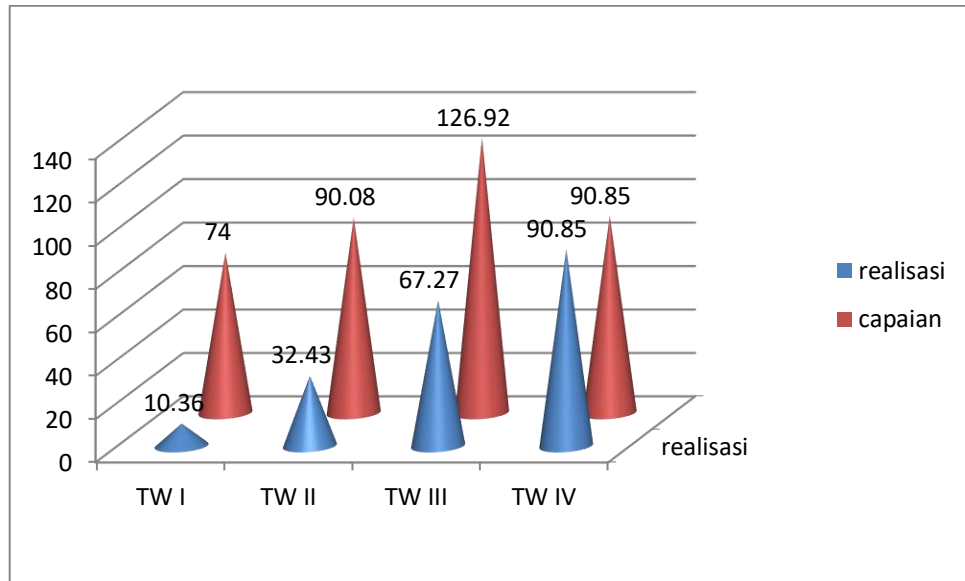
Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label.

Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium

$$\text{Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar} = \frac{A+B}{2}$$
$$A = \frac{\text{Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar}}{\text{Jumlah target sampel Obat satu tahun}} \times 100\%$$

Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar di Provinsi DKI Jakarta sebesar 90,85% masih kurang dari target yang ditetapkan yaitu 100%. Hal ini disebabkan oleh dua hal, yaitu terdapat 2 sampel obat (cangkang kapsul) yang diuji di BBPOM di Yogyakarta dan laporan hasil ujinya belum diterima BBPOM Jakarta. Selain itu penyebab lainnya adalah penyelesaian pengujian yang melebihi standar *timeline* yang sudah ditetapkan yaitu 30 hari kerja. Keterlambatan penyelesaian pengujian ini disebabkan oleh kondisi pandemic Covid 19 yang mengalami peningkatan mulai bulan Juli 2021 sehingga pemerintah mengambil kebijakan untuk meningkatkan jumlah pegawai yang WFH (Work From Home). Dengan proporsi pegawai WFH yang lebih besar maka pengujian sampel menjadi tertunda. Selain itu juga ada penyesuaian target presentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dari semula 90,5% menjadi 100%, sehingga capaian menjadi lebih rendah.

b. Perbandingan realisasi dan capaian TW I, TW II, TW III dan TW IV tahun 2021



Gambar 25 Perbandingan realisasi dan capaian obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar TW I, TW II, TW III, dan TW IV

Pada Triwulan IV Realisasi persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar mengalami penurunan TW III karena penyelesaian pengujian ada yang melebihi standar time line pengujian yang telah ditetapkan dan adanya penyesuaian target dari 90.5% menjadi 100%.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Realisasi persentase pemenuhan pengujian sesuai standar pada tahun 2021 Triwulan IV adalah 90.85%, masih kurang dari target yang ditetapkan yaitu 100% dikarenakan kondisi pandemic Covid-19 yang meningkat dan adanya PPKM sehingga time line pengujian sampel Sebagian tidak terpenuhi.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Program / kegiatan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Jakarta untuk meningkatkan capaian kinerja adalah:

- menyelenggarakan pelatihan internal, mengikutsertakan personil pengujian dalam pelatihan eksternal dan kegiatan magang untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi personil pengujian.

- melakukan Verifikasi Metode Analisis yang bertujuan untuk membuktikan bahwa metode analisis yang digunakan menghasilkan uji yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Jumlah metode analisis yang harus diverifikasi seriap tahunnya adalah 12 metode analisis dari laboratorium kosmetik, 12 metode analisis dari laboratorium obat tradisional dan Suplemen Kesehatan dan 12 metode analisis dari laboratorium obat
 - Program Kalibrasi Alat laboratorium yang dilakukan secara berkala setiap tahun yang bertujuan untuk menjamin peralatan memberikan hasil pengukuran sesuai dengan standar Nasional maupun Internasional dan untuk menjaga kondisi peralatan yang digunakan tetap sesuai dengan spesifikasinya.
 - Penerapan Sistem Mutu ISO 17025:2017 dan ISO 9001:2015, yang merupakan pengakuan pihak ketiga terhadap kompetensi laboratorium dalam melakukan kegiatan pengujian.
 - Pemanfaatan Alat laboratorium dan Sarana Prasarana laboratorium secara maksimal.
 - Pemenuhan peralatan dan kebutuhan pengujian untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pengujian.
- e. *Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya*

Tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya telah dilakukan, yaitu dengan meningkatkan penerapan sistem manajemen mutu ISO 17025:2017 dan ISO 9001:2015 secara konsisten. Juga dengan melakukan berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan capaian kinerja, sebagaimana telah disebutkan dalam butir d di atas.

21. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

- a. *Perbandingan target dan realisasi triwulan IV tahun 2021*

Tabel 26. Realisasi Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Triwulan IV Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	TARGET TRIWULAN IV TAHUN 2021	REALISASI	CAPAIAN TRIWULAN IV TAHUN 2021 (%)	KRITERIA
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100	96.42	96.42	Baik

Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman *sampling*.

Sesuai standar adalah standar pedoman *sampling* dan juga *timeline* yang ditetapkan dalam pedoman/SOP

Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,

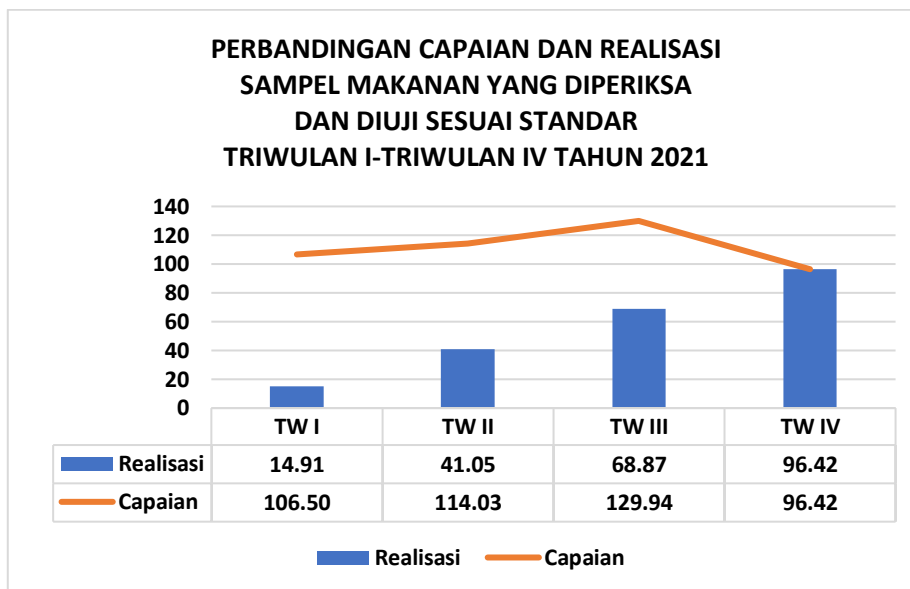
Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar		=	$\frac{A + B}{2}$
A	$\frac{\text{= Jumlah sampel makanan yang diperiksa sesuai standar}}{\text{Jumlah target sampel makanan satu tahun}}$	x	100%
B	$\frac{\text{= Jumlah sampel makanan yang diuji sesuai standar}}{\text{Jumlah sampel makanan yang masuk laboratorium}}$	x	100%

Persentase sampel pangan yang diperiksa dan diuji sesuai standar di Provinsi DKI Jakarta sebesar 96.42% masih kurang dari target yang ditetapkan yaitu 100% . Penyesuaian target sampel pertahun sebesar 100% Hal ini disebabkan oleh time line pengujian yang melebihi standar yang sudah ditetapkan yaitu 30 hari kerja. Hal ini disebabkan oleh kondisi pandemic Covid 19 yang mengalami peningkatan mulai Bulan Juli 2021 sehingga penguji mengalami penyesuaian untuk Work form

Home (WFH) dan Work form Office (WFO) akibatnya pengujian sampel menjadi tertunda. Selain itu juga adanya penyesuaian jumlah sampel pangan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dari semula 1039 menjadi 865, sehingga capaian menjadi lebih rendah

a. *Perbandingan realisasi dan capaian TW I, TW II, TW III dan TW IV tahun 2021*



Gambar 26. Perbandingan capaian dan realisasi sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar TW I, TW II, TW III dan TW IV

Pada Triwulan IV Realisasi persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar meningkat dibanding Triwulan sebelumnya dan melebihi target yang ditetapkan yaitu 96.42% dan persentase capaian sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar menurun dibanding Triwulan sebelumnya yaitu 96.42%.

b. *Analisis penyebab keberhasilan /kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan*

Realisasi persentase pemenuhan pengujian sesuai standar sampai TW IV pada tahun 2021 ini adalah 96.42 %, kurang dari target yang ditetapkan yaitu 100%. Penurunan persentase realisasi pemenuhan pengujian sampel sesuai standar pada TW IV disebabkan jumlah sampel yang tidak memenuhi syarat pengujian pada sampel acak sebesar 24 sampel dan pada sampel target sebesar 22 sampel serta timeline pengujian yang lebih lama dikarenakan sampel tidak memenuhi syarat. Jumlah sampel pangan yang tidak sesuai standar banyak menyumbang penurunan persentase pemenuhan pengujian sesuai standar.

c. *Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja*

Program / kegiatan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Jakarta untuk meningkatkan capaian kinerja adalah:

- menyelenggarakan pelatihan internal, mengikutsertakan personil pengujian dalam pelatihan eksternal dan kegiatan magang untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi personil pengujian.
- melakukan Verifikasi Metode Analisis yang bertujuan untuk membuktikan bahwa metode analisis yang digunakan menghasilkan uji yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, untuk metode analisis pangan sebanyak 12 metode analisis per tahun.
- Program Kalibrasi Alat laboratorium yang dilakukan secara berkala setiap tahun yang bertujuan untuk menjamin peralatan memberikan hasil pengukuran sesuai dengan standar Nasional maupun Internasional dan untuk menjaga kondisi peralatan yang digunakan tetap sesuai dengan spesifikasinya.
- Penerapan Sistem Mutu ISO 17025:2017 dan ISO 9001:2015, yang merupakan pengakuan pihak ketiga terhadap kompetensi laboratorium dalam melakukan kegiatan pengujian.
- Pemanfaatan Alat laboratorium dan Sarana Prasarana laboratorium secara maksimal.
- Pemenuhan peralatan dan kebutuhan pengujian untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pengujian.

d. *Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya*

Tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya telah dilakukan, yaitu dengan meningkatkan penerapan sistem manajemen mutu ISO 17025:2017 dan ISO 9001:2015 secara konsisten.

Dari pencapaian 2 target indikator pada sasaran strategis 6, maka dapat dihitung nilai pencapaian sasarnya (NPS) sebagai rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya.

$$NPS = \frac{NPI\ 1 + NPI\ 2}{2}$$

$$NPS = \frac{90.85\% + 96.42\%}{2}$$

$$NPS = 93.64\%$$

Dengan NPS 93.64%, maka Balai Besar POM di Jakarta telah berhasil dalam mencapai sasaran meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 7

Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana obat dan makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta

22. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan
 a. Perbandingan target dan realisasi triwulan IV tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	TARGET TRIWULAN IV TAHUN 2021	REALISASI	CAPAIAN TRIWULAN IV TAHUN 2021 (%)	KRITERIA
Tingkat keberhasilan penindakan tindak pidana di bidang obat dan makanan	54	54	58.61	108.54%	Baik

Penilaian keberhasilan penindakan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut sebagai berikut:

- a) SPDP sebesar 15% -- nilai A $[(a+b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- b) Tahap 1 sebesar 40% -- nilai B $[(b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- c) P21 sebesar 30% -- nilai C $[(c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- d) Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D $[d / \text{jumlah perkara}]$

Nilai Tingkat Keberhasilan:

$$\{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times (\text{jumlah capaian} / \text{target perkara})$$

Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara *carry over*.

Capaian persentase keberhasilan penindakan obat dan makanan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta periode triwulan ketiga Juli - Desember 2021 adalah **melebihi target** yang ditetapkan yakni tingkat keberhasilan **108.54%** atau tingkat keberhasilan **58.61** dari target tingkat keberhasilan di triwulan ketiga 2021 sebesar **54** dengan kriteria "**baik**". Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa pada triwulan ketiga atau periode Oktober - Desember 2021, Kelompok Substansi Penindakan BBPOM di Jakarta **telah berhasil** memenuhi indikator kinerja strategis yang ditetapkan yakni meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana obat dan makanan, meskipun tingkat keberhasilannya tidak dapat disimpulkan.

b. Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2021 dengan tahun 2020

Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2021 dan 2020 adalah terdapat peningkatan capaian dari **54,37** di tahun 2020 menjadi **58,61** di tahun 2021. Peningkatan kinerja sebesar ini sebagai hasil dari proses penyidikan mulai dari SPDP tahun 2021 hingga penyelesaian berkas perkara *carry over* yang diselesaikan di tahun 2021. Pada triwulan keempat ini, capaian Kelompok Substansi Penindakan adalah 1 (satu) perkara tahun

2021 telah selesai sampai dengan tahap 2 (penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa). Selanjutnya terdapat penambahan 1 (satu) perkara tahun 2021 pada tahap 1 (penyerahan berkas kepada Jaksa).

Analisa terhadap keberhasilan Kelompok Substansi Penindakan BBPOM di Jakarta untuk mencapai target meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana di bidang obat dan makanan terdiri atas beberapa faktor, antara lain:

1. Koordinasi dengan *Criminal Justice System* (CJS)

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Penyidik PNS selalu melakukan koordinasi dengan CJS lainnya seperti Korwas PPNS Polda Metro Jaya, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Pengadilan Negeri di wilayah DKI Jakarta. Pencapaian pada triwulan keempat ini merupakan hasil dari koordinasi dengan CJS yang berkaitan langsung dengan penyelesaian perkara. Sebagai hasil dari koordinasi yang semakin optimal maka beberapa perkara tunggakan menunjukkan perkembangan ke arah penyelesaian perkara yang mempengaruhi indikator kinerja triwulan keempat tahun 2021.

2. Kerja sama lintas sektor lain secara intensif

Sejalan dengan meningkatnya sistem perdagangan secara daring melalui berbagai platform *e-commerce* maka terdapat potensi peningkatan kejahatan bidang obat dan makanan melalui sistem perdagangan tersebut. Penanganan perkara sampai dengan akhir tahun 2021 juga didominasi oleh temuan pelanggaran kejahatan obat dan makanan secara daring.

Untuk memperkuat pengawasan dalam ranah perdagangan daring tersebut maka dijalin kerja sama dengan lintas sektor terkait penyedia layanan *e-commerce* atau *marketplace* antara lain PT. Shopee International Indonesia dan PT. Tokopedia. Kerja sama ini terjalin semakin intensif sehubungan dengan permintaan keterangan sebagai saksi yang dapat menjadi alat bukti dalam pembuktian pemenuhan

unsur pasal yang disangkakan dalam perkara pidana obat dan makanan.

3. Monitoring dan evaluasi penanganan perkara yang optimal

Capaian di triwulan keempat ini juga merupakan hasil dari implementasi monitoring dan evaluasi penanganan perkara yang optimal. Kegiatan monitoring dan evaluasi sebagai bukti komitmen pimpinan terhadap pelaksanaan perjanjian kinerja yang disepakati pada awal tahun anggaran.

4. Penyesuaian target kinerja

Target Kinerja pada tahun 2020 sebesar 54,37% dan capaian kinerja tahun 2020 berada di kategori "tidak dapat disimpulkan" menjadi dasar atau justifikasi perlunya penyesuaian/revisi target kinerja tahun 2021 sesuai surat Sestama BPOM. Dengan revisi target dari 40 menjadi 54, berdampak pada perbaikan terhadap penilaian kinerja Kelompok Substansi Penindakan.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Sepanjang triwulan keempat ini, kegiatan koordinasi merupakan kegiatan yang menjadi faktor utama dalam pencapaian target kinerja. Kerja sama dengan Kedeputian Bidang Penindakan juga terus diintensifkan sehingga upaya pencapaian target kinerja di triwulan terakhir 2021 ini bisa berjalan optimal.

Selain itu, kegiatan koordinasi salah satunya melalui Gelar Perkara rutin yang diselenggarakan baik secara luring maupun daring dengan Korwas PPNS Polda Metro Jaya dan Kejati DKI Jakarta merupakan kegiatan penunjang penyelesaian berkas perkara yang ditangani. Melalui gelar perkara tersebut dapat diidentifikasi kendala yang dihadapi penyidik dan dihasilkan rekomendasi dalam upaya penyelesaian berkas perkara.

f. Analisis terhadap penggunaan sumber daya

Tingkat efisiensi penggunaan anggaran diperoleh dari indeks efisiensi dikurangi dengan standar efisiensi (1). Sedangkan indeks efisiensi merupakan hasil pembagian dari output terhadap input.

Pada periode triwulan keempat tahun 2021 hasil penilaian tingkat efisiensi anggaran di Kelompok Substansi Penindakan adalah sebesar **0,09** atau capaian masuk ke dalam kategori **efisien (100%)**. Capaian ini merupakan gambaran dari penggunaan sumber daya yang sudah optimal untuk mencapai target kinerja tahun 2021.

Pada triwulan keempat, penggunaan anggaran untuk output perkara di bidang obat dan makanan sebesar Rp 544.808.639,- dari total anggaran Rp 545.034.000,- (99,96%) sementara dari output laporan kegiatan dukungan investigasi dan penyidikan obat dan makanan telah digunakan sebesar Rp 497.595.778,- dari total anggaran Rp 497.602.000,- (99,99%). Realisasi penggunaan anggaran Kelompok Substansi Penindakan sebanyak Rp 1.042.404.417,- atau sebesar 99,98% dari total anggaran Rp 1.042.636.000,-. Penggunaan sumber daya sampai dengan triwulan akhir di 2021 telah terlaksana sesuai rencana secara efektif dan efisien. Capaian ini merupakan modal positif untuk melanjutkan kinerja di tahun berikutnya.

g. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

Pencapaian triwulan keempat ini merupakan hasil dari optimalisasi penanganan perkara yang dilakukan, baik secara internal BPOM dengan Direktorat Penyidikan dan Direktorat lain di Kedeputian 4, maupun secara eksternal dengan CJS terkait.

Terdapat hasil yang tidak dapat disimpullkan (> 120%) di tahun 2020 mengingat perhitungan indikator kinerja yang terdiri atas hasil perhitungan penyelesaian perkara tahun berjalan dan perkara tunggakan/*carry over*,

dimana penyelesaiannya tidak sepenuhnya dapat dikendalikan oleh PPNS BBPOM di Jakarta. Faktor yang mempengaruhi antara lain: petunjuk jaksa, keberadaan saksi/tersangka, pemeriksaan ahli dari pihak eksternal. Berdasarkan rekomendasi tahun 2020 yakni perlu dilakukan intensifikasi koordinasi baik dengan lintas sektor maupun CJS terkait. Hasil dari rekomendasi tersebut adalah pelaksanaan koordinasi yang semakin optimal berdampak pada penyelesaian perkara tunggakan yang mengarah pada penyelesaian perkara. Kondisi tersebut sangat mempengaruhi indikator kinerja tahun 2021.

Selain itu, sebagaimana telah dijelaskan bahwa peningkatan efektivitas penindakan tindak pidana obat dan makanan merupakan hasil dari upaya komprehensif kegiatan intelijen hingga penyidikan perkara. Terlepas dari dinamika yang terjadi khususnya dalam perubahan struktur organisasi pada Deputi Bidang Penindakan BPOM dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upaya penyesuaian dan peningkatan kompetensi personel kelompok substansi penindakan terus dilakukan.

Berkenaan dengan persentase capaian kinerja, maka telah dilakukan pula revisi target kinerja dengan justifikasi hasil capaian kinerja tahun 2020 sebesar 54,37%. Dengan capaian kinerja tersebut serta pertimbangan faktor lingkungan strategis yang tidak mengalami perubahan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, pada tahun 2021 ini target kinerja disesuaikan menjadi 54%.

Pada tahun berikutnya, capaian sampai dengan triwulan keempat di tahun 2021 ini menjadi modal untuk berkinerja lebih baik lagi. Utamanya dalam menyelesaikan perkara tunggakan serta menyusun strategi untuk pelaksanaan kinerja yang lebih baik di tahun mendatang.

Sasaran Strategis-8: Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Balai Besar POM di Jakarta yang optimal

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 8

23. Indeks Reformasi Birokrasi Balai Besar POM di Jakarta

a. *Perbandingan target dan realisasi tahun 2021*

Tabel 27. Realisasi Indeks RB BB/BPOM tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	TARGET TRIWULAN IV TAHUN 2021	REALISASI	CAPAIAN TRIWULAN IV TAHUN 2021 (%)	KRITERIA
Indeks RB Balai Besar POM di Jakarta	82.24	82.24	82.29	99.87	Baik

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM.

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Pada Tahun 2020, BBPOM di Jakarta berhasil memperoleh predikat WBK dari Kementerian PAN dan RB.

Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan,

penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Tabel rincian bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM

No	Komponen Pengungkit	Bobot (60%)
1	Manajemen Perubahan	8%
2	Penataan Tatalaksana	7%
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	10%
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5	Penguatan Pengawasan	15%
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%

Tabel rincian bobot indikator hasil satker/unit kerja dan BB/BPOM

Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM:

No	Komponen Hasil	Bobot (40%)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	20%
2	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat	20%

Nilai indeks dihitung dari Penjumlahan bobot komponen pengungkit dan bobot komponen hasil. Penilaian indeks RB dilakukan oleh Inspektorat Utama pada akhir tahun. Hasil evaluasi Indeks RB Tahun 2021 menunjukkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pembangunan ZI dilakukan berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan pimpinan unit kerja. Terhadap pelaksanaan rencana kerja dilakukan monitoring dan evaluasi setiap Triwulan;
2. Komitmen terhadap perubahan telah dibangun dengan baik oleh seluruh anggota organisasi. Hal ini menunjukkan kontribusi dari Agent of Change (AoC) bersama dengan Kepala Balai yang berperan sebagai role model perubahan dan pelaksanaan nilai organisasi;
3. Telah mengembangkan berbagai inovasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik antara lain Laron Baja (Verifikasi Lartas Online Kiriman melalui Bea Cukai Pasar Baru), MONAS (Melindungi dan Mengawasi Anak Sekolah), None Sisi (Layanan Konsultasi Sertifikasi Online), E-Book Sertifikasi (Pangan, CPOTB Bertahap, dan Kosmetik), Inovasi LAILA (Layanan Informasi dan Pengaduan melalui Aplikasi Whatsapp), Inovasi Link Layanan Publik Terintegrasi (Infografis dan Akses di Media Sosial): linktr.ee/bbpomjkt dan Inovasi Kerling (Kegiatan Sertifikasi dan Layanan Informasi Keliling Balai Besar POM di Jakarta)
4. Disamping mengembangkan berbagai inovasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, BBPOM di Jakarta telah menetapkan Standar Pelayanan unit kerja dan mengimplementasikan sistem reward/punishment bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan. Hasil survei Persepsi Pelayanan Publik (IPP) sebesar 3,78 (syarat 3,2) dan survei Persepsi Anti Korupsi (IPAK) sebesar 3,8 (syarat 3,6) diatas persyaratan minimal yang ditetapkan KemenPANRB.

Beberapa hal yang masih perlu perbaikan terkait pelaksanaan Pembangunan ZI sebagai berikut:

Dari 93 rekomendasi 91 telah Sesuai Saran (SS) dengan presentase 97,85% dan masih terdapat 2 (dua) hasil pengawasan eksternal yang Belum Sesuai Saran (BSS);

1. Rencana kerja prioritas Pembangunan ZI belum mengakomodir seluruh area perubahan;

2. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja, namun belum terhadap seluruh pelatihan;
3. Telah membuat inovasi penerapan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang sesuai karakteristik unit kerja, namun belum menggambarkan implementasinya
4. Belum terdapat inovasi dalam penerapan sistem pengendalian intern unit kerja;
5. Monitoring dan evaluasi pada seluruh area perubahan belum dilaksanakan secara memadai termasuk pelaksanaan tindak lanjutnya;
6. Secara umum belum dilakukan analisis dampak kemanfaatan inovasi terhadap perbaikan unit kerja.
7. Telah mengembangkan dan mengimplementasikan berbagai inovasi untuk peningkatan pelayanan publik namun belum terdapat replikasi dari unit kerja lain.

Saran yang atas beberapa hal yang masih perlu perbaikan dalam pelaksanaan Pembangunan ZI sebagai berikut:

1. Memprioritaskan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan eksternal;
2. Menyusun rencana kerja prioritas Pembangunan ZI yang mengakomodir seluruh area perubahan;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja terhadap seluruh pelatihan
4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implemementasi inovasi penerapan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang sesuai karakteristik unit kerja;
5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pada seluruh area perubahan dan melaksanakan tindak lanjutnya secara memadai
6. Terus melakukan pengembangan inovasi baik yang sudah ada maupun inovasi baru, sesuai dengan karakteristik unit kerja dan kebutuhan stakeholder disertai analisis dampak kemanfaatan inovasi terhadap perbaikan

unit kerja sehingga diharapkan dapat direplikasi oleh unit kerja lain maupun instansi diluar BPOM

BBPOM di Jakarta berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja pada semua area perubahan untuk dapat meraih target Tahun 2022 sebesar 83.4. Program Reformasi Birokrasi yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021 antara lain:

1. Sosialisasi Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK WBBM baik kepada internal maupun eksternal (stakeholder) melalui berbagai media informasi
2. Evaluasi dokumen sistem manajemen mutu
3. Penggunaan teknologi informasi dalam kegiatan operasional (SIPT, SPIMKER, SIASN, SIMAK, SIRUP, e-planning, e-performance, dll)
4. Penerapan Program *Fraud Control Plan*
5. Program-program Inovasi seperti Kerling (sertifikasi keliling), ARIPIN, SABBENI, Si Piket, dll
6. Menyelenggarakan Sosialisasi dan Workshop untuk meningkatkan kompetensi dan menguatkan internalisasi RB kepada seluruh pegawai. Dengan telah diraihnya predikat WBK pada 2020, BBPOM di Jakarta menargetkan perolehan WBBM pada Tahun 2022. Oleh karenanya fokus kegiatan dilaksanakan untuk membangun pelayanan Prima melalui Sosialisasi UPP dan Pelayanan Prima tanggal 22-23 Juli 2021 dan Workshop UPP dan ICPA tanggal 26 dan 27 Agustus 2021
7. Perkuatan Komitmen Penegakan Zona Integritas menuju WBBM tanggal 27 Agustus 2021
8. Bimbingan Teknis Pengelolaan Kearsipan tanggal 18 Oktober 2021
9. Awareness Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2015 tanggal 1 November 2021
10. Kegiatan Refleksi Satu Tahun Implementasi Wilayah Bebas Korupsi : Perkuatan dan Sinergisme menuju WBBM Tahun 2022 tanggal 22 November 2021
11. Capacity Building dalam Rangka Peningkatan Zona Integritas Menuju WBBM tanggal 25-26 dan 30 November 2021

12. Sosialisasi Sistem Informasi Tata Naskah Dinas tanggal 21 Desember 2021

Prestasi yang berhasil diraih oleh Balai Besar POM di Jakarta yang mendukung Indeks RB adalah Agen Perubahan Terbaik Badan POM Tahun 2021, Pemenang Kedua Lomba Inovasi Pelayanan Publik Badan POM Tahun 2021 dan Raksa Nugraha Award Kategori Gold untuk Indonesia Consumer Protection Award Tahun 2021.

Sasaran Strategis-9: Terwujudnya sumber daya manusia Balai Besar POM di Jakarta yang berkinerja optimal

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 9

24. Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta

a. *Perbandingan target dan realisasi tahun 2021*

Tabel 28. Realisasi Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	TARGET TRIWULAN IV TAHUN 2021	REALISASI	CAPAIAN TRIWULAN IV TAHUN 2021 (%)	KRITERIA
Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta	79.1	79.1	79.85	100.95	Baik

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP):

SAKIP merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan RB yang berorientasi pada pencapaian *outcomes* dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang

dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM mitra kerja Inspektorat Utama.

Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 5 komponen penilaian antara lain:

1. Perencanaan Kinerja (30%) meliputi aspek:
 - a. Rencana Strategis (10%) meliputi pemenuhan renstra (2%), kualitas renstra (5%) dan implementasi renstra (3%)
 - b. Perencanaan kinerja tahunan (20%) meliputi pemenuhan RKT (4%), kualitas RKT (10%) dan implementasi RKT (6%)
2. Pengukuran Kinerja (25%) meliputi aspek:
 - a. Pemenuhan pengukuran (5%)
 - b. Kualitas pengukuran (12,5%)
 - c. Implementasi pengukuran (7,5%)
3. Pelaporan Kinerja (15%) meliputi aspek:
 - a. Pemenuhan pelaporan (3%)
 - b. Kualitas pelaporan (7,5%)
 - c. Pemanfaatan pelaporan (4,5%)
4. Evaluasi Internal (10%) meliputi aspek:
 - a. Pemenuhan evaluasi (2%)
 - b. Kualitas evaluasi (5%)
 - c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)
5. Capaian Kinerja (20%) meliputi aspek:
 - a. Kinerja yang dilaporkan (output) (7,5%)
 - b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) (12,5%)

Nilai AKIP merupakan penjumlahan 5 komponen penilaian evaluasi AKIP tersebut. Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja BB/BPOM di Jakarta adalah nilai

hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama BPOM atas implemementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Jakarta dengan rentang nilai sebagai berikut:

Tabel 31. Kategori Penilaian SAKIP

No.	Nilai Pemenuhan Terhadap Kinerja	Kategori	Keterangan
1.	> 90	AA	Sangat memuaskan
2.	> 80 s.d. 90	A	Memuaskan
3.	> 70 s.d 80	BB	Sangat baik
4.	> 60 s.d. 70	B	Baik
5.	> 50 s.d. 60	CC	Cukup baik
6.	> 30 s.d 50	C	Agak kurang
7.	< 30	D	Kurang

Rentang nilai evaluasi AKIP pada tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- (1) AA (Sangat Memuaskan) dengan nilai >90-100
- (2) A (Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel) dengan nilai >80-90
- (3) BB (Sangat Baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal) dengan nilai >70-80
- (4) B (Baik, akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan) dengan nilai >60-70
- (5) CC (Cukup (Memadai), akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar) dengan nilai >50-60
- (6) C (Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar) dengan nilai >30-50

(7) D (Sangat Kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar) dengan nilai 0-30

BBPOM Jakarta selama periode Triwulan IV Tahun 2021 tetap konsisten melaksanakan kegiatan untuk menunjang nilai akuntabilitas, antara lain:

1. Evaluasi kinerja secara berkala setiap bulan dan akhir triwulan serta menetapkan rekomendasi tindak lanjut dalam rangka pencapaian target kinerja
2. Melaksanakan sosialisasi SAKIP dan money online
3. Penggunaan Aplikasi SIMETRIS (e-planning dan e-performance)
4. Pelaporan hasil monitoring dan evaluasi baik internal Badan POM maupun kepada eksternal (Bappenas, Kementerian Keuangan)
5. Pengembangan inovasi pemantauan kinerja akuntabilitas melalui Sipitung Kinerja Versi 2 yang ditambahkan fitur Analisa capaian sasaran mutu dsb

Penilaian AKIP BBPOM di Jakarta dilakukan pada akhir tahun 2021 dengan nilai 79.85 berpredikat Sangat Baik (BB). Terdapat kenaikan nilai untuk komponen penilaian kecuai untuk evaluasi internal. Komponen evaluasi internal mengalami penurunan nilai dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 7,64 disebabkan notulen evaluasi internal tidak dilengkapi dengan pembagian PIC dan timeline penyelesaiannya serta rekomendasi dan monitoring rekomendasi pada laporan kinerja interim kurang memadai.

25. Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2021

Tabel 29. Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021.

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	TARGET TRIWULAN IV TAHUN 2021	REALISASI	CAPAIAN TRIWULAN IV TAHUN 2021 (%)	KRITERIA

Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta	84.25	84.25	84.7	100.53	Baik
---	-------	-------	------	--------	-------------

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

- (1) Kualifikasi: diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai
- (2) Kompetensi: diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan
- (3) Kinerja: diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS
- (4) Disiplin: diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami

Menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 (yang disiapkan oleh Biro Umum dan SDM) kepada seluruh pegawai (ASN) di Balai Besar POM di Jakarta

Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas :

- a. kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen);
- b. kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen);
- c. kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan
- d. disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut:

- a. Nilai 91 - 100 (Sembilan puluh satu- seratus) berkategori Sangat Tinggi;
- b. Nilai 81 - 90 (delapan puluh satu-sembilan puluh) berkategori Tinggi;
- c. Nilai 71 - 80 (tujuh puluh satu- delapan puluh) berkategori Sedang;

- d. Nilai 61 - 70 (enam puluh satu-tujuh puluh) berkategori Rendah; dan
- e. Nilai 0 – 60 (nol-enam puluh) berkategori Sangat Rendah.

Penilaian Indeks Profesionalitas dilakukan oleh Inspektorat Utama pada Akhir Tahun 2021. Beberapa kegiatan telah dilaksanakan oleh BBPOM di Jakarta dalam rangka meningkatkan indeks professionalitas ASN, yaitu:

1. Tugas Belajar bagi 7 orang pegawai untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan formal pegawai
2. Menyelenggarakan bimtek sesuai dengan kompetensi teknis yang dibutuhkan oleh pegawai dan menugaskan pegawai untuk mengikuti bimtek yang diselenggarakan oleh Pusat maupun instansi lain sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing
3. Memantau peningkatan kinerja pegawai melalui evaluasi pencapaian sasaran kinerja pegawai yang dilakukan setiap triwulan kepada seluruh pegawai BBPOM di Jakarta
4. Pemberian *reward* dan *punishment* untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai, antara lain terkait absens

Sasaran Strategis-10: Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan Informasi pengawasan Obat dan Makanan. Indikator Kinerja SasaranStrategis 10

26. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP

a. *Perbandingan target dan realisasi triwulan IV tahun 2021*

Tabel 30. Realisasi persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	REALISASI	CAPAIAN 2021 TW IV (%)	KRITERIA
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP	77	80,52	104,57	Baik

Yang maksud dengan pemenuhan terhadap standar GLP adalah upaya Lab pengujian UPT untuk memenuhi Standar *Good Laboratory Practice* (GLP) yang

meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel laboratorium.

Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional

Batas nilai minimal GLP adalah 70% dengan ketentuan sebagai berikut:

- Standar Ruang Lingkup > 65,
- Standar Kompetensi personel laboratorium > 75,
- Standar Alat Laboratorium > 70

b. Perbandingan realisasi dan capaian TW I, TW II, TW III dan TW IV tahun 2021

Hasil penilaian kemampuan laboratorium yang dilaksanakan oleh tim dari Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPPOMN) pada tahun 2021 ini baru diperoleh pada triwulan ke IV tahun 2021, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Berdasarkan penilaian kemampuan laboratorium yang dilaksanakan oleh tim dari Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPPOMN), Balai Besar POM di Jakarta mendapat hasil penilaian untuk presentase pemenuhan standar ruang lingkup untuk obat dan makanan sebesar 77,65%, melebihi batas minimal yaitu 65%. Presentase pemenuhan standar kompetensi personel laboratorium sebesar 90,01%, melebihi batas minimal yaitu 75%. Presentase pemenuhan standar peralatan sebesar 73,9%, melebihi batas minimal sebesar 70%.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Program / kegiatan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Jakarta untuk meningkatkan capaian kinerja adalah:

- menyelenggarakan pelatihan internal, mengikutsertakan personil pengujian dalam pelatihan eksternal dan kegiatan magang untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi personil pengujian.
 - melakukan Verifikasi Metode Analisis yang bertujuan untuk membuktikan bahwa metode analisis yang digunakan menghasilkan uji yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Jumlah metode analisis yang harus diverifikasi setiap tahunnya adalah 12 metode analisis dari laboratorium kosmetik, 12 metode analisis dari laboratorium obat tradisional dan Suplemen Kesehatan dan 12 metode analisis dari laboratorium obat. Dengan kegiatan verifikasi Metode Analisis ini diharapkan persentase pemenuhan ruang lingkup akan meningkat.
 - Program Kalibrasi Alat laboratorium yang dilakukan secara berkala setiap tahun yang bertujuan untuk menjamin peralatan memberikan hasil pengukuran sesuai dengan standar Nasional maupun Internasional dan untuk menjaga kondisi peralatan yang digunakan tetap sesuai dengan spesifikasinya. Dengan terpeliharanya alat laboratorium maka akan mendukung pemenuhan terhadap standar peralatan. Pemanfaatan Alat laboratorium secara maksimal dan tepat untuk menjamin kelayakan alat laboratorium juga mendukung hal tersebut.
 - Pemenuhan peralatan dan kebutuhan pengujian untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pengujian.
 - Ikut serta dalam Uji Profisiensi dan Uji Banding antar laboratorium untuk peningkatan ruang lingkup pengujian.
- e. *Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya*

Persentase pemenuhan yang masih rendah adalah pemenuhan terhadap Standar Peralatan dan Standar Ruang Lingkup. Terhadap Standar Peralatan, kemungkinan kenaikan persentase pemenuhan standarnya agak sulit karena kondisi luas ruangan Lab BBPOM Jakarta kurang memungkinkan untuk penambahan jumlah alat sesuai standar. Sebagian pengadaan alat merupakan penggantian alat rusak. Jadi untuk tahun-tahun mendatang peningkatan persentase pemenuhan SKL harus difokuskan pada penambahan ruang lingkup pengujian melalui verifikasi metode analisis yang belum pernah dilakukan, ikut serta dalam Uji Profisiensi, mengadakan Uji

Banding antar laboratorium dan bimbingan teknis internal dengan materi penerapan metode analisis baru.

27. Indeks pengelolaan data dan informasi Balai besar POM di Jakarta yang optimal

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan IV tahun 2021

Tabel 31. Realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi Balai besar POM di Jakarta yang optimal tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	TARGET TRIWULAN IV TAHUN 2021	REALISASI	CAPAIAN TRIWULAN IV TAHUN 2021 (%)	KRITERIA
Indeks pengelolaan data dan informasi Balai besar POM di Jakarta yang optimal	2	2	2.475	123,75	Tidak dapat disimpulkan

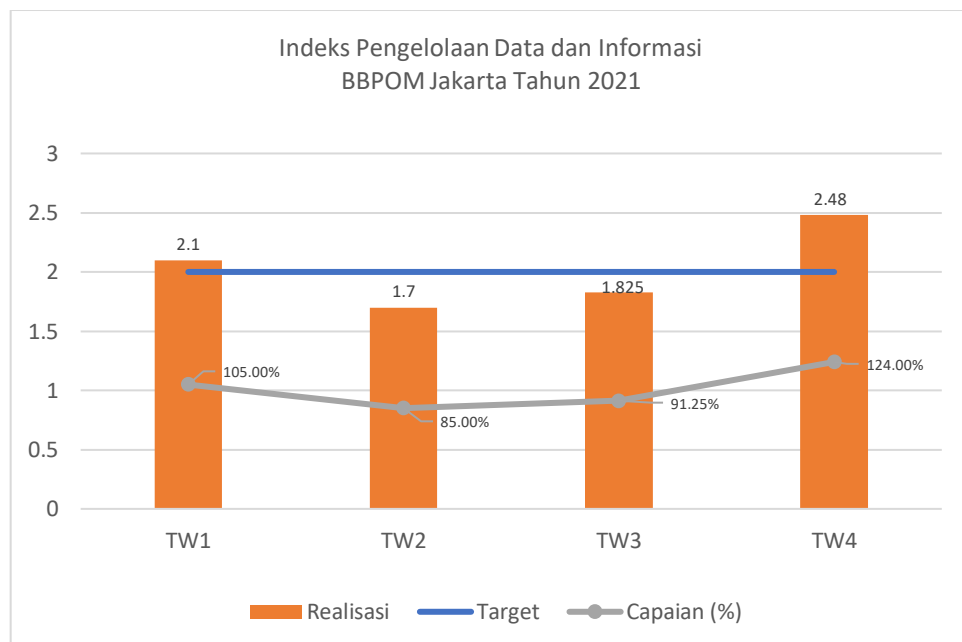
Komponen indeks pengelolaan data dan informasi UPT mencakup:

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di *BCC (BPOM Command Centre)*
 - Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem *BCC* yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM.
 - Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
 - *BCC* adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan
 - Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu *update* pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran.

- Terdapat data dan informasi dalam sistem BCC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan oleh UPT yaitu SIPT, SPIMKer Data Keracunan
2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM,
- Indeks ini mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup *email, sharing folder, dashboard BCC, Berita Aktual pada Subsite Balai*
 - Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bagian/kelompok substansi maupun individu.

Nilai Indeks Pengelolaan Data dan Informasi diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Data dan Informasi Nasional dengan kriteria sebagai berikut:

- 2,26 – 3 : Optimal
- 1,51 – 2,25 : Cukup
- 0,76 – 1,5 : Kurang Optimal
- 0 – 0,75 : Sangat Kurang



Indeks Pengelolaan Data dan Informasi BBPOM di Jakarta pada Triwulan IV mencapai target (2), yaitu 2,48. Nilai indeks ini jauh melampaui target (124%)

sehingga TIDAK DAPAT DISIMPULKAN. Nilai yang tinggi tersebut karena pada Triwulan IV terjadi kenaikan yang signifikan dibandingkan dengan Triwulan III, pada Triwulan IV BBPOM Jakarta sangat optimal memanfaatkan data dan informasi melalui email, sharing folder dan berita aktual serta memutakhirkan data melalui Spimker.

Nilai Indeks Pengelolaan Data dan Informasi 2,48 diperoleh dari penilaian komponen sebagai berikut:

A. Indeks Pemanfaatan Data dan Informasi (50%):

- ✓ Email (12,5%) = 3
- ✓ Pemanfaatan BOC (12,5%) = 2
- ✓ Sharing Folder (12,5%) = 3
- ✓ Berita Aktual (12,5%) = 3

B. Indeks Data dan Informasi yang Dimutakhirkan (50%):

- ✓ Spimker (20%) = 3
- ✓ SIPT (80%) = 2

b. *Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan*

Pemantauan indeks pengelolaan data dan informasi dilakukan oleh Tim IT yang tercantum dalam SK Tim IT BBPOM di Jakarta. Dalam rangka mengawal nilai Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal, dilakukan monitoring setiap bulan terhadap pencapaian masing-masing komponen penyusun indeks.

c. *Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja*

Program/ kegiatan yang menunjang pencapaian Indeks Pengelolaan Data dan Informasi, yaitu:

- Pembentukan Tim IT dalam rangka mengawal Nilai Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di BBPOM Jakarta dan dilakukan sosialisasi terkait komponen penilaian indeks pengelolaan data dan informasi untuk meningkatkan pemahaman anggota Tim IT sehingga dapat disusun langkah-langkah yang tepat dalam mengawal nilai indeks pengelolaan data dan informasi
- Program pemanfaatan email *corporate* secara berkala oleh setiap pegawai dalam pelaporan status kehadiran (WFO/WFH) setiap minggu telah

- berkontribusi terhadap meningkatnya nilai pemanfaatan email secara maksimal (3)
- Pemanfaatan *sharing folder* dilakukan dengan akses petugas pada saat pemeriksaan produk baik pada saat pemeriksaan di sarana maupun pemeriksaan penandaan obat sebagai tindak lanjut sampling produk. Pemanfaatan *sharing folder* sudah dilakukan dengan baik sehingga memperoleh nilai indeks maksimal (3).
 - Pemantauan jumlah berita aktual dan viewer setiap bulan dengan jumlah minimal 10 berita aktual/ bulan dengan masing-masing minimal 101 *viewer*/ berita actual
 - Verifikasi dan tindak lanjut petugas Aplikasi Spimker secara tepat waktu sehingga diperoleh nilai indeks pemutakhiran spimker yang optimal (3)

Sasaran Strategis-11: Terkelolanya keuangan Balai Besar POM di Jakarta secara akuntabel Indikator Kinerja Sasaran Strategis 11

28. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jakarta

a. *Perbandingan target dan realisasi triwulan tahun 2021*

Tabel 32. Nilai kinerja anggaran Balai Besar POM di Jakarta

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	TARGET TRIWULAN IV TAHUN 2021	REALISASI	CAPAIAN TRIWULAN IV TAHUN 2021 (%)	KRITERIA
Nilai kinerja anggaran Balai Besar POM di Jakarta	91.9	91.9	86.03	93.61	Baik

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).

- Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang mencerminkan 4 aspek yang terdiri dari 13 indikator sebagai berikut:

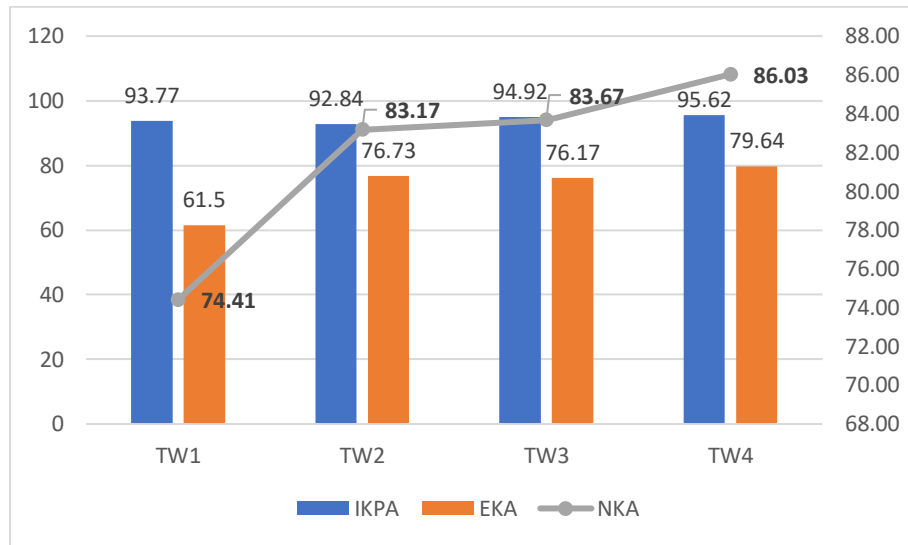
Aspek	Indikator	Bobot
Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan	Revisi DIPA	5%
	Deviasi Halaman III DIPA	5%
	Pagu Minus	5%
Kepatuhan terhadap Regulasi	Data Kontrak	10%
	Pengelolaan UP dan TUP	8%
	LPJ Bendahara	5%
	Dispensasi SPM	5%
Efektifitas Pelaksanaan Kegiatan	Penyerapan Anggaran	15%
	Penyelesaian Tagihan	10%
	Capaian Output	17%
	Retur SP2D	5%
Efisiensi Pelaksanaan Anggaran	Renkas	5%
	Kesalahan SPM	5%

- Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) terdiri dari 4 Indikator yaitu:

Indikator	Bobot
Penyerapan Anggaran	9,7%
Konsistensi	18,2%
Capaian Realisasi Output	43,5%
Efisiensi	28,6%

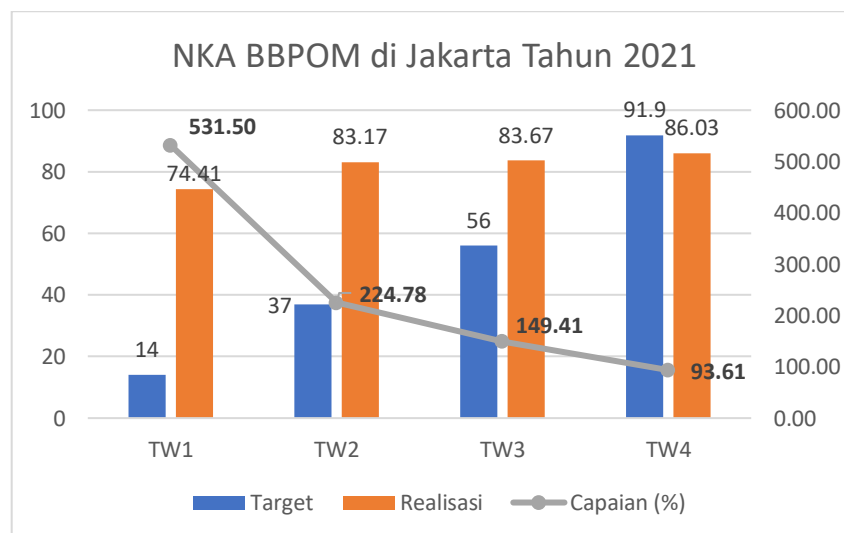
Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jakarta dihitung menggunakan rumus : $NKA = (\text{Nilai EKA} \times 60\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 40\%)$

Grafik Trend data IKPA dan EKA BBPOM di Jakarta Tahun 2021



Berdasarkan grafik tersebut, nilai IKPA cukup konsisten sejak Triwulan 1 sampai Triwulan IV berkisar antara 92-95%. Sedangkan nilai EKA meningkat dari 61,5 pada Triwulan 1 menjadi 79,64 pada Triwulan IV karena perhitungannya bersifat kumulatif. Oleh karena itu nilai NKA juga meningkat antar triwulan karena sifat kumulatif dari nilai EKA. Pada awal tahun, nilai NKA sudah cukup tinggi (74,41) karena nilai IKPA juga sudah tinggi (93,77)

Grafik Trend Capaian Nilai NKA dibandingkan dengan target



Grafik tersebut menunjukkan bahwa nilai NKA pada Triwulan IV tidak mencapai target (nilai capaian 93,61%). Terdapat perbedaan yang signifikan antara target dan capaian pada Triwulan 1 – III. Target yang ditetapkan pada Triwulan 1-III terlalu rendah sedangkan nilai NKA sudah cukup tinggi karena kontribusi nilai

IKPA yang tinggi sehingga nilai capaian terlalu tinggi pada awal tahun (531,50%) dan menunjukkan trend menurun sampai akhir tahun (149%). Untuk itu, direkomendasikan untuk menetapkan target triwulan nilai NKA periode selanjutnya sesuai dengan trend nilai NKA tahun 2021

Gambar Nilai Indikator Penyusun IKPA Tahun 2021

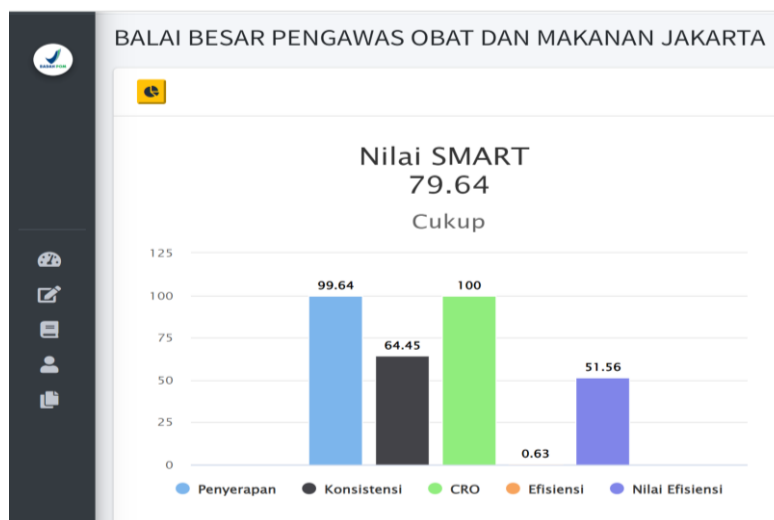
Indikator Pelaksanaan Anggaran

FILTER: SAMPAI DENGAN | DESEMBER

NO	KODE KPPN	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KESESUAIAN PERENCANAAN DENGAN PELAKSANAAN			KEPATUHAN TERHADAP REGULASI				EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEGIATAN				EFISIENSI PELAKSANAAN KEGIATAN		NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)	PENYER. ANGGA	
					REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PAGU MINUS	DATA KONTRAK	PENGLOLAAN UP DAN TUP	L/P BENDAHARA	DISPENSASI SPM	PENYERAPAN ANGGARAN	PENYELESAIAN TAGIHAN	CAPAIAN OUTPUT	RETUR SP2D	RENKAS	KESALAHAN SPM					
1	175	432747	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAKARTA	Nilai	100.00	53.63	100.00	97.00	100.00	100.00	100.00	93.14	100.00	100.00	99.80	0.00	90.00	90.84	95%	95.62		
				Bobot	5	5	5	10	8	5	5	15	10	17	5	0	5					
				Nilai Akhir	5.00	2.68	5.00	9.70	8.00	5.00	5.00	13.97	10.00	17.00	4.99	0.00	4.50					
				Nilai Aspek	84.54			99.25				98.24				90.00						

Disclaimer:
 Sesuai PER-4/PB/2021, untuk periode Triwulan I TA 2021 tidak dilakukan penilaian IKPA untuk indikator Deviasi Halaman III DIPA dan Capaian Output

Gambar Nilai Indikator Penyusun EKA Tahun 2021



b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Nilai NKA tidak mencapai target karena nilai EKA yang rendah, yaitu pada indikator efisiensi (bobot 28,6%) dan konsistensi (bobot 18,2%).

Sedangkan nilai IKPA sudah cukup tinggi, kecuali pada indikator halaman III DIPA (bobot 5%).

Deviasi halaman III DIPA dan konsistensi yang rendah menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara perencanaan dengan pelaksanaan. Hal ini disebabkan karena kurangnya monitoring kegiatan sesuai dengan perencanaan. Kondisi pandemi Covid yang tidak menentu menuntut pengelola kegiatan untuk melakukan penyesuaian pelaksanaan kegiatan sehingga berpengaruh terhadap perubahan Perencanaan Kegiatan yang telah disusun di awal tahun.

Nilai Efisiensi rendah (0,63% atau senilai 261 juta) karena adanya penghematan anggaran yang signifikan pada 2 KRO, yaitu:

- QIC (Pengawasan dan Pengendalian Lembaga) dengan mencapai output yang lebih besar daripada target
- EAA (Layanan Perkantoran) dengan adanya sisa anggaran

Dalam rangka meningkatkan nilai konsistensi dan halaman III DIPA, perlu dilakukan pemutakhiran RPD secara berkala, maksimal 10 hari kerja pertama setiap awal triwulan. Sedangkan untuk meningkatkan nilai efisiensi, terdapat 2 alternatif, yaitu:

- Menggunakan anggaran sekecil-kecilnya untuk mencapai target output sesuai dengan DIPA
- Mencapai output lebih dari target (maksimal 120%) menggunakan anggaran sesuai dengan pagu pada DIPA

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Komitmen dan sinergi antara pengelola kegiatan dan pengelola keuangan serta bagian pelaporan dan evaluasi merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan anggaran sesuai ketentuan

d. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

Rekomendasi terkait nilai kinerja anggaran telah diterapkan dan terus diupayakan untuk ditingkatkan Balai Besar POM di Jakarta. Monitoring terhadap anggaran yang diterapkan oleh Balai Besar POM di Jakarta akan terus dievaluasi secara konsisten

29. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Balai Besar POM di Jakarta

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan IV tahun 2021

Tabel 33. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	TARGET TRIWULAN IV TAHUN 2021	REALISASI	CAPAIAN TRIWULAN IV TAHUN 2021 (%)	KRITERIA
Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Balai Besar POM di Jakarta	Efisien (95%)	Efisien (95%)	Efisien (100%)	105.26%	Baik

Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan *input* yang lebih sedikit namun menghasilkan *output* yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian *output* sama atau lebih tinggi dari capaian *input*. Indeks efisiensi (IE) Diperoleh dengan membagi % capaian *output* dengan % capaian *input*, dengan rumus sebagai berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ capaian output}}{\% \text{ capaian input}}$$

Standar efisiensi (SE) adalah 1

$$TE = \frac{(IE - SE)}{SE}$$

Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan dianggap efisien, apabila: $IE \leq SE$ maka kegiatan dianggap tidak efisien, dengan kriteria:

- (1) Efisien apabila TE berkisar dari 0 sampai dengan 1
- (2) Tidak efisien apabila $TE < 0$ atau $TE > 1$

Capaian Indikator Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

- (1) 0 - 0,2 : 100% (Efisien)
- (2) 0,21 - 0,4 : 95% (Efisien)

- (3) 0,41 - 0,6 : 92% (Efisien)
- (4) 0,61 - 0,8 : 90% (Efisien)
- (5) 0,81 - 1,0 : 88% (Efisien)
- (6) 1,01 - 1,2 : 86% (Tidak Efisien)
- (7) 1,21 - 1,4 : 84% (Tidak Efisien)
- (8) 1,41 - 1,6 : 80% (Tidak Efisien)
- (9) 1,61 - 1,8 : 78% (Tidak Efisien)
- (10) > 1,81 : 75% (Tidak Efisien)
- (11) < 0 : 75% (Tidak Efisien)



Tingkat efisiensi dihitung dengan membandingkan persentase pencapaian target indikator kinerja dengan persentase anggaran yang digunakan dalam mencapai target kinerja tersebut. Tingkat efisiensi BBPOM di Jakarta pada Triwulan 4 mencapai nilai 100%. Nilai ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan triwulan 1, 2 dan 3. Hal ini disebabkan pada akhir tahun, pencapaian target indikator rata-rata 102,33% dengan alokasi anggaran 99,64% sehingga diperoleh indeks efisiensi 1,03 dan tingkat efisiensi 0,03 (100%, efisien).

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Seluruh program dan kegiatan dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan perencanaan kegiatan yang telah disusun dan disesuaikan dengan kondisi pandemi covid sehingga beberapa kegiatan dilakukan modifikasi baik

perubahan dari onsite menjadi daring maupun *hybrid* sehingga mempengaruhi tingkat efisiensi kegiatan

c. *Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja*

Selama masa pandemi COVID-19, Balai Besar POM di Jakarta berupaya tetap melaksanakan kegiatan dengan tetap mematuhi ketentuan yang berlaku. Adaptasi pola pelaksanaan sebagian besar kegiatan menjadi daring. Antisipasi perubahan kondisi selama masa pandemi COVID-19 yang bertumpu pada kegiatan daring berdampak positif pada pencapaian *output*. Dengan demikian, penggunaan anggaran menjadi efisien

3.2. Realisasi Anggaran

Pada periode Triwulan IV Tahun 2021, terdapat penambahan anggaran belanja pegawai sebesar 70.000.000 sehingga DIPA BBPOM di Jakarta bertambah dari Rp. 41.616.698.000 menjadi Rp. 41.686.698.000. Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan IV tahun 2021 sebesar Rp. 41.538.323.342 (99,64%).

Pengelolaan anggaran Balai Besar POM di Jakarta senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.

Upaya yang telah dilakukan Balai Besar POM di Jakarta dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah:

- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala
- Revisi anggaran untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan
- Peningkatan penggunaan sistem teknologi informasi komunikasi dalam pengelolaan keuangan
- Peningkatan kompetensi petugas pengelola keuangan terhadap kepatuhan dalam pengelolaan keuangan

Terdapat perubahan pagu anggaran pada seluruh sasaran strategis karena adanya revisi DIPA. Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen penetapan kinerja/perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 34. Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis Triwulan IV tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Capaian input
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Rp. 961.405.200	Rp. 947.292.579	98,53%
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Rp. 156.071.850	Rp. 155.859.022	99,86%
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Rp. 1.325.040.450	Rp. 1.318.115.957	99,47%
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Rp. 793.678.200	Rp. 793.152.564	99,93%
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Rp. 2.861.865.000	Rp. 2.861.612.000	99,99%
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Rp. 412.030.800	Rp. 402.294.544	97,63%
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Rp. 1.042.636.000	Rp. 1.042.404.417	99,97%
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	Rp. 782.513.000	Rp. 781.305.729	99,85%

No	Sasaran Strategis	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Capaian <i>input</i>
9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jakarta yang berkinerja optimal	Rp. 24.425.665.000	Rp. 24.359.468.512	99,73%
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Rp. 8.143.279.500	Rp. 8.137.255.837	99,93%
11	Terkelolanya Keuangan UPT Balai Besar POM di Jakarta secara Akuntabel	Rp. 782.513.000	Rp. 781.305.728	99,85%

Capaian realisasi anggaran per sasaran strategis cukup tinggi, yaitu berkisar antara 99,47% sampai 99,99%.

1.1. Analisis Efisiensi Kegiatan

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan. Dalam hal ini efisiensi diukur berdasarkan capaian suatu kegiatan dibandingkan dengan penggunaan *input*, yang lebih sedikit tetapi menghasilkan *output* yang sama/lebih besar; atau penggunaan *input* yang sama dapat menghasilkan *output* yang sama/lebih besar; atau persentase capaian *output* sama/lebih tinggi daripada persentase *input* yang digunakan. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian *output* terhadap % capaian *input* (dalam laporan ini, capaian input yaitu realisasi anggaran), sesuai rumus berikut :

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} = 100\% = 1$$

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut :

Jika $IE > SE$, maka
kegiatan dianggap efisien

Jika $IE < SE$, maka kegiatan
dianggap tidak efisien

Tingkat efisiensi kegiatan yang dilaksanakan Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021 Triwulan IV sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini:

Tabel 35. Tingkat Efisiensi Kegiatan Triwulan IV tahun 2021

Kode	Program/ Output/ Kegiatan	Persen capaian rata-rata		IE	SE	TE	Kategori
		input	output				
3165.ADD.001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	99,79	100	1,00	1	0	Efisien
3165.AEA.001	Laporan kegiatan dukungan investigasi dan penyidikan obat dan makanan oleh BB/BPOM	99,99	100	1,00	1	0	Efisien
3165.BAH.001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh BB/BPOM	99,89	100	1,00	1	0	Efisien
3165.BDC.001	KIE Obat dan Makanan Aman oleh BB/BPOM	100	100	1,00	1	0	Efisien
3165.BKB.001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	99,41	100	1,01	1	0,01	Efisien
3165.BMB.001	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh BB/BPOM	99,99	100	1,00	1	0	Efisien
3165.CAB.001	Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	99,99	100	1,00	1	0	Efisien
3165.CAB.002	Layanan Sarana Pelayanan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	99,77	100	1,00	1	0	Efisien
3165.CAB.003	Layanan Prasarana Pelayanan Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	99,36	100	1,01	1	1,01	Efisien
3165.QCD.U01	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BALAI/ BALAI BESAR POM	99,96	100	1,00	1	0	Efisien
3165.QDB.001	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	99,93	100	1,00	1	0	Efisien
3165.QDB.002	Desa Pangan Aman	100	100	1,00	1	0	Efisien
3165.QDB.003	Pasar aman dari bahan berbahaya	100	100	1,00	1	0	Efisien
3165.QIA.001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM	99,98	101,22	1,01	1	0,01	Efisien

Kode	Program/ Output/ Kegiatan	Persen capaian rata-rata		IE	SE	TE	Kategori
		input	output				
3165.QIA.005	<i>Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh BB/BPOM</i>	99,13	100,06	1,01	1	0,01	Efisien
3165.QIA.008	<i>Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh BB/BPOM</i>	99,62	100	1,00	1	0	Efisien
3165.QIC.001	<i>Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM</i>	99,87	108,33	1,08	1	0,08	Efisien
3165.QIC.004	<i>Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM</i>	99,81	120,48	1,21	1	0,21	Efisien
6348.EAA.004	<i>Layanan Perkantoran UPT</i>	99,73	100	1,00	1	0,01	Efisien

Pada tahun 2021 Balai Besar POM di Jakarta melaksanakan 19 (Sembilan belas) kegiatan untuk mendukung pencapaian 11 sasaran strategis dengan kategori efisien. Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan diperoleh bervariasi antara 0 sampai 0,21 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh kegiatan dilaksanakan secara efisien.

Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara *output* dan *input*, dalam bentuk anggaran. Pada masa mendatang, pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan *input* yang lain dengan dukungan data yang lebih memadai. Pengukuran efisiensi kegiatan secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran.

Tabel 36. Efisiensi kegiatan Per Sasaran Strategis Triwulan IV

Balai Besar POM di Jakarta

No	Sasaran Strategis	Persen capaian rata-rata		IE	SE	TE	Kategori
		input	output				
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	89,61	95,60	1,15	1	0,15	Efisien
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	102,49	99,86	1,03	1	0,03	Efisien
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	99,73	101,59	1,02	1	0,02	Efisien
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	99,93	108,94	1,09	1	0,09	Efisien
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	99,98	100,22	1,00	1	0	Efisien
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	97,03	93,63	0,97	1	-0,03	Tidak Efisien
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	99,98	108,54	1,09	1	0,09	Efisien
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	99,84	100,41	1,01	1	0,01	Efisien
9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jakarta yang berkinerja optimal	99,73	100,53	1,01	1	0,01	Efisien
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan	99,81	114,15	1,14	1	0,14	Efisien

No	Sasaran Strategis	Persen capaian rata-rata		IE	SE	TE	Kategori
		input	output				
	informasi pengawasan obat dan makanan						
11	Terkelolanya Keuangan UPT Balai Besar POM di Jakarta secara Akuntabel	99,84	89,231	1,01	1	0,01	Efisien

Secara umum dapat disimpulkan bahwa kegiatan dalam mencapai sasaran strategis telah dilaksanakan secara efisien. Hanya sasaran strategis “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta” dengan kriteria TIDAK EFISIEN karena capaian sasaran strategis lebih kecil dibandingkan persentase anggaran yang digunakan. Perlu dilakukan kajian terhadap penetapan input (anggaran) dan kaitannya baik secara langsung maupun tidak langsung dengan pencapaian indikator pembangun sasaran strategis karena struktur anggaran dan indikator kinerja tidak selaras. Sehubungan tingkat efisiensi anggaran juga merupakan indikator dalam perhitungan Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dalam penetapan Nilai Kinerja Anggaran, maka indikator ini tidak akan dievaluasi lagi pada periode tahun 2022.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Tahun 2021 merupakan tahun pertama dari Rencana Strategis 2021-2024. Untuk menunjang pencapaian 11 sasaran strategis tersebut, diukur melalui 29 indikator kinerja utama.

1. Dari 29 (dua puluh sembilan) indikator kinerja, 24 (dua puluh empat) indikator mencapai target dengan kategori “**baik**” ($90\% \leq x < 110\%$); 1 (satu) indikator mencapai kategori “**cukup**” ($70\% \leq x < 90\%$); 1 (satu) indikator mempunyai capaian melebihi 120% dengan kategori “**tidak dapat disimpulkan**”, 3 (tiga) indikator mencapai target dengan kategori “**sangat baik**” ($110\% \leq x < 120\%$).
2. Hasil capaian empat sasaran strategis terbaik dari adalah sebagai berikut:
Nilai pencapaian tertinggi pertama adalah pada sasaran strategis ke-tujuh sebesar 123.75% dengan kriteria **TIDAK DAPAT DISIMPULKAN** menunjukkan keberhasilan Balai Besar POM di meningkatnya Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jakarta yang optimal.

4.2. Saran

Hingga Triwulan IV tahun 2021, kegiatan banyak terkendala disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19 yang ditindaklanjuti dengan penerapan Diberlakukannya PPKM darurat pada bulan Juli 2021 hingga saat ini berdampak pada realisasi anggaran BBPOM di Jakarta, adanya pembatasan aktivitas sehingga realisasi untuk perjalanan dinas dan pengadaan alat laboratorium belum maksimal dikarenakan pengiriman terhambat dan berpengaruh pada SPM. Rencana yang ditetapkan oleh Balai Besar POM di Jakarta akan terus dievaluasi secara konsisten sehingga kinerja yang dilaksanakan dapat memenuhi target di tahun 2021.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Ikhtisar Rencana Strategis Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
Program Pengawasan Obat dan Makanan (Kegiatan: Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia)							
Stakeholder							
	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase Obat yang memenuhi syarat	86	80	81	82	83
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	95	95.5	96	96.5
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86	80	81	82	83
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78	81	83	84	86
		Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	-	88	89	90	90
	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	75	85	87	89	91
	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	82	86.6	87.7	88.8	89.9

Program/ Kegiatan	Sasaran strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	72	74.98	76.65	78.33	80.01
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	88,5	90	91	92	93
	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	89	90	91	93
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	55,5	75	79	82	85
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	83	85	87	89	91
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	46	60	63	65	70
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	73	75	78	80
		Indeks Pelayanan Publik di Lingkup BBPOM di Jakarta	3,51	4.20	4,30	4,40	4,51
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/ pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	-	-	77	79	81
Internal Process							
	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	70	93	94.4	95.8	97.3
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	20	40	65	90	115

Program/ Kegiatan	Sasaran strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Jumlah desa pangan aman	7	14	21	28	36
		Jumlah pasar aman berbasis komunitas	1	2	3	4	6
	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90	100	100	100	100
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	89	100	100	100	100
	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	32	54	58	61	65
Learning and Growth							
	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	Indeks RB Balai Besar POM di Jakarta	88	82.4	83.4	84.4	85.4
		Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta	81	79.1	80	81	82
	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jakarta yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta	75	84.25	84.5	84.75	85
	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	82	77	82	87	92
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	1,51	2	2,25	2,5	3

Program/ Kegiatan	Sasaran strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jakarta secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jakarta	93	91.9	92.5	93.7	94.9
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Jakarta	Efisien (95%)	Efisien (95%)	-	-	-

Lampiran 3. Rekapitulasi Sarana Produksi TW IV tahun 2021

No	Sarana Produksi	UPT	Jumlah Sarana yang ada	Target sarana 1 tahun *	Oktober			November			Desember		Total			RAPK s.d. TW 4 (Jan - Des)					
					Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa (penyebut)	MK (pembilang)	TMK	% Sarana MK	
1	Industri Farmasi (IF)	Jakarta	35	13	3	3	0	1	1	0	3	2	1	18	14	4	18	14	4		
			-		0			0			0			0	0	0	0	0	0		
			-		0			0			0			0	0	0	0	0	0		
			TOTAL	35	13	3	3	0	1	1	0	3	2	1	18	14	4	18	14	4	77,78
2	Fasilitas Bahan Baku Obat/ Produk Biologi/Sarana Khusus (Unit Transfusi Darah, Radiofarmaka, Lab Sel Puncak)	Jakarta	4	5	1	1	0	1	1	0	0	0	6	4	2	6	4	2			
			-		0			0			0		0	0	0	0	0	0	0		
			-		0			0			0		0	0	0	0	0	0	0		
			TOTAL	4	5	1	1	0	1	1	0	0	6	4	2	6	4	2		66,67	
3	Industri Obat Tradisional (IOT)	Jakarta	19	8	2	2	0	2	2	0	1	0	1	8	5	3	8	5	3		
			-		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			-		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			TOTAL	19	8	2	2	0	2	2	0	1	0	1	8	5	3	8	5	3	62,50
4	Industri Ekstrak Bahan Alam (EBA)	Jakarta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			-		0			0			0		0	0	0	0	0	0	0		
			-		0			0			0		0	0	0	0	0	0	0		
			TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Jakarta	64	31	3	3	0	1	0	1	1	0	1	35	26	9	35	26	9		
			-		0			0			0		0	0	0	0	0	0	0		
			-		0			0			0		0	0	0	0	0	0	0		
			TOTAL	64	31	3	3	0	1	0	1	1	0	1	35	26	9	35	26	9	74,29
6	Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jakarta	0	5	1	1	0	0	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0			
			-		0			0			0		0	0	0	0	0	0	0		
			-		0			0			0		0	0	0	0	0	0	0		
			TOTAL	0	5	1	1	0	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0		100,00	
7	Industri Farmasi (IF) yang memproduksi Suplemen Kesehatan	Jakarta	26	4	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	3	0	3	3	0		
			-		0			0			0		0	0	0	0	0	0	0		
			-		0			0			0		0	0	0	0	0	0	0		
			TOTAL	26	4	0	0	0	0	0	1	0	1	3	3	0	3	3	0	100,00	
8	Industri Obat Tradisional (IOT) yang memproduksi Suplemen Kesehatan	Jakarta	41	4	2	2	0	1	1	0	1	0	1	5	3	2	5	3	2		
			-		0			0			0		0	0	0	0	0	0	0		
			-		0			0			0		0	0	0	0	0	0	0		
			TOTAL	41	4	2	2	0	1	1	0	1	0	1	5	3	2	5	3	2	60,00
9	Industri Pangan (IP) yang memproduksi Suplemen Kesehatan	Jakarta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			-		0			0			0		0	0	0	0	0	0	0		
			-		0			0			0		0	0	0	0	0	0	0		
			TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Industri Kosmetik	Jakarta	93	68	16	11	5	2	1	1	0	0	71	51	20	71	51	20			
			-		0			0			0		0	0	0	0	0	0	0		
			-		0			0			0		0	0	0	0	0	0	0		
			TOTAL	93	68	16	11	5	2	1	1	0	71	51	20	71	51	20		71,83	
11	Industri Pangan	Jakarta	161	100	18	10	8	13	11	2	2	1	111	85	26	111	85	26			
			-		0			0			0		0	0	0	0	0	0	0		
			-		0			0			0		0	0	0	0	0	0	0		
			TOTAL	161	100	18	10	8	13	11	2	2	111	85	26	111	85	26		76,58	
12	Industri Rumah Tangga Pangan (R RTP)	Jakarta	154	62	2	2	0	0	0	0	0	0	64	29	35	64	29	35			
			-		0			0			0		0	0	0	0	0	0	0		
			-		0			0			0		0	0	0	0	0	0	0		
			TOTAL	154	62	2	2	0	0	0	0	0	64	29	35	64	29	35		45,31	
	Jakarta		597	300	48	35	13	21	17	4	9	4	326	225	101	326	225	101		69,02	
	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTAL		597	300	48	35	13	21	17	4	9	4	326	225	101	326	225	101		69,02	